

NADIEM MAKARIM TERJERAT PROYEK CHROMEBOOK TRILIUNAN

**TANDA TANYA PARA
TERSANGKA**

**TARIF TRUMP MULAI
1 AGUSTUS 2025**

**JURIST TAN
MASIH DICARI**

**KARAWANG JADI
SAKSI HILIRISASI**

**MUTASI DAN
ROTASI BUKAN
INTERUPSI**

**ZERO ODOL TETAP JADI
PRABOWO**

**BERTEMU LULA
DA SILVA**

**SIAP-SIAP KOPERASI
MERAH PUTIH**

**HERMAN DERU OPTIMIS
CETAK SAWAH
48 RIBU HEKTARE**

**KUALANAMU
DISIAPKAN JADI
PINTU GERBANG
INDONESIA BARAT**

**JATIM SIAP WUJUDKAN
SWASEMBADA GULA
NASIONAL**

**PEMILU NASIONAL
DAN LOKAL
DIGELAR TERPISAH
MULAI 2029**



Rp75.000,-



INOVASI UNTUK NEGERI info indonesia Network

www.infoindonesia.id

**INFO
PASANG
IKLAN
NUR AISAH
0815-1157-6312**



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

www.infoindonesia.id
facebook @infoindonesia.id
twitter : @_infoindonesia
Instagram @info_indonesia.id
YouTube : infoindonesiatv

Mengucapkan

**SELAMAT
ATAS KELULUSAN
JENJANG STRATA 3
PROGRAM DOKTORAL
ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Dr. H. Herman Deru, SH., M.M.

30 JUNI 2025

EDISI
BULAN
JULI
2025

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Yang terbiasa mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah sudah lama mafhum urusan kerawanannya. Tak urung, tanda-tanda kerawanan itu tampak lagi dalam proyek pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada periode 2019-2022.



22

INFO SUMSEL

Gubernur Sumsel H. Herman Deru optimistis program konstruksi cetak sawah tahun 2025 akan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Keyakinan ini disampaikannya saat menghadiri penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel.



32

INFO DAERAH

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, melakukan panen dan penanaman tebu bersama di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi, pada Senin 23 Juni 2025.



74

INFO NASIONAL

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun kota inklusif dan berkelanjutan pada Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Brasil.



54

INFO EKONOMI

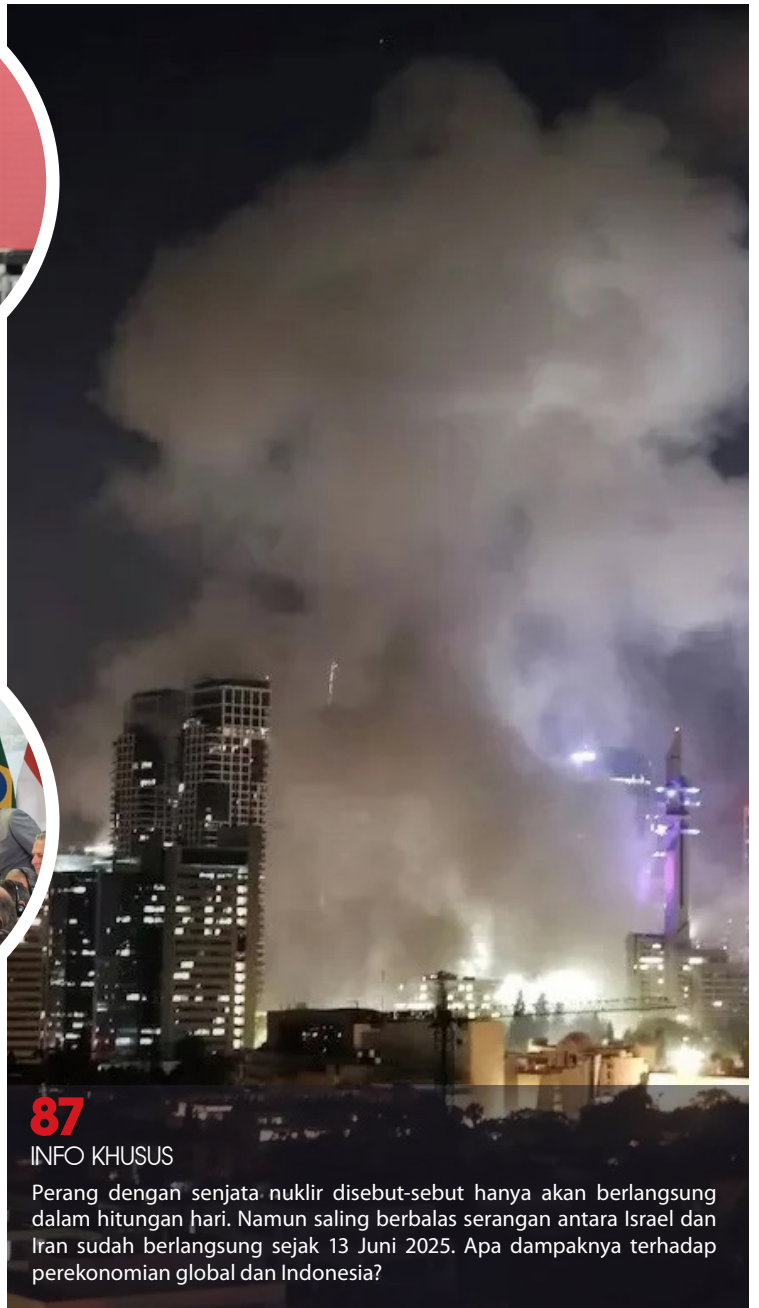
Bank DKI resmi berganti nama dan logo menjadi Bank Jakarta yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta.



72

INFO ISTANA

Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Mempererat hubungan kedua negara.



87

INFO KHUSUS

Perang dengan senjata nuklir disebut-sebut hanya akan berlangsung dalam hitungan hari. Namun saling berbalas serangan antara Israel dan Iran sudah berlangsung sejak 13 Juni 2025. Apa dampaknya terhadap perekonomian global dan Indonesia?

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

42 INFO WISATA

44 INFO SELEBRITI

46 INFO OLAHRAGA

86 KAJI

34

INFO DAERAH

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menghapus kebijakan pemberian pekerjaan rumah (PR) bagi siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB mulai tahun ajaran baru 2025/2026.



PERMANEN

Ketidakpastian global akan bersifat permanen. Begitu kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika berbicara di acara Economic Update 2025. Mungkin berlebihan jika memadankan permanen dengan abadi. Baiklah, permanen kita maknai sebagai awet, bertahan lama.

Tapi, yang menjadi perhatian Bu Menkeu malah bukan permanen atau tidak. Yang lebih ia soroti di Hotel Borobudur Jakarta, tempat berlangsungnya acara pada Rabu, 18 Juni 2025 itu, justru pemahaman kita mengenai ketidakpastian global. Menurut Menkeu yang bisa disapa Ani itu, (pilihan kata, diksi) ketidakpastian tergolong sangat-sangat lunak. Yang terjadi, sambungnya, bukan hanya uncertainty (ketidakpastian), melainkan juga fundamental shift shock, guncangan perubahan mendasar. Jadi, yang awet atau permanen itu bukan sekadar ketidakpastian. Guncangan itulah yang akan bertahan lama.

Dari mana guncangan permanen itu berawal? Mengikuti uraian Bu Menkeu, sumber guncangan permanen tadi adalah pergeseran mendasar (fundamental shift). Ringkasnya sikap Amerika Serikat yang sebelumnya mengadvokasi globalisasi justru merasa menjadi korban (victim) proses integrasi antarbangsa di seluruh dunia itu.

Masih menurut Bu Menkeu, karena AS merasa menjadi pasar dari seluruh dunia, dan itu menimbulkan dampak terhadap struktur perekonomiannya sehingga sektor manufakturnya kalah bersaing. Selanjutnya sektor itu pindah ke negara dengan upah lebih rendah, efisiensi lebih tinggi, maka struktur perekonomian Amerika ditopang oleh perekonomian yang lebih berbasis kepada jasa digital atau financial yang nilainya sangat tinggi. Dampak negatifnya, muncul fenomena sosial politik segmen masyarakat AS yang kehilangan pekerjaan akibat kompetisi global.

Nah, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, globalisasi yang berlandaskan perundingan multilateral dipangkas begitu saja dengan pembicaraan bilateral, dua negara, antara AS dengan satu negara lainnya. Kita dapat mengamati relevansinya dengan pembicaraan telepon antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Trump belum lama ini. Hal yang sama sudah dilakukan Trump dengan Presiden China Xi Jinping

Sedangkan Bu Menkeu mengemukakan pula, kebijakan tarif masuk yang diputuskan sendiri oleh AS, unilateral. Menurut Menkeu Ani, unilateral tariffs policy terhadap semua partner dagang AS itu selain karena domestic policy itu juga membentuk global governance (tata kelola global) baru. Banyak negara yang masih berharap, kata Bu Menkeu, seharusnya kalau ada dispute we have to settle it di WTO. Tapi WTO sekarang tidak atau sangat kurang berfungsi. Inilah salah satu poin fundamental shift shock tadi, awet dan entah kapan berakhirnya. Sedangkan dampaknya adalah kelesuan ekonomi global termasuk yang terjadi di dalam negeri kita.

Akhirnya, kita semua di Indonesia harus siap menyesuaikan diri untuk menemukan jalan keluar dari guncangan-guncangan tadi. Bu Menkeu menegaskan perlunya menjamin agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sanggup menjadi peredam guncangan permanen itu. Berat, tapi kebijakan alternatif memang terlalu sedikit. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



NADIEM MAKARIM DI PROYEK CHROMEBOOK

Yang terbiasa mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah sudah lama mafhum urusan kerawanannya. Tak urung, tanda-tanda kerawanan itu tampak lagi dalam proyek pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada periode 2019-2022.

Memang rawan. Proyek pengadaan relatif mudah menjadi celah penyimpanan dari aturan ketentuan, bahkan melanggar hukum.

Dalam proyek pengadaan chrome-book, komputer jinjing dengan perangkat lunak chrome produk raksasa teknologi informasi Google, misalnya, Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan adanya permufakatan jahat

Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI, Harli Siregar mengemukakan pencekalan itu sesuai dengan surat yang diterbitkan imigrasi sejak 19 Juni 2025.

"Iya sejak 19 Juni 2025 untuk enam bulan ke depan," ungkap Harli pada Jumat, 27 Juni 2025.

Menurut Kapuspenkum, upaya pencekalan ini dalam rangka mengoptimalkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi program digitalisasi

itu.

Adapun, rapat inilah yang dialami oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan RI lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut. Kapuspenkum Kejaksaan Harli Siregar pernah mengemukakan, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) mendalami dugaan adanya permufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis.



oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada 2020.

Toh urusan dalam-mendalami ini sudah menyeret Mendikbudristek kala itu, Nadiem Makarim, hingga terkena cegah tangkal (cekal). Dengan status dicekal Nadiem dicegah bepergian ke luar negeri.

Kejaksaan Agung (Kejagung) pun berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mencekal eks Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim ke luar negeri. Kepala Pusat Penerangan

pendidikan periode 2019-2022. "Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan," ujar Harli.

Sebelumnya, Nadiem Makarim memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Senin, 23 Juni 2025. Sejak tiba di Kejaksaan Agung pada sekitar pukul 09 pagi WIB, Nadiem baru lepas dari pemeriksaan setelah pukul 21.00 WIB

Dalam pemeriksaan itu penyidik Kejaksaan mendalami ihwal rapat pada Mei 2020. Rapat itu diduga mengkaji sebelum memutuskan pilihan pengadaan laptop Chromebook. Harap maklum, inti pendalaman dugaan permufakatan jahat tadi memang di putusan pengadaan

Arahannya, agar membuat kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. "Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada operating system (sistem operasi) Chrome," katanya.

Harli mengemukakan pula, dalam pemeriksaan itu, Nadiem diberondong pertanyaan antara lain soal pelaksanaan rapat untuk mengubah hasil kajian teknis pengadaan laptop Chromebook. "Ada hal yang sangat penting dialami oleh penyidik dalam kaitan dengan rapat pada bulan Mei 2020. Kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis itu sudah dilakukan sejak bulan April lalu pada

akhirnya diubah di bulan kalau enggak salah di bulan Juni atau Juli,” kata Harli kepada wartawan, Senin, 23 Juni 2025.

Harli menjelaskan dalam rapat yang terjadi pada 6 Mei 2020 itu penyidik menduga terdapat pengkondisian hasil kajian teknis penggunaan laptop Chromebook. Padahal, kata Harli, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Alasannya, pada 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000

Rp6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus (DAK).

Usai pemeriksaan, Nadiem mengatakan kehadirannya itu sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. “Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih,” kata Nad-

bersikap kooperatif dalam proses hukum yang masih akan berlanjut. “Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama,” jelasnya.

Sebelumnya Nadiem juga mengemukakan hal serupa. “Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung,”



unit Chromebook oleh Pustekkom Kemendikbud Ristek dan hasilnya tidak efektif.

Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbud Ristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan operasi sistem Chrome.

Dari sisi anggaran, Kapuspenkum mengatakan bahwa pengadaan itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. Dana hampir puluhan triliun tersebut terdiri atas Rp3,582 triliun dana satuan pendidikan (DSP) dan sekitar

iem di Gedung Bundar, Kejakung, Senin, 23 Juni 2025.

la juga mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani proses hukum pengadaan Chromebook ini. “Dalam kapasitas sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah,” sambung Nadiem yang juga salah satu pendiri bisnis jasa angkutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi digital Gojek.

Nadiem menegaskan pula akan tetap

ujarnya dalam konferensi pers di The Dharmawangsa, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Nadiem menegaskan setiap kebijakan yang ia rumuskan saat menjadi Mendikbud Ristek didasarkan dengan asas transparansi, keadilan, dan itikad baik. Terkait proses hukum yang tengah berjalan, ia menyatakan siap memberikan keterangan.

“Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikad baik dan mana



yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya," jelas Nadiem.

Lebih lanjut, Nadiem mengatakan ia tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

"Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk," ungkapnya.

Eks Mendikbud itu kembali menegaskan akan berkomitmen untuk bersikap

kooperatif pada proses hukum yang berlangsung. Ia berharap, dengan begitu, kepercayaan publik terhadap transformasi pendidikan terus terjaga.

"Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama," tandasnya.

Nah, bagaimana simpulan akhir para penyidik? Yang jelas hingga pekan pertama Juli 2025, belum ada penetapan tersangka dalam dugaan pemufakatan

jahat pada proyek pengadaan Chromebook ini. Baru sampai tahap cekal yang dapat bermakna pendalaman dan penyidikan masih akan berlangsung.

Ihwal pengecekan Nadiem, advokat Hotman Paris Hutapea menegaskan kliennya belum mendengar kabar usai dicekal perjalanan ke luar negeri hingga enam bulan ke depan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop



Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung.

Rp9,9 triliun. "Klien belum tahu tentang itu. Menunggu saja what next. Nadiem siap mengikuti semua aturan yang berlaku" kata Hotman, Jumat, 27 Juni 2025, saat menanggapi pengenaan cekal terhadap kliennya

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasarakan (Imipras) Agus Andrianto



mengemukakan, pencegahan terhadap Nadiem berasal dari permintaan aparat penegak hukum: Kejaksaan Agung "Kita cekal sesuai dengan permintaan dari APH," kata Menteri Agus, Sabtu, 28 Juni 2025.

Menteri Agus menegaskan pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang dicekal Imigrasi. "Nggak ada kewajiban kita untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan," tandas Menteri Imipras yang pernah menjadi Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) itu.

Toh sebelum Nadiem, tiga Staf Khusus Mendikbud Ristek di era yang sama sudah terkena cekal di awal proses pe-

realisasi Pendidikan tahun 2019-2022, khususnya pengadaan laptop dengan sistem operasi Chrome/Chromebook.

"Apartemen Kuningan Place Lt.12 B9 Jl. Kuningan Mulia Lot. 15 RT 6 RW 1 Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, kediaman saudari FH selaku Staf Khusus Menteri Dikbud Ristek," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Senin, 26 Mei 2025.

Satu apartemen lainnya tak jauh dari lokasi tadi, masih di seputaran Setiabudi, "Apartemen Ciputra World 2 Tower Orchard / 30.06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 11 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, kediaman sdr. JT selaku Staf Khusus Menteri Dikbud Ristek," sambung Harli.

dan mengintegrasikan layanan digital pemerintah.

Bagaimana kelanjutan proses hukum setelah pencekalan Nadiem dan Staf Khusus Menteri di eranya, tetap memerlukan pendalaman lagi. Terlebih Nadiem juga pernah menyatakan telah menggandeng sejumlah instansi dalam pengadaan laptop Chromebook dengan nilai proyek Rp9,9 triliun ini. Instansi tersebut yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hingga Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun).

"Kemendikbud Ristek tidak punya kewenangan untuk menentukan harga



nyelidikan kasus ini pada Selasa, 20 Mei 2025. Sehari setelah surat perintah penyidikan mengenai dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan 2019-2022 keluar kediaman dua eks staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, bernama Jurist Tan dan Fiona Handayani, digeledah.

Penggeledahan berlangsung pada Rabu, 21 Mei 2025, di dua lokasi berbeda yakni Apartemen Kuningan Place dan Apartemen Ciputra World 2, Jakarta Selatan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Digi-

Dari kediaman Fiona, penyidik menyita satu laptop dan empat telepon genggam. Sedangkan dari tempat tinggal Jurist, penyidik menyita dua hardisk eksternal, satu disk lepas, dan satu laptop. Selain itu, penyidik juga menyita 15 buku agenda.

Dua hari kemudian, giliran rumah mantan staf khusus Ibrahim Arief, yang digeledah. Dari kediaman Ibrahim di Cilandak, Jakarta Selatan, penyidik menyita telepon genggam dan laptop. Ibrahim tidak hanya menjadi staf khusus (staf-sus) Mendikbud Ristek, tetapi juga staf teknis. Saat itu, Ibrahim menjabat sebagai Chief Technology Officer GovTech Edu, sebuah lembaga yang mengelola

maupun mengkurasi daftar penyedia produk. Inilah asas transparansi dan meminimalisir konflik kepentingan menjadi prioritas utama kita di proses pengadaan ini," ungkap Nadiem dalam Konferensi Pers di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Akhirnya, proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan memang rawan. Namun penyimpangan hingga pelanggaran hukum tetap memerlukan pembuktian: alat bukti dan keterangan saksi. Jadi, masih memerlukan waktu, termasuk menegaskan kasus ini berada di ranah korupsi atau permufakatan jahat. ●

MENYERET GOOGLE INDONESIA

Pemeriksaan terus berlanjut. Tak terkecuali terhadap Google Indonesia.

Strategic Partner Manager ChromeOS, Ganis Samoedra, adalah salah satu eksekutif Google Indonesia yang sudah menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Ganis terkait pendalaman Kejaksaan Agung mengenai proses pengadaan Chromebook di Kemendikbud Ristek melalui pihak Google. Alasannya,

gan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar, Rabu, 2 Juli 2025.

Menurut dia, pada hari itu Kejagung menjadwalkan pemeriksaan tujuh saksi. Total jumlah saksi yang diperiksa hingga awal Juli 2025, kata dia, tak kurang dari 40 orang.

Harli menambahkan, pemeriksaan ini sangat penting sebab Chromebook menjadi pilihan utama dalam proyek digitalisasi pendidikan era Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. "Pemeriksaan ini karena kami ingin mengetahui bagaimana kerja sama Google dengan para vendor, siapa saja yang mereka ta-

penjelasan," lanjut Harli.

Harli menegaskan rincian hasil penyidikan masih harus menunggu hingga prosesnya selesai. "Setiap saksi memberikan keterangan masing-masing, nah yang perlu dikonfirmasi, diperjelas, dipertegas," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa keterangan dari para saksi perlu didalami untuk bisa mendapatkan kesimpulan terkait peran-peran yang dilakukan dalam kasus ini. Harli meminta untuk memberikan waktu pada penyidik untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut.

"Saya kira kita tunggu. Biarkan peny-



Chromebook merupakan produk dari Google.

Salah satu materi yang hendak penyidik dalam adalah keputusan memilih laptop Chromebook untuk pengadaan proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek.

"Bagaimana penawaran yang diberikan oleh pihak Google ini sehingga Chromebook ini bisa menjadi pilihan, bukan Windows misalnya. Tentu ini akan didalami. Makanya pihak marketing-nya akan direncanakan akan dipanggil dan diperiksa," ujar Kepala Pusat Peneran-

wari. Apakah sistem itu memang relevan dengan kebutuhan program pendidikan," tambahnya.

Tak hanya itu saja, penyidik juga akan mendalami proses penawaran teknologi, termasuk aliran komunikasi dan mekanisme kerja sama antara Google dan vendor penyedia Chromebook. "Kami melihat lah seperti apa kerja sama pihak Google dengan vendor kan ada beberapa vendor yang berkontrak. Nah, bagaimana penawaran yang dilakukan Google terhadap siapa. Saya kira penting pihak Google untuk memberikan

idik melakukan tugasnya, kita beri waktu," tandas Harli.

Yang jelas entitas bisnis dengan induk di Amerika Serikat termasuk Google Indonesia perlu berhati-hati dalam memberikan keterangan atau pendapat hukum. Soalnya, penegak hukum di Negeri Paman Sam itu dapat menjangkau perusahaan-perusahaan di luar AS.

Tercatat, Departemen Kehakiman AS pernah menuntut dua orang WNI diduga terlibat dugaan suap untuk memenangkan tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lam-

pung, pada 2003 lalu. Temuan Departemen Kehakiman AS juga mengungkap dugaan keterlibatan pimpinan PLN dan anggota DPR saat itu dalam kasus tersebut, sehingga PLN diminta pula untuk menyelidiki temuan tersebut.

Alhasil, pada Februari 2020 Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan telah mengenakan tuntutan kepada dua mantan petinggi anak perusahaan Alstom S.A., perusahaan energi dan transportasi asal Prancis, di Indonesia, Reza Moenaf dan Eko Sulianto, atas konspirasi pelanggaran Undang-Undang Praktek Korupsi di Negara Asing milik AS, atau dikenal dengan nama FCPA, dan pencucian uang.

Selain itu, penegak hukum AS juga menuntut Junji Kusunoki, mantan wakil manajer umum Departemen Proyek Energi Luar Negeri untuk Marubeni Corporation, konglomerasi dagang dan investasi asal Jepang, dengan pasal-pasal yang sama. Reza, Eko, dan Junji, dan beberapa orang lainnya, diduga menyuap sejumlah pejabat di Indonesia, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pimpinan PLN, pada 2003, ungkap Departemen Kehakiman AS.

Dugaan suap itu, lanjutnya, guna memenangkan tender pembangunan proyek PLTU Tarahan yang bernilai 118 juta dollar AS, seperti dikutip dari pernyataan resmi Departemen Kehakiman AS. Disebutkan, untuk menyembunyikan pembayaran tersebut, ketiganya diduga mempekerjakan dua konsultan untuk membayarkan suap ke sejumlah pejabat di Indonesia, meski di atas kertas perusahaan konsultan tersebut memiliki tugas untuk memberikan jasa konsultasi terkait proyek Tarahan.

Dalam pernyataannya, Departemen Kehakiman AS menguraikan sebuah surat elektronik antara Reza, Eko, dan pelaku suap lainnya pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa pejabat PLN saat itu khawatir apakah uang yang diterimanya kecil, sepantaran "uang saku", atau akan cukup besar, mengingat nilai proyek Tarahan yang akan dinikmati oleh konsorsium Alstom jika mereka menang tender. Pada akhirnya konsorsium tersebut menang tender proyek pembangunan PLTU Tarahan pada Mei 2004 dan membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan konsultasi, yang

diduga diteruskan ke pejabat-pejabat di Indonesia, kata Departemen Kehakiman AS.

Kasus lain melibatkan proyek kapas transgenik produk Monsanto Company, AS. Dalam persidangan di New York, Kamis lalu waktu setempat, Monsanto mengakui

curity Exchange Commission (SEC). Perusahaan yang berpusat di St Louis, Missouri, itu dianggap melanggar The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Dalam pernyataannya, Monsanto mengatakan bersedia membayar penalti tersebut dan juga menyetujui pen-



bahwa salah seorang stafnya telah menyuap seorang pejabat senior Indonesia. Uang suap senilai AS\$50 ribu diberikan kepada pejabat Indonesia pada 2002. Tambahan pula pemberian suap berupa rumah dan tanah kepada istri seorang pejabat senior Departemen Pertanian, serta suap senilai AS\$700 ribu untuk 140 pejabat Republik Indonesia yang lain.

Gara-gara memberi suap tersebut Monsanto dihukum membayar penalti AS\$1 juta kepada Departemen Kehakiman AS dan US\$500 ribu kepada Se-

angkatan konsultan independen selama tiga tahun ke depan untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur-prosedur perusahaan agar sesuai dengan FCPA. Monsanto menerima penuh tanggung jawab atas tindakan yang tidak layak tersebut dan kami menyesalkan orang semacam itu bisa bekerja di Monsanto, ujar Charles W. Burson, penasehat hukum Monsanto.

Bagaimana dengan Google Indonesia? Tunggu saja, proses hukumnya masih berjalan. ●

JURIST TAN MASIH DICARI

Penyidikan dugaan korupsi pengadaan perangkat berlanjut dari sisi ruang maupun waktu. Pencarian Jurist Tan bukan perkecualian.

Dari sisi waktu, penyidikan sudah berlangsung sejak 20 Mei 2025. Termasuk penggeledahan di kediaman Jurist Tan, Ibrahim Arief, dan Fiona Handayani, tiga staf khusus Nadiem Makarim, Mendikbud Ristek saat proyek chromebook berlangsung.

Sementara dari sisi ruang, penyidikan korupsi pengadaan chromebook mencakup pula pelaksanaannya di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Enen Saribanon mengemukakan, Kejaksaan Negeri Lombok Timur sedang menangani penyidikan dugaan korupsi pengadaan

rang, ada juga dari ahli," ujarnya.

Karena terpantau penyidikan terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, Enen menegaskan pihaknya tidak ada rencana untuk mengambil alih penanganan perkara, meskipun anggaran pengadaan skala nasional tersebut terbilang besar. "Sepanjang tidak ada hambatan dan masih berjalan, penanganan tetap oleh kejadi," ucap dia.

Enen menambahkan, Kejari Lombok Timur juga melaporkan secara rutin setiap perkembangan dari penanganan kasus chromebook di sana. "Jadi, setiap habis dilakukan pemeriksaan, itu dibuat lapinsus (laporan informasi khusus) ke kami, seperti itu," kata dia.



laptop Chromebook yang nilainya mencapai Rp32 miliar.

"Sedang berjalan. Sekarang sudah tahap penyidikan dan sudah dilakukan pemeriksaan saksi. Kami atensi di situ," kata Enen di Mataram, Ibu Kota NTB, Selasa, 17 Juni 2025.

Menurut dia, saksi yang sudah menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik pidana khusus Kejari Lombok Timur tercatat 38 orang. "Ada yang dari kalangan pemerintah, dari pemprov (pemerintah provinsi) juga ada. Ada dari penyedia ba-

Sedangkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Timur Ida Bagus Putu Swadharma Diputra sebelumnya menyampaikan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini baru berjalan di tahap penyidikan awal guna menelusuri indikasi perbuatan melawan hukum (PMH). Ida Bagus mengatakan pada tahap awal penyidikan ini pihaknya belum menyinggung persoalan kerugian negara, melainkan fokus masih kepada pemeriksaan saksi untuk menelusuri PMH.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan secara maraton, mulai dari pejabat Disdikbud Lombok Timur, penyedia barang, hingga pihak penerima dari kalangan sekolah dasar. Selain saksi, pemeriksaan juga mengarah pada objek perkara, yakni laptop Chromebook yang tersebar di puluhan sekolah.

Penanganan kasus dari pengadaan peralatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) pada Dinas Dikbud Lombok Timur tahun anggaran 2022 tersebut masuk penyidikan jaksa terhitung sejak 30 April 2025, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/N.2.12/Fd.2/04/2025. Realisasi proyek pengadaan barang ini bersumber dari dana alokasi khusus. Dugaan korupsi mengarah pada spesifikasi barang dan pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022.

Sedangkan penyidikan di Kejaksaan Agung berlanjut dengan upaya menghadirkan Staf Khusus Mendikbud Ristek Jurist Tan. Tercatat setidaknya sudah empat kali perempuan yang menjadi Staf Khusus Menteri saat Nadiem menjabat ini tidak memenuhi panggilan penyidik karena sudah berada di luar negeri

"Kalau tidak salah tidak berada di Indonesia sehingga ada perbedaan yurisdiksi, daerah, wilayah, negara. Maka tentu membutuhkan koordinasi yang ini sekarang sedang dibicarakan oleh penyidik," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, Rabu, 18 Juni 2025.

Harli menjelaskan Jurist Tan melalui kuasa hukumnya mengaku tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena ada kegiatan pribadi. Jurist, kata dia, kemudian mengajukan agar pemeriksaan secara daring. Selain itu, Jurist juga menyerahkan keterangan tertulis di luar dari permintaan penyidik dengan harapan agar diperiksa secara daring. Akan tetapi, Harli menyebut hal itu tidak bisa dipenuhi penyidik lantaran dibutuhkan kehadiran secara langsung.

"Penyidik sesungguhnya mengharapkan bahwa yang bersangkutan ini hadir secara fisik langsung," ujarnya. Menurut Harli, penyidik tidak menyang-

gupinya karena harus diperiksa secara langsung.

Alhasil hingga Juli 2025, Jurist tetap mangkir. Sebelumnya, pemeriksaan Jurist sudah terjadwal pada Selasa, 1 Juli 2025. "Nggak datang," kata Kapuspenkum.

Harli juga mengemukakan penyidik tidak bisa menghubungi Jurist Tan secara langsung. Sedangkan komunikasi

memilih sistem operasi Windows atau Chromebook dalam proyek pengadaan. Implikasinya, kata Iskandar, Jurist dapat menjadi semacam bumper atau pelindung Nadiem dari jerat hukum.

Berdasarkan data Kejagung, Iskandar mencatat peran Jurist dalam mengubah hasil kajian teknis yang semula menolak Chromebook pada April 2020, serta memimpin rapat 9 Mei 2020 yang mem-



hanya dilakukan melalui kuasa hukumnya. Ia menegaskan bahwa penyidik Kejaksaan masih menempuh pendekatan persuasif agar Jurist Tan memenuhi panggilan.

Di mata pegiat Iskandar Sitorus yang juga Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Jurist Tan Jurist bukan sekadar admin, melainkan berperan penting dalam pengambilan putusan

balikkan keputusan hanya dalam 30 hari dan menyusun argumen teknis yang menguntungkan vendor Chrome OS.

Jurist Tan pun dikabarkan pernah menjadi salah satu pengelola Gojek di masa-masa awal. Perempuan ini meraih gelar Magister Administrasi Publik dalam Pembangunan Internasional (MPA/ID) dari Yale University, Amerika Serikat.

Dalam perkara dugaan korupsi lap-

• INFO UTAMA

top Chromebook, Jurist Tan diduga terlibat bersama dengan eks stafsus lainnya, Fiona Handayani. Rumah keduanya pun telah digeledah oleh penyidik Jampidsus pada 21 Mei lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Harli Siregar memastikan penggeledahan rumah keduanya karena mereka memiliki peran dalam perkara ini.

“Kita tidak tahu apakah ketegaran (Nadiem) itu ada kaitannya dengan keberadaan tangan kanannya, Jurist Tan, otak teknis proyek yang sampai harus bersembunyi di balik dalih mengajar di luar negeri, sementara Kejaksaan Agung terus mengepung,” kata Iskandar Sitorus, Minggu, 6 Juli 2025

jemput paksa.

Mangkirnya Jurist dari panggilan Kejaksaan adalah alarm bahwa, dia tahu titik krusial permufakatan teknis yang mengubah proyek. “Rapat tanggal 9 Mei 2020 diduga jadi ruang gelap perubahan spesifikasi. Semoga ada 28 hingga 40 saksi yang telah diperiksa, ada keterangan yang menguatkan. Banyak staf-sus Nadiem lain memenuhi panggilan penegak hukum, tapi kenapa hanya Jurist yang lari?” ungkapnya.

Iskandar menduga, pengakuan Jurist yang paling membahayakan terhadap semua calon tersangka individu dan korporasi. Dengan alasan itu, kata Iskandar, Jurist Tan kabur ke luar negeri. Kasus ini

kan hanya uang, tapi juga kebenaran,” tegas Iskandar.

Pangkal soalnya, Kemendikbud Ristek pada 2020 menyusun rencana pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk satuan pendidikan dasar hingga menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Namun, hasil uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook oleh Pustekkom pada 2018–2019 menemukan berbagai kendala, termasuk ketergantungan pada jaringan internet yang stabil, sementara infrastruktur internet belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kajian awal dalam dokumen Buku



Menurut Iskandar, Jurist kini tercatat memainkan sandiwara mangkir empat kali panggilan Kejaksaan. “Penyidik Jampidsus sudah memanggil Jurist tiga kali yakni tanggal 3, 11, 17 Juni 2025. Yang bersangkutan ada permintaan pemeriksaan daring, namun ditolak karena penyidik ingin konfrontasi langsung,” ujar Iskandar.

Bagi Iskandar, alasan sedang berada di luar negeri, hanya taktik mengulur waktu. Namun ia melihat Kejaksaan tetap memantau pergerakannya sampai siap menggunakan jalur kedutaan hingga

menguji ketegasan dan kredibilitas Kejaksaan. Maka jika Jurist terus menghindar, eksekusi melalui Interpol atau pencabutan paspor bisa dilakukan.

Ia menjelaskan, kehadiran Jurist adalah kunci pembuka untuk mengungkap dokumen teknis yang diatur untuk kepentingan vendor tertentu, termasuk alur kebijakan janggal dari tidak direkomendasikan pada bulan April 2020 menjadi disetujui pada bulan Mei 2020. “Ada potensi permufakatan jahat di balik anggaran Rp9,98 triliun ini. Dalam skandal korupsi, yang kabur bu-

Putih awalnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows. Namun, rekomendasi tersebut kemudian berubah menjadi Chrome OS/Chromebook. Tim teknis diduga diarahkan untuk menyusun kajian teknis yang mengunggulkan Chromebook secara tidak objektif.

Nilai proyek ini mencapai Rp9,98 triliun, yang terdiri dari anggaran pengadaan bantuan TIK sebesar Rp3,58 triliun pada 2020–2022 serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6,39 triliun. Saat ini, penyidik Jampidsus

masih berkoordinasi dengan ahli audit guna menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.

Sedangkan Indonesia Audit Watch termasuk pihak yang melaporkan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud Ristek ini. Beberapa poinnya antara lain

proyek pengadaan 2020-2022: Nilai kontrak Rp17,42 triliun untuk 2,4 juta unit Chromebook. Sedangkan tujuan proyeknya adalah pembelajaran jarak jauh selama pandemi dengan sumber anggaran APBN Kemendikbud Ristek Rp3,58 T dan Dana Alokasi Khusus

Nah, sementara Jurist Tan belum datang, Kejaksaan Agung pun dijadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Nadiem Makarim sebagai saksi pada Selasa, 8 Juli 2025. Namun, tim kuasa hukum bekas Mendikbud Ristek ini, Hana Pertiwi, mengatakan sudah meminta penundaan pemeriksaan kliennya sebagai saksi di Kejaksaan Agung (Kejagung). "Sudah mohon penundaan," ujarnya.

Sedangkan kuasa hukum Nadiem Makarim lainnya, Hotman Paris Hutapea, mengatakan pemeriksaan kliennya ditunda satu pekan. "Tunda satu minggu," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan

mendikbud Ristek pada tahun 2019-2022.

"Bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran Rp9,9 triliun ini dalam proyek pengadaan Chromebook ini," kata Harli.

Selain itu, lanjut dia, penyidik juga mendalami terkait adanya perubahan hasil kajian teknis. Harli mengemukakan, sejatinya pada 6 Mei 2020, telah dilaksanakan rapat kajian teknis pada Kemendikbud Ristek terkait penggunaan sistem operasi Windows dalam pengadaan bantuan peralatan TIK bagi siswa. Akan tetapi, pada sekitar bulan Juni-Juli 2020, kajian tersebut diubah



(DAK) Pendidikan Rp6,39 T

Tercatat pula beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam proyek pengadaan laptop chromebook. Pada 2020 ada 47,3 perangkat tidak memenuhi spesifikasi teknis pada LHP BPK No. 09/LHP/XXI/12/2020. Pada tahun berikutnya, 2021, terdapat keterlambatan distribusi ke 72 persen daerah 3T di LHP BPK No. 15/LHP/III/2021. Selanjutnya pada 2022 diduga potensi markup biaya lisensi CEU (Rp500.000 vs harga pasar Rp300.000) pada LHP BPK No. 22/LHP/VIII/2022.

Harli Siregar mengatakan bahwa hingga pukul 13.31 WIB, Selasa, 8 Juli 2025, Nadiem belum memenuhi panggilan penyidik. "Belum datang," katanya.

Soal permintaan penundaan pemeriksaan dari tim kuasa hukum Nadiem Makarim, Kapuspenkum mengatakan bahwa hal tersebut masih ditanyakan kepada penyidik.

Sebelumnya, Nadiem telah diperiksa pada Senin, 23 Juni 2025. Menurut Kapuspenkum Harli pemeriksaan itu mengajukan 31 pertanyaan pokok terkait pengadaan laptop Chromebook di Ke-

dan dinyatakan digunakan sistem operasi Chromebook.

Oleh sebab itu penyidik mendalami pengetahuan Nadiem terkait perubahan kajian ini. "Nanti siapa yang berperan terkait ini sehingga ada perubahan antara kajian awal dengan review terhadap kajian itu sehingga Chromebook dipilih menjadi sistem dalam pengadaan ini, ini yang akan didalami oleh penyidik," katanya.

Soal perubahan itu, sebagaimana kata Iskandar Sitorus, kelak Jurist Tan lagi yang akan menjadi kunci. ●

MUTASI DAN ROTASI BUKAN INTERUPS

Di tengah proses penyidikan proyek pengadaan laptop dengan sistem operasi Chromebook, berlangsung pula mutasi (alih tugas) dan rotasi (alih lokasi) para pejabat Kejaksaan Agung. Yang jelas, bukan interupsi: memotong atau membuat jeda proses hukum.

Lagi pula, bukan hanya urusan pengadaan laptop Chromebook yang sedang dalam penyidikan Kejaksaan Agung. Sedangkan pejabat yang menjalani mutasi dan rotasi pun tak hanya yang bertugas di bidang penyidikan. Tak urung Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar AF dan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Mutasi dan rotasi kali ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2025, tertanggal 4 Juli 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural PNS Kejaksaan RI. Po-

sisi Dirdik Jampidsus beralih dari Abdul Qohar kepada Nurcahyo Jungkung Madyo yang sebelumnya menjabat Asisten Khusus Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung. Sedangkan Qohar beralih menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Akan halnya Kapuspenkum Harli Siregar, posisinya beralih ke Anang Supriatna yang menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sedangkan jabatan Harli beralih dari Kapuspenkum menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Tercatat, 81 orang pejabat Kejaksaan yang mengalami rotasi dan mutasi di jajaran Kejagung RI di jajaran Direktur dan Kepala Pusat. Berikut daftar yang sudah beredar di berbagai media:

Jaksa Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Posisinya sebagai Direktur D digantikan oleh Sugeng Riyanta yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.

Kemudian Jaksa Supardi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur III

pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda. Sedangkan Jaksa Jehezkiel Devy Sudarso yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Posisinya digantikan Andi Darmawangsa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju.

Selain itu, Jaksa Wahyudi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram. Posisinya digantikan I Gde Nguurah Sriada yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung. Selanjutnya, Jaksa Setiawan Budi Cahyono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya diangkat menjadi Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung di Ja-



karta.

Berikutnya, Jaksa Muhammad Syarifuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari diangkat menjadi Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta. Termasuk dalam mutasi dan rotasi, Jaksa Basuki Sukardjono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari. Posisinya digantikan Subeno yang sebelumnya menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak.

Jaksa Sugeng Hariadi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang diangkat menjadi Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung di Jakarta. Kemudian Jaksa Yudi Indra Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat menjadi Direktur C pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung di Jakarta. Posisinya digantikan RD Mohammad Teguh Darmawan yang sebelumnya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.

Lanjut dengan Jaksa Sila Haholongan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Posisinya digantikan Rudy Irmawan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan. Berikutnya Jaksa Muhibuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh diangkat menjadi Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta.

Nah, Jaksa Abd Qohar AF yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang

Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari. Posisinya digantikan Nurcahyo Jungkung Madyo yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Khusus Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung di Jakarta. Kemudian Jaksa Sufari yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang diangkat men-

Tinggi Sumatera Utara di Medan.

Selanjutnya, Jaksa Pipuk Firman Priyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang diangkat menjadi Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung di Jakarta. Lanjut dengan Jaksa Rini Hartatie yang sebelumnya menjabat



jadi Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung di Jakarta.

Tambahan pula, empat orang Jaksa diangkat menjadi Kepala Pusat. Jaksa Anang Supriatna yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) pada Kejaksaan Agung di Jakarta. Anang Supriatna menggantikan Harli Siregar yang kini diangkat menjadi Kepala Kejaksaan

sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru diangkat menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta. Juga Jaksa Teuku Rahman yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar diangkat menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung di Jakarta. •

SAATNYA BENAHI SISTEM PEMILU

Setelah dua kali pemilu serentak lima kotak yang sarat masalah, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah memberikan sinyal tegas: model pemilu ini menciptakan kerumitan yang menurunkan kualitas demokrasi.

Namun, keputusan MK hanya akan jadi arsip mati jika pemerintah tidak berani memimpin revisi Undang-Undang Pemilu secara serius. Kini, saatnya pemerintah membuktikan komitmen



**DIREKTUR EKSEKUTIF ALGORITMA
RESEARCH AND CONSULTING
DOSEN ILMU POLITIK FISIP
UNIVERSITAS INDONESIA**

men untuk membenahi sistem pemilu demi demokrasi yang lebih sehat, bukan sekadar mempertahankan kenyamanan elite politik.

Putusan MK yang baru disahkan menyebut format pemilu serentak lima kotak -memilih presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam satu hari- telah menimbulkan kebingungan pemilih, beban kerja

berlebih bagi penyelenggara, dan melemahkan pelembagaan partai politik.

Pengalaman Pemilu 2019 dan 2024 menegaskan itu: angka suara tidak sah yang tinggi, kelelahan petugas, hingga terganggunya proses kaderisasi partai karena padatnya kontestasi di semua tingkatan secara serentak.

Sayangnya, peluang putusan MK ini untuk mendorong perubahan nyata melalui revisi UU Pemilu sangat bergantung pada keberanian politik pemerintah dan kesungguhan DPR. Sejarah membuktikan, tak sedikit putusan MK, termasuk soal pemilu, hanya menjadi catatan hukum yang tak kunjung diimplementasikan oleh pembentuk undang-undang.

Kondisi faktual

Fakta menunjukkan bahwa Pemilu 2019 mencatat suara tidak sah yang di banyak daerah melebihi 10 persen. Pemilu 2024 pun tak jauh berbeda. Banyak pemilih kebingungan mengisi lima surat suara berbeda dalam waktu terbatas.

Penyelenggara pemilu, di pusat maupun daerah, kewalahan mengantisipasi kerumitan logistik, distribusi, dan penghitungan. Masalah ini bukan sekadar teknis atau administratif, melainkan mencerminkan desain pemilu yang tidak ramah bagi pemilih dan penyelenggara.

Pendukung status quo kerap membela pemilu serentak lima kotak dengan alasan efisiensi: satu kali pemilu, satu kali logistik, satu kali biaya. Namun, efisiensi seperti ini hanya ilusi jika menurunkan kualitas hasil pemilu dan merusak representasi politik. Apalagi di balik argumen efisiensi, ada kepentingan elite yang diuntungkan oleh efek ekor jas pilpres untuk mendulang kursi di DPR/DPRD.

Tak bisa dimungkiri, partai-partai besar cenderung nyaman dengan format ini. Mereka telah menyesuaikan strategi kemenangan secara nasional dan lokal dalam satu paket. Pemilu serentak lima kotak memudahkan partai besar memanfaatkan popularitas kandidat presidennya untuk mendongkrak suara legislatif.

Namun, model ini justru menyulitkan kaderisasi partai, memaksa partai menyiapkan calon anggota legislatif di tiga level hanya dalam waktu singkat sehingga lebih memilih calon yang populer atau berduit, bukan kader berkualitas.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanggung risiko teknis luar biasa. Petugas di lapangan kelelahan, seperti terbukti secara tragis pada Pemilu 2019, dan hal serupa nyaris terulang di Pemilu 2024.

Desain pemilu yang membebani penyelenggara bukan hanya masalah prosedural, melainkan juga persoalan keadilan demokrasi agar semua pihak merasa tetap nyaman dalam beraktivitas kepemiluan.

Putusan MK kali ini menawarkan solusi masuk akal: memisahkan pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (kepala daerah dan DPRD), dengan jeda dua tahun. Model ini akan memberikan ruang bagi partai melakukan kaderisasi lebih serius karena tak perlu menyiapkan calon anggota legislatif

dan calon kepala daerah secara bersamaan.

Pemilih juga bisa lebih fokus memahami calon sesuai dengan tingkatan pemilu, bukan dipaksa memilih banyak posisi dalam satu hari. Penyelenggara pemilu pun bisa membagi beban kerja lebih wajar, meminimalkan risiko kesalahan yang berujung pada sengketa.

Selain itu, pemilu terpisah membantu sinkronisasi siklus politik dengan siklus perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pemilu yang menempatkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dua tahun setelah pemilu nasional akan menciptakan jeda waktu yang cukup bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan program kerja mereka sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah.

Pemerintah juga tak perlu khawatir perubahan ini akan mengganggu stabilitas politik. Justru pemilu yang lebih sederhana dan terpisah akan mengurangi polarisasi berkepanjangan.

Pemilu serentak lima kotak selama ini menimbulkan suhu politik tinggi di tingkat nasional yang langsung merembet ke daerah. Dengan pemilu nasional dan daerah yang berjarak dua tahun, ada ruang pendinginan suasana politik sebelum masyarakat kembali menghadapi kontestasi daerah berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Yang juga penting, revisi UU Pemilu mendesak agar kepastian hukum bisa dijaga. Tanpa perubahan sesuai putusan MK, kita akan menghadapi kebingungan dalam menyiapkan



Ini akan mencegah tumpang tindih kebijakan akibat perubahan kepemimpinan yang tidak sinkron.

Menunggu inisiator

Pertanyaannya, apakah pemerintah akan serius menindaklanjuti putusan MK ini? Di satu sisi, Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029 memiliki peluang besar untuk mencatat sejarah dengan memperbaiki kualitas demokrasi lewat reformasi UU Pemilu.

Namun, realitas politik menunjukkan tantangan berat. Mayoritas partai di DPR cenderung menghindari perubahan mendasar pada format pemilu yang selama ini mereka nikmati keuntungannya. Revisi UU Pemilu sangat rentan dipolitisasi atau hanya dijadikan alat tawar-menawar elite. Karena itu, inisiatif harus datang dari pemerintah.

Presiden Prabowo dan kabinet mendarat tak cukup hanya "menghormati" putusan MK, tetapi juga harus berinisiatif mengajukan draf revisi UU Pemilu yang mengacu pada rekomendasi MK. Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya: melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, organisasi keagamaan, dan unsur masyarakat lain agar revisi UU Pemilu tak hanya jadi produk kompromi elite di Senayan.

Pemilu 2029 dan pilkada berikutnya. Kekosongan hukum ini bisa membuka ruang sengketa yang merugikan semua pihak.

Pengalaman negara lain membuktikan perubahan sistem pemilu idealnya dilakukan dengan evaluasi berbasis kegagalan sistemik, bukan sekadar konsensus elite. Italia, misalnya, mengubah sistem pemilunya setelah kegagalan sistem proporsional memecah partai politik secara ekstrem. Selandia Baru melibatkan komisi independen untuk mendesain sistem pemilu dan menyerahkannya ke referendum publik.

Kita bisa mengambil pelajaran dari mereka untuk menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada kualitas demokrasi, bukan kepentingan segelintir elite.

Tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Namun, dua kali pengalaman pemilu serentak lima kotak di Indonesia cukup membuktikan bahwa kita butuh koreksi. Putusan MK sudah memberikan pijakan hukum yang kokoh; tinggal komitmen politik pemerintah dan kesungguhan DPR yang akan menentukan apakah kita benar-benar ingin membenahi demokrasi atau hanya membiarkan putusan MK jadi arsip yang terlupakan.

Pemerintah harus membuktikan keberpihakan kepada rakyat, bukan pada kenyamanan elite politik semata. Jika momentum ini dilewatkan, bukan tidak mungkin kita akan mengulangi masalah lama di Pemilu 2029 dan seterusnya. •



OPTIMISTIS CETAK SAWAH 48 RIBU HEKTARE

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru optimistis program konstruksi cetak sawah tahun 2025 akan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Keyakinan ini disampaikannya saat menghadiri penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel.

Menurut Herman Deru, kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi mengimpor beras menjadi peluang besar bagi daerah seperti Sumsel untuk menjadi lumbung pangan. Ia meyakini bahwa melalui program cetak sawah, hasil gabah kering panen bisa meningkat hingga dua kali lipat.

"Jika hasil panen bisa dua kali dari luas baku sawah yang dicetak, maka Sumsel bisa menyumbang lebih banyak untuk ketahanan pangan nasional. Ini bukan sesuatu yang muluk-muluk," ujarnya.

Pada tahun 2025, program cetak sawah di Sumsel ditargetkan mencakup luas 48.000 hektare. Program ini melibatkan sembilan kabupaten, yaitu Kabupaten PALI (3.200 hektar), Empat Lawang (236 ha), Muratara (600 ha), Musi Banyuasin (9.400 ha), Ogan Komering Ilir (11.400 ha), OKU Timur (10.600 ha),

Ogan Ilir (10.600 ha), Muara Enim (1.764 ha), dan Kabupaten Musi Rawas (200 ha).

Herman Deru menyebut, lahan seluas 1.800 hektar sudah siap digarap dan ditandatangani bersama mitra pelaksana, yaitu jajaran TNI.

"Dengan bertambahnya luas baku sawah (LBS), produksi gabah kering giling juga akan meningkat. Bukan hanya karena luasnya bertambah, tapi juga karena bisa panen dua kali," jelasnya.

Diperkirakan dari 48.000 hektare lahan, akan dihasilkan sekitar 300 ribu ton gabah kering giling jika panen dilakukan satu kali. Namun angka ini bisa meningkat menjadi 600 ribu ton jika panen dapat dilakukan dua kali dalam setahun.

Ia menekankan pentingnya keberlanjutan proyek ini agar tidak sekadar menjadi hamparan sawah yang tidak produktif.

"Menggarap cetak sawah bukan hal yang mudah. Ini harus menjadi lahan yang produktif dan berkesinambungan," tegasnya.

Gubernur juga menilai proyek cetak sawah ini merupakan proyek nasional strategis yang perlu dukungan penuh dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Ia mengajak seluruh stakeholder bergerak cepat agar program berjalan maksimal.

"Proyek ini menyangkut kepentingan nasional dan masyarakat Sumsel. Jadi, secara administrasi harus dipercepat dan semua pihak harus terbuka serta proaktif," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, mulai dari Pangdam II/Sriwijaya hingga Babinsa, atas peran aktif mereka dalam pelaksanaan cetak sawah di Sumsel. "Saya sangat berterima kasih

karena mereka terlibat langsung, baik secara fisik maupun pemikiran,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, Bambang Pranowo, melaporkan bahwa dari alokasi 48.000 hektar, sekitar 23.800 hektar masih menunggu kontrak dan telah direlokasi oleh pemerintah pusat.

Bambang juga menjelaskan kriteria lokasi cetak sawah, antara lain kawasan dengan luas lebih dari 50 hektar dalam satu tata kelola air, memiliki status kepemilikan tanah yang jelas, bukan kawasan hutan atau lahan sengketa, serta berada di wilayah budidaya sesuai tata ruang.

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto bersama perwakilan Dinas Pertanian dari Kabupaten Muara Enim, OKU Timur, Musi Rawas, dan PALI. Acara tersebut juga dihadiri Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis dan Staf Ahli Kementerian Pertanian Suwandi.

Komitmen Dukong Ketahanan Pangan

Provinsi Sumsel sendiri mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk program cetak sawah dan ketahanan pangan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI, Dr Andi Nur Alam menegaskan, Dirjen PSP Kementan RI menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan program cetak sawah di Sumsel.

“Hari ini kita tunjukkan komitmen. Tanpa itu, program tidak akan berjalan. Mulai hari ini, tim harus langsung bergerak,” tegasnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Kegiatan Cetak Sawah Tahun 2025 di Ruang Rapat Bina Praja,

la juga meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumsel agar tim di lapangan dapat bekerja leluasa sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Dirjen Andi Nur Alam mengungkapkan bahwa tim tambahan dari Kalimantan Tengah akan segera bergabung untuk membantu proses identifikasi data.

“Tolong beri ruang kepada mereka

untuk mengumpulkan data. Targetnya, Senin sudah ada keputusan,” ujarnya.

Data tersebut akan digunakan untuk pengecekan spasial dan desain yang telah disiapkan.

“Dalam dua minggu, kita targetkan 5.000 hektare rampung. Setelah itu, kita lanjutkan ke 31.600 hektare berikutnya,” tambahnya.

Untuk pengelolaan lahan pertanian seluas 48.000 hektare, ia menyarankan penggunaan E-Katalog.

“Kalau mau aman, gunakan E-Kata-

“Target ini bukan semata karena kondisi alam yang mendukung, tetapi juga hasil penilaian Kementerian Pertanian terhadap kesiapan jajaran pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.

la menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak. Terlebih, dengan dihentikannya impor beras oleh pemerintah, daerah penyangga seperti Sumsel memiliki peran strategis.

“Saat saya dilantik pada 2018, Sum-



log, bukan swakelola. Swakelola cocok untuk daerah kecil, tapi untuk skala besar seperti ini, E-Katalog jauh lebih efektif dan cepat,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru menegaskan komitmen kuat Pemprov Sumsel dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Saat ini, Sumsel menempati posisi kedua secara nasional dalam proyek cetak sawah skala besar, setelah Kalimantan Tengah.

sel berada di posisi kedelapan sebagai penyumbang pangan nasional. Berkat kerja sama melalui program SERASI, kita kini masuk lima besar nasional,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan bahwa capaian ini merupakan prestasi kolektif.

“Ini prestasi kita bersama. Yang terpenting adalah terjaganya semangat petani dalam menjaga produktivitas besar,” katanya. ● Adv

MENGENALKAN BUDAYA DAERAH LEWAT FESTIVAL SENI TRADISI 2025

Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kembali bergeliat. Selama dua hari, 5–6 Juli 2025, lokasi tersebut disulap menjadi panggung ekspresi budaya lewat perhelatan Festival Seni Tradisi Sumsel 2025 yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi apik antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumsel. Festival menghadirkan ragam seni tradisi, pertunjukan budaya, hingga produk UMKM unggulan dari 17 kabupaten/kota.

Wagub Sumsel, Cik Ujang menegaskan

Wagub menambahkan bahwa peran masyarakat perantau sangat strategis dalam menjaga eksistensi budaya. Mereka bisa menjadi duta yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumsel di berbagai penjuru Indonesia.

Menurutnya, memperkenalkan budaya tidak harus lewat acara besar. “Dengan membawa kuliner khas atau memperkenalkan pakaian adat di aca-

perantau mengenal lebih dalam tentang Sumsel. Karena itu, 17 kabupaten/kota kita libatkan penuh dalam festival ini,” jelasnya.

Ketua Dekranasda Sumsel, Hj. Febrita Lustia HD, menyampaikan bahwa Anjungan Sumsel harus menjadi rumah budaya aktif yang bisa diakses siapa saja. Ia juga mengusulkan agar kabupaten/kota bergiliran membuat



kan pentingnya pelestarian budaya sebagai bagian dari jati diri daerah. Ia mengajak seluruh warga Sumsel, termasuk perantau, untuk menjadikan budaya sebagai nafas kehidupan.

“Anjungan Sumsel ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol kerinduan dan identitas. Mari kita isi dengan kegiatan yang menghidupkan memori akan kampung halaman,” ucapnya penuh semangat.

ra lokal saja, itu sudah bentuk cinta terhadap warisan leluhur,” ujar Cik Ujang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Panji Cahyanto, menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, melainkan ruang edukasi budaya yang hidup. Ia menekankan pentingnya menjadikan Anjungan Sumsel sebagai panggung budaya berkelanjutan.

“Kami ingin masyarakat Jakarta dan

acara tematik di tempat tersebut.

“Bisa saja satu bulan Lahat, bulan berikutnya OKU Timur. Kita hidupkan anjungan ini dengan cara kolaboratif,” ujar Febby.

Festival ini menjadi ruang temu antara budaya, kreativitas, dan ekonomi. Produk-produk kerajinan lokal serta kuliner khas menjadi daya tarik yang mampu memperkenalkan kekayaan Sumsel secara holistik.

Festival Seni Tradisi Sumsel 2025 tidak hanya menjadi pesta budaya, tetapi juga momentum refleksi untuk merawat warisan leluhur dalam balutan zaman yang terus bergerak.

Sinergi Budaya dan Ekonomi Kreatif

Gelaran Festival Seni Tradisi Sumsel tahun 2025 ditutup secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Drs H. Edward Candra MH, di Anjungan Sumsel, TMII, Jakarta.

Selama dua hari, para pengunjung disuguhkan pertunjukan seni dari empat kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim, dan Musi Rawas. Penampilan seni tari, musik etnik, hingga kuliner lokal menjadi daya tarik utama festival ini.

Edward Candra dalam menyampaikan bahwa kolaborasi antara budaya dan ekonomi kreatif adalah salah satu jalan strategis dalam meningkatkan daya saing Sumsel di tingkat nasional bahkan global.

"Festival ini membuktikan bahwa seni dan budaya bukan hanya milik masa lalu, melainkan potensi ekonomi masa depan. Saya berharap regenerasi budaya terus terjadi dan memberi dampak ekonomi yang luas," ungkapnya.

Ia menyebutkan pentingnya sinergi antara pelaku budaya, pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan stakeholder nasional dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif di Sumsel.

Festival ini juga menghadirkan talk show bertema pelestarian aksara ulu dan pengembangan ekonomi kreatif yang diikuti antusias oleh pengunjung. Talk show tersebut menghadirkan narasumber dari komunitas pecinta aksara ulu dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel dalam laporannya menyatakan bahwa pendekatan lintas sektor seperti ini perlu diperluas ke daerah lain di Sumsel agar manfaatnya lebih inklusif.

"Tak hanya pertunjukan, penguatan narasi budaya juga perlu didukung literasi dan kebijakan publik. Maka acara ini menjadi titik awal menuju pendekatan komprehensif antara budaya dan pembangunan daerah," jelasnya.



Ia menambahkan bahwa pelibatan generasi muda dalam kegiatan ini merupakan bentuk regenerasi pelestari budaya yang sangat penting.

"Anak-anak muda harus jadi pelaku utama, bukan hanya penonton budaya mereka sendiri."

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Dekranasda Sumsel Hj. Febrita Lustia HD, Ketua Dharma Wanita Persatuan

Desi Edward Candra, serta jajaran OPD Provinsi Sumsel.

Festival ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang tahunan, tetapi juga ruang inkubasi gagasan dan inovasi bagi pelaku seni, budaya, dan UMKM di Sumsel.

"Mari kita bangun Sumsel berkelanjutan dengan semangat budaya dan ekonomi kreatif," tutur Edward. •Adv

PELOPOR KETAHANAN PANGAN, GSMP TERUS BERKEMBANG DAN DITIRU

Sumatera Selatan semakin meneguhkan diri sebagai pelopor dalam gerakan kemandirian pangan di Indonesia. Hal ini ditegaskan melalui peluncuran dua inovasi baru Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yakni GSMP Menyala dan GSMP Goes to Panti Sosial, oleh Gubernur H. Herman Deru di Panti Sosial ODGJ Sako.

Herman Deru mengisahkan kembali asal muasal lahirnya GSMP, yakni pada akhir tahun 2021 di masa sulit pandemi. Saat itu, tingginya inflasi dan sulitnya distribusi bahan pokok menjadi tantangan besar. Dari situ, ide GSMP lahir untuk mengajak masyarakat menciptakan ketersediaan pangan mandiri.

"GSMP ini bukan program biasa. Ia adalah respons dari kondisi krisis. Kita ubah masyarakat dari hanya sebagai pembeli menjadi penghasil," ujar Deru dengan penuh semangat.

Ia menegaskan, GSMP telah mengalami banyak perkembangan dan mendapat pengakuan nasional. Bah-

kan, tak sedikit daerah lain yang mulai meniru dan mengadaptasi GSMP dalam bentuk program serupa.

"Saya melihat, GSMP sudah menjadi trend. Beberapa provinsi bahkan mulai mengubah namanya, tapi rohnya tetap GSMP dari Sumsel," katanya.

Dalam peluncuran kali ini, GSMP Menyala akan menjangkau kelompok dasawisma dan kelompok tani dengan sasaran 1.500 rumah tangga di 17 kabupaten/kota. Sedangkan GSMP Pansos akan diterapkan di panti sosial, fokus pada budidaya ikan, sayuran, dan pengolahan pakan.

Bagi Herman Deru, program ini tidak hanya soal pangan, tapi juga

soal kolaborasi. Oleh karena itu, ia mengajak pihak swasta dan lembaga mitra seperti BI dan Pertamina untuk aktif berkontribusi dalam kegiatan produktif masyarakat.

"Kalau CSR-nya diarahkan ke kegiatan produktif, hasilnya jauh lebih terasa. Ini yang harus kita dorong terus-menerus," kata Deru.

Ia menekankan bahwa GSMP bukan sekadar proyek seremonial, tetapi program aksi yang konkret. "Yang kita lakukan ini bukan untuk dipuji, tapi untuk dipakai. Ini soal kebutuhan hidup," ujarnya.

Menurutnya, GSMP juga berperan penting dalam menekan stunting dan meningkatkan gizi keluarga. "Se-



makin banyak keluarga menanam sendiri, makin sehat pula pola makan mereka," tambahnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumsel, Ir. Ruzuan Efendi, menyebutkan bahwa kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci sukses program ini.

"Kita ingin GSMP jadi gerakan bersama, lintas instansi, dan lintas profesi," jelasnya.

Ruzuan menambahkan, pengembangan GSMP di panti sosial juga bertujuan membangun semangat produktivitas di kalangan masyarakat rentan, seperti ODGJ dan kelompok marjinal lainnya.

Wujud Nyata Sinergi Ketahanan Pangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mendukung penuh pelaksanaan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 yang diinisiasi Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel sebagai upaya menjaga ketahanan pangan. Kegiatan ini berlangsung di lahan perhutanan sosial Desa Muara Baru, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir.

Penanaman ini merupakan bagian dari upaya bersama berbagai pihak dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional. Selain dihadiri oleh Sekda Sumsel, kegiatan ini juga diikuti Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. M. Zulkarnain, para petani, kelompok tani, dan stakeholder dari pemerintah daerah maupun pusat.

Sekda Edward Candra menyebut kegiatan tanam jagung ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara petani, pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta jajaran kepolisian, khususnya Polda Sumsel dan Polres Ogan Ilir.

Menurutnya, Sumsel memiliki potensi besar dalam pengembangan jagung sebagai komoditas unggulan tanaman pangan.

Edward menjelaskan, Sumsel menempati posisi ke-10 nasional sebagai provinsi penghasil jagung terbesar dengan produksi pada tahun 2024 mencapai 833.952 ton pipilan kering (PK), meningkat 0,86 persen dari tahun sebelumnya. Perkiraan hingga

Juli 2025 pun menunjukkan produksi mencapai 177.311 ton PK dari luas panen 20.545 hektar.

"Langkah perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan yang tidak digunakan untuk padi, seperti lahan perkebunan rakyat maupun swasta, menjadi strategi penting dalam mendorong produksi jagung di Sumsel," katanya.

Ia menyebut tiga kabupaten dengan luasan pertanaman jagung terbesar di Sumsel yakni OKU Selatan, OKU Timur, dan Banyuasin. Adapun

memperluas tanam dan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga mendorong sistem tanam monokultur maupun tumpangsari di lahan-lahan non-eksisting.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. M. Zulkarnain mengungkapkan bahwa lahan yang digunakan untuk tanam jagung kali ini merupakan wilayah yang kerap mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui pemberdayaan lahan ini, pihaknya berharap ada solusi konkret dan manfaat ganda, yakni produksi pangan



produktivitas rata-rata mencapai 65,89 kuintal per hektar, dengan capaian tertinggi di OKU Selatan sebesar 70,52 kuintal per hektar.

Pemerintah, lanjut Edward, tengah mengupayakan harga pembelian pemerintah (HPP) jagung pipilan kering sebesar Rp5.500 per kilogram guna meningkatkan semangat petani

dan mitigasi bencana.

Adapun total luas lahan yang ditanami jagung dalam program ini adalah 109,27 hektar dengan total bibit sebanyak 1.614 kilogram. Khusus di Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan, penanaman dilakukan di lahan seluas 2,5 hektar dengan jumlah bibit 40 kilogram. •Adv

KRIYA SRIWIJAYA PUNCAK APRESIASI UMKM-PKK

Gema kreativitas dan semangat pemberdayaan ekonomi lokal menggema dalam acara penutupan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Rapat Konsultasi (Rakon) TP PKK Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)

Acara yang ditutup secara Gubernur Sumsel H. Herman Deru, turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Hj. Febrita Lustia Herman Deru serta para pimpinan Dekranasda dan PKK dari 13 Kabupaten/Kota se-Sumsel. Penutupan ini menjadi sorotan dengan hadirnya Kriya Sriwijaya Fashion Parade dan pagelaran budaya Canting Sriwijaya yang memukau para tamu.

Dalam sambutannya, Herman Deru menekankan pentingnya peran strat-

nasda. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumsel akan terus mendukung dengan memperluas akses pembiayaan serta membuka peluang pemasaran produk unggulan dari daerah ke level nasional dan internasional.

Lebih lanjut, Gubernur Herman Deru berharap kegiatan serupa dapat terus dijadikan ruang inspirasi lintas sektor.

"Para Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota untuk lebih proaktif menjaring potensi lokal agar menjadi motor pertumbuhan ekonomi kreatif," harapnya.



egis Dekranasda dan TP PKK dalam mengembangkan potensi lokal.

"Forum ini bukan sekadar seremoni, tapi harus menghasilkan rekomendasi konkret demi penguatan ekonomi keluarga dan UMKM lokal," ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya pembinaan pelaku UMKM dan perajin melalui Dekra-

Pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Sumsel Hj. Febrita Herman Deru juga memberikan piagam penghargaan kepada Dekranasda Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam memajukan produk lokal dan kesejahteraan keluarga.

Fashion show Kriya Sriwijaya menjadi puncak acara yang disambut meriah. Para model membawakan busana hasil rancangan lokal dengan sentuhan motif tradisional Sumsel, memperlihatkan kekayaan budaya dan keterampilan tangan perajin setempat.



Forum ini bukan sekadar seremoni, melainkan harus menghasilkan rekomendasi konkret demi penguatan ekonomi keluarga dan UMKM lokal.

Tak hanya menunjukkan keindahan wastra, acara ini juga menjadi ajang promosi produk UMKM berbasis budaya yang layak dipasarkan ke pasar global.

"Inilah wujud Sumsel Maju untuk semua," ucap Feby Deru.

Sementara itu, Ketua Harian Dekra-



nasda Sumsel, Neng Muhaiba dalam laporannya mengapresiasi sinergi antara kegiatan PKK dan Dekranasda.

Ia menyebut, kegiatan selama Rakerda dan Rakon tahun ini difokuskan pada sinkronisasi program kerja 2025-2026, serta promosi wastra dan fashion lokal Sumsel.

"Kegiatan ini bukan hanya forum rapat, tapi juga wadah ekspresi seni dan budaya yang menggambarkan kekuatan UMKM daerah kita," kata Neng. •Adv

RETRET LASKAR PANDU SATRIA TEMPAT LAHIRNYA PEMIMPIN MASA DEPAN

Investasi karakter bagi generasi muda menjadi hal penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencetak pemimpin masa depan. Program Retret Laskar Pandu Satria yang digagas Gubernur Herman Deru menjadi sebuah inovasi pendidikan nonformal yang menyasar pelajar yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri di sekolah umum.

“Program ini hadir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap generasi muda yang membutuhkan pendekatan khusus dalam pengembangan karakter,” ujarnya.

Retret Laskar Pandu Satria dilaksanakan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Gelombang pertama melibatkan 100 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sumsel. Mereka mengikuti kegiatan selama 10 hari penuh, dengan metode latihan fisik, psikologis, dan pembinaan mental yang komprehensif.

“Pola pendidikan yang digunakan sangat terstruktur. Selain kedisiplinan fisik, peserta juga mendapatkan pembinaan psikologi dari para profesional. Kami ingin karakter mereka terbentuk secara utuh,” tambah Herman Deru

la menekankan bahwa retret ini tidak mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena dilaksanakan pada masa libur sekolah. Ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemprov Sumsel dalam mendukung sistem pendidikan nasional melalui pendekatan yang adaptif.

Bahkan di tengah jadwal kerja yang padat, Herman Deru tetap menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan generasi muda dengan mengunjungi peserta retret Laskar Pandu Satria di Bumi Perkemahan Gandus.

Dalam kunjungan itu, Gubernur tak sekadar hadir secara seremonial. Ia dengan seksama memeriksa fasilitas yang digunakan peserta selama retret. Mulai dari tenda, dapur umum, hingga area kegiatan tak luput dari perhatiannya.

Perhatian khusus diberikan Herman Deru pada aspek sanitasi dan kebersihan lingkungan. Ia menegaskan pentingnya ketersediaan air bersih serta fasilitas MCK yang layak bagi seluruh peserta, guna menjamin kesehatan mereka selama kegiatan berlangsung.

Di tengah suasana perkemahan yang hangat, Gubernur juga menyampaikan pembekalan singkat yang sarat motivasi. Ia mengajak para peserta untuk menjadikan momen retret sebagai ajang pembentukan jati diri dan penguatan karakter.

“Kalian adalah generasi emas yang akan menentukan arah bangsa ini. Gu-



nakan waktu ini untuk belajar tentang kepemimpinan, solidaritas, dan percaya diri," pesannya dengan nada penuh semangat.

Gubernur berharap agar kegiatan retreat seperti ini tidak berhenti hanya pada satu kali pelaksanaan, melainkan dapat menjadi agenda rutin yang terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun jumlah pesertanya.

"Retret ini adalah investasi jangka panjang untuk daerah kita. Dari tempat seperti inilah akan lahir pemimpin masa depan yang berkarakter, tangguh, dan peduli," tutupnya.

Tanamkan Nilai Disiplin dan Anti-Kekerasan bagi Pelajar

Puluhan pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) antusias mengikuti kegiatan Retret Laskar Pandu Satria yang digelar di Bumi Perkemahan Gandus. Kegiatan ini menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai disiplin, integritas, dan penolakan terhadap kekerasan sejak usia dini

Mereka memulai aktivitas dengan kegiatan pembinaan, kebersihan diri, serta shalat Subuh berjamaah bagi yang beragama Islam.

Nilai spiritual menjadi bagian penting dari retret ini. Setiap kegiatan dirancang tak hanya mengasah keterampilan dan kedisiplinan, tetapi juga memperkuat akhlak dan budi pekerti luhur para pelajar. Hal ini tercermin dari rutinitas ibadah dan refleksi harian yang dijalankan peserta secara konsisten.

Kegiatan fisik seperti olahraga pagi dan apel bersama juga menjadi rutinitas harian. Apel pagi dipimpin langsung oleh pendamping dari unsur TNI dan Pramuka yang turut memberikan arahan mengenai pentingnya kekompakan, tanggung jawab, dan semangat bela negara.

Tak hanya pembinaan fisik, peserta juga mendapat materi edukatif yang relevan dengan kondisi sosial pelajar saat ini. Salah satunya adalah sesi bertema "Pencegahan Tindak Kriminalitas di Lingkungan Pelajar" yang disampaikan oleh jajaran Polda Sumsel.

Dalam sesi ini, peserta dibekali pengetahuan tentang bahaya kenakalan remaja, bullying, dan pentingnya menjaga

ketertiban.

Selain itu, sesi bertajuk "Karakter Kuat, Hatiku Lembut, Tolak Kekerasan dengan Kedisiplinan" menjadi salah satu yang paling membekas. Materi ini menekankan pentingnya membangun karakter yang kuat, namun tetap memiliki kelembutan hati untuk menolak segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun

mendapatkan dukungan penuh dari institusi militer. Kehadiran para instruktur TNI menjadi magnet tersendiri yang meningkatkan keseriusan dan rasa hormat dari para pelajar.

Salah satu peserta, Andini (16) dari Kabupaten Ogan Ilir, mengaku bangga bisa mengikuti kegiatan ini.

"Saya merasa lebih percaya diri, dan



fisik.

Peserta juga mendapatkan edukasi terkait pencegahan bencana sosial. Dengan pendekatan interaktif, mereka diajak memahami penyebab dan dampak konflik sosial, serta pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Usai makan siang, suasana retret dibuat lebih santai namun tetap mendidik. Kegiatan sore diisi dengan Fun Games dan kerja kelompok yang dirancang untuk melatih kekompakan, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah secara bersama-sama.

Program Laskar Pandu Satria ini telah

sekarang saya tahu bagaimana cara membentuk karakter yang kuat," ujarnya.

Kegiatan ini tidak hanya menanamkan nilai-nilai kemandirian dan tanggung jawab, tetapi juga mempererat rasa persatuan di antara peserta dari berbagai latar belakang. Mereka tinggal bersama, berlatih bersama, dan saling mendukung selama retret berlangsung.

Materi baris-berbaris, misalnya, menjadi simbol penting bagaimana kedisiplinan dan koordinasi dapat menciptakan kekuatan bersama. Dalam sesi tersebut, para pelajar belajar memahami pentingnya kebersamaan dan keselarasan dalam mencapai tujuan. ●



JATIM SIAP WUJUDKAN SWASEMBADA GULA NASIONAL

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, melakukan panen dan penanaman tebu bersama di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi, pada Senin 23 Juni 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional, khususnya di sektor gula.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta perwakilan petani dari berbagai daerah.

Acara panen ini juga disertai penanaman tebu varietas unggul sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keberlanjutan produksi dan regenerasi kebun tebu.

Wapres Gibran menyatakan bahwa pemerintah menargetkan swasembada pangan nasional pada 2026. Untuk itu, ia meminta seluruh persoalan di

lapangan, khususnya terkait mekanisasi pertanian, segera diselesaikan.

"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan kemandirian pangan bangsa," tegasnya.

Dalam acara ini, pemerintah juga menyerahkan sejumlah bantuan langsung kepada petani, di antaranya. Pompa air dan perlengkapannya, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui platform Ekosistem Tebu Rakyat (Etera) dan Bantuan benih tebu unggul untuk mitra petani

Semua ini merupakan bagian dari strategi terpadu untuk memperkuat peran petani dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan na-

sional.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa kegiatan ini menegaskan peran strategis Jawa Timur dalam ketahanan pangan nasional.

"Alhamdulillah, hari ini kami mendampingi Bapak Wapres dan Bapak Mentan memanen sekaligus menanam kembali tebu di Jolondoro. Ini adalah bagian dari komitmen Jawa Timur untuk menjadi pelopor swasembada gula nasional," ujarnya.

Khofifah menambahkan, jika Indonesia ingin mewujudkan swasembada gula, maka Jawa Timur siap menjadi motor penggerak.

"Dengan produktivitas yang terus meningkat setiap tahun, kami optimis Jatim mampu menyuplai kebutuhan



gula nasional secara berkelanjutan," imbuhnya.

Kebun Tebu Jolondoro memiliki luas 405 hektare dengan target produktivitas rata-rata mencapai 106 ton per hektare. Dua varietas unggulan yang ditanam yakni BL dan HMW, dikenal memiliki hasil tinggi dan adaptasi lingkungan yang sangat baik.

Data tahun 2024 menunjukkan produksi tebu di Jawa Timur mencapai 16,69 juta ton dari luas lahan 238.135,6 hektare. Dari hasil tersebut, dihasilkan 1.278.923 ton gula kristal putih dengan rendemen rata-rata 7,58%.

Sementara produksi gula nasional sebesar 2.465.514 ton, sehingga kontribusi Jatim mencapai sekitar 50%.

Kebutuhan gula di Jawa Timur sendiri per tahun sekitar 281.397 ton, artinya provinsi ini mengalami surplus gula sebesar 997.526 ton.

"Ini adalah bukti nyata bahwa swasembada gula nasional akan bermula dari Jawa Timur," sambungnya.

Prediksi Produksi Gula 2025 Naik Signifikan

Berdasarkan taksasi tahun 2025, luas areal panen tebu di Jawa Timur diproyeksikan meningkat menjadi 252.135 hektare, dengan jumlah tebu digiling sebanyak 18.777.409 ton. Rendemen juga meningkat menjadi 7,76%, dan diprediksi total produksi gula tahun ini akan mencapai 1.457.900 ton naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Saat ini, terdapat 29 pabrik gula aktif di Jatim, tersebar di 16 kabupaten/kota seperti Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Malang, Kediri, Madiun, Tulungagung, hingga Sidoarjo.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2024, pabrik-pabrik di Jatim menyumbang 51,87% dari total produksi gula nasional.

"Angka ini menempatkan Jawa Timur sebagai sentra produksi gula terbesar di Indonesia," tegas Khofifah.

Untuk mendukung sektor ini, Pemprov Jatim telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat Khusus (KURsus) untuk Klaster Petani Tebu, bekerja sama dengan Bank Jatim dan SGN. Dengan bunga tetap 6%, program ini ditujukan bagi peremajaan kebun (> 25

tahun) dan adopsi varietas unggul agar rendemen naik dari 7% menjadi 8-9%.

"Tujuan kita jelas, petani tebu harus naik kelas. Dari buruh ladang menjadi pengusaha pangan yang tangguh dan bermartabat," kata Khofifah.

la juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas tebu, untuk menghasilkan produk turunan seperti bioetanol, mendukung transisi energi menuju green economy dan net zero emission. ●



PELAJAR DI JABAR AKAN BEBAS PR

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menghapus kebijakan pemberian pekerjaan rumah (PR) bagi siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB mulai tahun ajaran baru 2025/2026.

Keputusan progresif ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan ditegaskan dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Jawa Barat yang diterbitkan pada Rabu, 11 Juni 2025.

Langkah ini menjadi tonggak perubahan dalam paradigma pendidikan di Jawa Barat. Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung pendekatan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual bagi peserta didik, menggantikan sistem tugas rumah yang selama ini dinilai membebani siswa dan mempersempit ruang eksplorasi mereka di luar kelas.

Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, sebagai tindak lanjut dari Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 81/PK.03/DISDIK tentang Optimalisasi Pembelajaran.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa pemberian tugas, baik secara individu maupun kelompok, sebaiknya dilakukan selama jam efektif belajar di sekolah, dan tidak lagi diberikan dalam bentuk PR yang bersifat tertulis untuk setiap mata pelajaran.

"Pemberian tugas agar dioptimalkan saat jam efektif di satuan pendidikan serta tidak membebani peserta didik dengan PR tertulis dari setiap mata pelajaran," demikian kutipan dalam surat edaran tersebut.

Penugasan yang diberikan nantinya bersifat reflektif dan eksploratif, berorientasi pada penguatan karakter, pemahaman sosial, dan kesadaran lingkungan. Ini termasuk proyek-proyek pembelajaran yang melibatkan interaksi dengan keluarga, alam, dan

masyarakat sekitar.

Surat edaran tersebut juga mengatur bahwa durasi pelaksanaan tugas maksimal adalah 60 persen dari total waktu tatap muka, dengan prioritas pelaksanaan di sekolah melalui pembelajaran remedial. Fokus utama adalah penguatan kompetensi siswa yang belum memenuhi standar minimal pembelajaran.

Di luar jam sekolah, siswa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai minat dan bakat, termasuk dalam bidang keagamaan, literasi dan sastra, seni dan budaya, sains dan teknologi. Olahraga, kewirusaha-

dan ekstrakurikuler lainnya

"Dapat dioptimalkan juga untuk pengembangan minat dan bakat peserta didik di antaranya membantu orang tua/wali di rumah serta lingkungan sekitar," bunyi salah satu butir edaran.

Seluruh kepala cabang dinas pendidikan di wilayah kerja masing-masing diminta untuk segera menyosialisasikan kebijakan ini ke seluruh

satuan pendidikan di bawah koordinasinya. Selain itu, mereka juga diminta melakukan pendampingan untuk memastikan kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif dan sesuai tujuan.

Saat ini, kebijakan penghapusan PR hanya diberlakukan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Adapun untuk jenjang SD dan SMP, keputusan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota di masing-



masing daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk kemungkinan adopsi kebijakan serupa di masa mendatang.

Melalui akun Instagram resminya, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang menempatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup anak sebagai prioritas.

"PR membuat rutinitas sekolah terbawa hingga ke rumah. Padahal rumah adalah tempat anak-anak beristirahat, berinteraksi dengan keluarga, dan menggali potensi diri di luar pelajaran sekolah," ujar Dedi.

Menurutnya, tugas-tugas rumah yang bersifat menekan justru menghambat perkembangan personal siswa dan bisa mengganggu keharmonisan kehidupan keluarga. Ia menegaskan pentingnya menciptakan ruang belajar yang tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran sosial.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberanian dalam mengubah sistem pendidikan yang selama ini terlalu berorientasi pada hafalan dan tugas tertulis. Kini, pembelajaran diarahkan pada pemahaman mendalam melalui pengalaman langsung, interaksi, dan refleksi.

Kebijakan penghapusan PR ini juga dipandang sebagai inspirasi potensial bagi provinsi lain di Indonesia, terutama dalam merespons tantangan zaman yang menuntut generasi muda memiliki keterampilan hidup, kreativitas, dan kecerdasan emosional.

Dengan pendekatan baru ini, Pemprov Jawa Barat berharap siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang utuh: cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan peduli secara sosial.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyinggung hal tersebut. Dia berpendapat PR tetap mesti diberikan kepada siswa dengan konsep yang selaras dengan pembelajaran mendalam atau deep learning.

"Dengan kebijakan deep learning ini PR itu boleh," kata Mu'ti di Gedung A Kemendikdasmen, Selasa, 24 Juni

2025.

Dia tak mempermasalahkannya bila ada pihak-pihak yang berbeda pendapat soal ini. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal biasa.

"Jadi kalau ada yang mengatakan enggak boleh PR, ya enggak apa-apa beda pendapat," tutur dia.

Sementara, Ahli pendidikan Ina Liem menyebut PR masih penting di banyak negara seperti Singapura, Jepang, dan Cina. PR dinilai tak hanya memperkuat pelajaran, tapi juga membentuk karakter, tanggung jawab, dan kemandirian

pusan PR bisa berdampak negatif karena sistem belum siap.

Senada dengan Ina, Ketua Guru Belajar Foundation Bukik Setiawan menilai penghapusan PR bisa memberi waktu istirahat bagi siswa dan memulihkan rasa ingin tahu mereka. Tapi, jika sekolah belum mampu mendorong siswa aktif belajar di kelas, waktu tanpa PR justru bisa terbuang sia-sia.

Bukik menegaskan, PR akan bermanfaat jika disesuaikan dengan usia dan tujuan pembelajaran. "Mengutip penelitian John Hattie dari Selandia



siswa.

Ina mengakui, ada juga negara seperti Finlandia yang telah menghapus PR, khususnya di tingkat sekolah dasar. Namun, itu bisa dilakukan karena sistem pendidikan mereka sudah sangat kuat, mulai dari kualitas guru hingga metode belajar di kelas.

Di Indonesia, menurut Ina, pengha-

Baru, PR berdampak positif bagi siswa SMP dan SMA, tapi tidak efektif untuk SD," katanya.

Ia menyarankan agar kebijakan di Jawa Barat tak sekadar menghapus atau mempertahankan PR, tapi fokus pada efektivitas dan kualitas tugas yang diberikan, sesuai kebutuhan dan usia siswa. ●

JAKARTA MENUJU KOTA GLOBAL BERBUDAYA DAN SEJAHTERA

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta pada Minggu, 22 Juni 2025, tidak hanya seremoni tahunan, tapi juga momen refleksi atas perjalanan panjang ibu kota serta arah masa depannya.

Upacara berlangsung di Silang Monas Barat, Jakarta Pusat, dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Dalam pidatonya, Pramono menekankan bahwa Jakarta telah mengalami transformasi luar biasa. Dari pelabuhan kecil Sunda Kelapa, kini

infrastruktur diperkuat, wajah kota diperindah, dan semua ini menjadi bukti bahwa Jakarta adalah rumah bagi jutaan penduduk yang terus tumbuh," ujar Pramono.

Tahun ini, peringatan HUT mengusung tema "Jakarta Kota Global dan Berbudaya", yang mencerminkan tekad pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan modern dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pramono menegaskan, keberagaman budaya di Jakarta adalah kekuatan utama yang membentuk karakter kota.

Dalam visi jangka menengah 2025-2029, Pemprov DKI menargetkan Jakarta menjadi kota dengan daya saing tinggi, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh

seperti kolaborasi, gotong royong, toleransi, dan inklusivitas adalah kekuatan sosial yang sangat penting dalam mewujudkan kota kelas dunia.

"Semangat kebersamaan ini adalah ciri khas Jakarta, dan menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan kota yang lebih baik," tegasnya.

Pramono Anung juga mengajak seluruh warga untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam membangun Jakarta yang lebih baik.

Ia menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Rano Karno untuk menciptakan ibu kota yang aman, nyaman, indah, dan mudah diakses.

Pramono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Jakarta yang lebih layak huni.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Bu-



Jakarta menjelma menjadi kota metropolitan dan simbol Indonesia di dunia internasional.

"Jakarta terus berbenah. Pembangunan merata di berbagai wilayah,

warganya. Jakarta juga ditargetkan masuk dalam daftar 50 kota besar terbaik di dunia.

Pramono menggarisbawahi bahwa nilai-nilai khas masyarakat Jakarta

tuh gotong royong dari seluruh warga agar perubahan yang kita rancang bisa berjalan efektif," kata Pramono.

Salah satu persoalan utama yang

ingin segera diselesaikan, menurut Pram, adalah kemacetan yang telah lama menjadi momok bagi warga Jakarta.

Untuk itu, pihaknya tengah menyiapkan sistem transportasi terpadu yang diberi nama Transjabodetabek sebagai solusi mobilitas antarwilayah.

Transjabodetabek dirancang untuk mengintegrasikan moda transportasi antarwilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Diharapkan, proyek ini mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus menekan kemacetan yang semakin parah.

Selain masalah transportasi, Pramono juga menjanjikan bahwa pada tahun 2029 seluruh warga Jakarta akan mendapatkan akses penuh terhadap air bersih.

Ia mengumumkan bahwa penetapan lokasi (penlok) untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung akan mulai diberlakukan bulan depan sebagai langkah konkret penanggulangan banjir.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga rutin melakukan pengerukan saluran air dan sungai sebagai upaya preventif menghadapi musim hujan.

Namun, Pram menegaskan bahwa semua program itu akan sia-sia jika tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat.

"Bapak, Ibu, saudara sekalian, peran Anda semua sangat krusial. Kami hanya fasilitator. Keberhasilan pembangunan Jakarta adalah hasil dari kerja bersama," ujarnya, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan warga dalam setiap aspek pembangunan.

Pram mengajak warga menjadikan HUT ke-498 sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap Jakarta.

Ia berharap setiap lapisan masyarakat ikut menjaga, merawat, dan membangun kota yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan nasional ini.

Dengan semangat kolaborasi, HUT Jakarta kali ini bukan hanya seremonial perayaan, tapi juga titik awal untuk membentuk wajah baru ibu kota yang lebih tangguh, manusiawi, dan membanggakan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyebutkan, Jakarta terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk komunitas internasional.

Hal tersebut disampaikan olehnya saat menyambut kedatangan para Duta Besar (Dubes) negara sahabat di Balai Kota Jakarta, pada Minggu, dalam rangka resepsi perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Ja-

fleksi atas perjalanan, tantangan, dan arah masa depan Jakarta yang tengah bersiap memasuki babak baru sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global," ucapnya.

Dia juga menyebutkan di usia yang hampir lima abad, Jakarta terus berbenah menjadi kota yang berpihak kepada semua, menjunjung keadilan dan kesetaraan.

"Pembangunan Jakarta ke depan



karta.

"Pertemuan dengan para dubes dinilai penting sebagai wadah dialog dan pertukaran pandangan dalam menjajaki peluang kerja sama untuk membangun Jakarta sebagai kota global yang terbuka dan adaptif," katanya.

"Momentum ini menjadi ajang re-

diarahkan pada penguatan konektivitas dan sinergi antara sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai capaian yang telah diraih tak lepas dari dukungan semua pihak melalui program-program yang mendorong pengembangan budaya sekaligus peningkatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya. ●

KUALANAMU DISIAPKAN JADI PINTU GERBANG INDONESIA BARAT

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution menyampaikan langkah strategis untuk menurunkan harga tiket pesawat dari dan menuju Bandara Internasional Kualanamu, sebagai bagian dari upaya besar menjadikannya sebagai hub utama transportasi udara di wilayah barat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri peresmian fasilitas Autogate dan Lounge Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandara Kualanamu. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Komjen Pol. (Purn) Agus Andrianto, serta jajaran pejabat otoritas bandara.

Bobby mengungkapkan bahwa ide besar ini telah ia rancang bahkan sejak sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bersama Agus Andrianto, keduanya bercita-cita menjadikan Kualanamu sebagai bandara internasional utama, yang tidak hanya melayani pelancong domestik, tetapi juga sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke wilayah barat Indonesia.

"Kualanamu harus menjadi simpul mobilitas regional dan internasional. Namun, kita masih menghadapi hambatan besar yakni harga tiket pesawat yang tinggi," ujarnya dengan tegas.

Menanggapi permasalahan mahalnya tiket pesawat, Bobby menegaskan bahwa pihaknya telah menyusun formula strategis untuk menurunkan harga tiket, baik untuk rute domestik seperti Jakarta, maupun rute internasional.

Strategi ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktur Utama PT Angkasa Pura II, pengelola Bandara Kualanamu.

"Kami sudah berdiskusi secara langsung dengan Dirut Bandara Kualanamu. Rumusnya sudah ada. Tinggal kami sinkronkan dengan kementerian dan operator penerbangan untuk implementasinya," ujar Bobby.

Upaya ini, lanjutnya, juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian besar terhadap stabilisasi harga komoditas dan layanan publik, termasuk tarif transportasi udara. Harga tiket yang lebih terjangkau diyakini akan meningkatkan konektivitas Sumatera Utara dengan wilayah lain, serta membuka peluang investasi dan pari-



wisata yang lebih luas.

Saat ini, sejumlah rute internasional ke dan dari Kualanamu memang telah kembali dibuka pascapandemi. Namun, sebagian besar bersifat musiman dan tidak beroperasi secara konsisten.

Bobby berharap, dengan harga tiket yang kompetitif dan layanan bandara yang semakin baik, maskapai asing akan mempertahankan rute mereka secara reguler.

“Kita tidak ingin penerbangan internasional hanya berlangsung dua-tiga bulan lalu tutup. Kita ingin keberlanjutan. Ini butuh kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga mengapresiasi penambahan layanan Autogate dan Lounge PMI oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Menurutnya, penguatan infrastruktur pelayanan keimigrasian akan meningkatkan pengalaman penumpang, khususnya para pekerja migran asal Sumut yang jumlahnya terus meningkat.

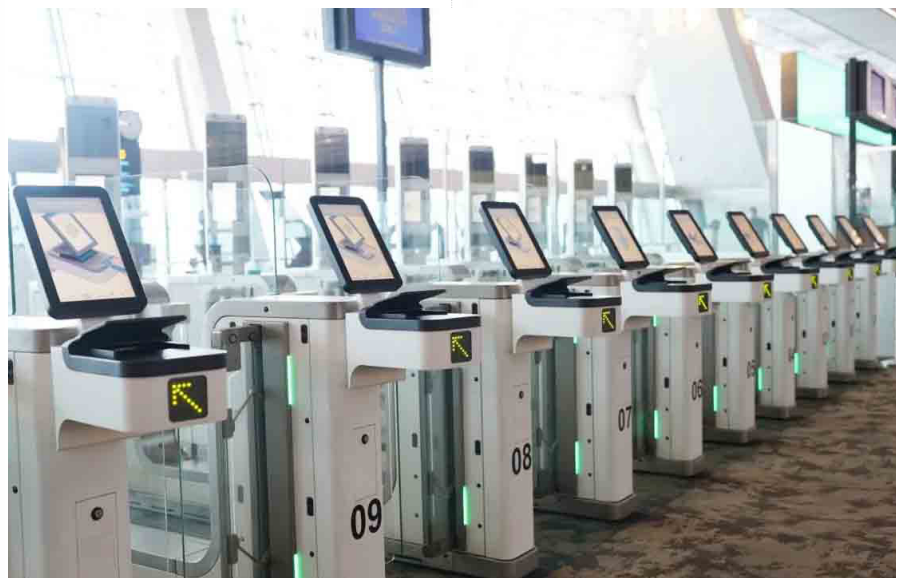
“Layanan ini bukan hanya simbol modernisasi bandara, tapi bukti nyata bahwa negara hadir bagi PMI. Ini sejalan dengan visi kami menjadikan Kualanamu sebagai kebanggaan Sumut,” ujarnya.

Bobby menegaskan komitmennya membangun Sumatera Utara sebagai provinsi yang maju, terbuka, dan kompetitif di kancah nasional maupun internasional.

“Kami ingin Sumut menjadi provinsi yang besar dan membanggakan. Dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah, saya optimistis itu bisa tercapai,” ulasnya.

Bobby menyebut kehadiran Autogate Bandara International Kualanamu dapat memberikan layanan tercepat baik bagi masyarakat Sumut dan juga pendatang. Layanan ini mampu memangkas antrian imigrasi yang sebelumnya bisa mencapai 30-60 menit, menjadi tidak lebih dari 10 menit.

“Permasalahan selama ini, sebelum ada autogate bisa sampai 30-60 menit antrian imigrasi yang ada di Kualanamu. Namun setelah ada Autogate, kita tanya langsung kepada pengguna fasilitas, tak lebih dari 10 menit. Kalaupun panjang sekali tak lebih dari 10 menit,” sambung Bobby.



Menurutnya, pelayanan Autogate ini merupakan pelayanan yang sangat luar biasa, yang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas bandara.

Sementara Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan ini merupakan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang optimal, serta meningkatkan efisiensi keamanan dan kenyamanan, dan proses imigrasi di tempat pelayanan keimigrasian di Bandara Internasional Kualanamu.

Sepanjang semester I tahun 2025, Agus Andrianto menyebutkan sebanyak 109.728 penerbitan izin paspor dan 3.066 izin tinggal. Hal ini menunjukkan kegiatan di bidang keimigrasian di Provinsi Sumut mengalami peningkatan.

“Tentunya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat Sumut. Kehadiran Autogate dan Lounge PMI di Bandara Kualanamu dapat memberikan pelayanan dan perlindungan keimigrasian yang optimal di area fasilitas publik bagi WNI dan WNA yang melintas melalui Bandara Kualanamu, serta dapat mewujudkan pelayanan yang dekat dan nyaman kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia menyebutkan berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut bahwa pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan I tahun 2025 berada di angka 4,67% (y/y). Realisasi investasi di Sumut Rp48,271 triliun yang terdiri dari PMDN Rp22,44 triliun, dan PMA Rp25,82 triliun. Tentunya capaian ini akan terus dikembangkan baik Pemprov Sumut, dan seluruh kabupaten/kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ●



Musrenbang RPJMD 2025–2029 **WUJUDKAN MUBA MAJU LEBIH CEPAT DAN SEJAHTERA**

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Tahun 2025–2029, yang secara resmi dibuka oleh Bupati Muba HM Toha.

Bupati HM Toha menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan janji politik ke dalam dokumen perencanaan RPJMD Muba 2025–2029.

Ia juga menekankan bahwa sebelum pelaksanaan Musrenbang ini, telah digelar Forum Konsultasi Publik

guna menghimpun berbagai masukan terkait data, isu strategis, serta aspirasi masyarakat.

“Visi pembangunan lima tahun ke depan adalah Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin. Ini mencerminkan semangat percepatan pembangunan yang inklusif dan merata,” tegasnya.

Lanjutnya, untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan tujuh misi pembangunan daerah, antara lain, tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, penguatan SDM, rekonstruksi sosial dan ekonomi, moderasi beragama dan ekonomi keumatan, percepatan infrastruktur, peningkatan peran dunia usaha dan kampus, serta pengelolaan SDA berkelanjutan.

Ia juga memaparkan 22 program prioritas yang akan dijalankan hingga 2029, di antaranya, Sikat Korupsi, Akte dan KTP Gratis Sampai ke Rumah, Satu Desa Rp1,5 Miliar, Beasiswa Prestasi Sampai

Sarjana, Bantuan Guru Mengaji (Bajig), Digitalisasi dan Klinik Usaha, Santunan Kematian, serta Ekosistem Industri Halal.

“Dalam proses perencanaan ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi aktif dalam proses penyusunan RPJMD ini dan pelaksanaannya nanti. Sehingga misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di Muba menjadi lebih cepat dan menyejahterakan seluruh Masyarakat, tambah Toha.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Muba, Agus Arisman ST, menjelaskan RPJMD ini disusun berdasarkan berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk UU No. 25/2004, UU No. 23/2014, serta Perpres No. 12/2024 tentang RPJMN 2025–2029. Penyusunan juga mempertimbangkan berbagai isu strategis, seperti kemiskinan, kualitas SDM, ketahanan ekonomi, infrastruktur, digitalisasi layanan publik, hingga tantangan

lingkungan dan bencana.

Indikator makro tahun 2024 menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94%, penurunan angka kemiskinan menjadi 12,88%, dan IPM mencapai 72,27. Target hingga 2029 mencakup kemiskinan di bawah satu digit, peningkatan IPM ke 73,5, serta pertumbuhan ekonomi antara 5,10-5,50%.

“Dari sisi ekonomi, Muba masih didominasi sektor primer, seperti pertambangan, pertanian, dan pengolahan. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, lima tahun ke depan akan difokuskan pada hilirisasi industri, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan empat kawasan strategis, yakni ketahanan pangan, ekonomi halal, energi berkelanjutan, dan pariwisata budaya,” ungkap Agus.

Dikatakannya, secara fiskal, Muba memiliki kapasitas fiskal tinggi namun masih didominasi belanja rutin. Pemerintah akan mendorong peningkatan porsi belanja pembangunan serta menggenjot investasi melalui insentif, penyederhanaan perizinan, dan branding daerah.

Dalam hal kewilayahan, tantangan seperti konflik batas dan infrastruktur akan diatasi melalui pengembangan kawasan strategis seperti agropolitan, perkebunan, dan industri. Enam tahapan pembangunan ditetapkan untuk memastikan kesinambungan hingga 2030, dimulai dari persiapan pondasi hingga transformasi dan keberlanjutan.

Langkah Nyata Mewujudkan Janji Politik

Musrenbang ini juga sebagai langkah nyata untuk mewujudkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai visi Muba Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin.

Untuk mendukung Visi tersebut telah ditetapkan 7 (Tujuh) Misi, adapun ketujuh Misi tersebut yaitu:

1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif Dan Melayani.
2. Penguatan Sdm Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan.
3. Rekonstruksi Sosial Dan Ekonomi Menuju Musi Banyuasin Sejahtera.
4. Penguatan Moderasi Beragama Dan

Ekonomi Keumatan.

5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelayanan Dasar Dan Mendorong Konektivitas.
6. Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri Dan Perguruan Tinggi.
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.

Lebih lanjut, Bupati Toha menjelaskan bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan 22 (Dua Puluh Dua) Program Prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan pada periode tahun 2025-2029.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi “Muba Maju Lebih Cepat”, Bupati Musi Banyuasin terus menggulirkan berbagai program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Salah satu program andalan adalah Program Keluarga Maju, yang secara khusus dirancang untuk menjangkau

dan memberdayakan keluarga kurang mampu di Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain itu, Pemkab Muba juga meluncurkan Program BASANAK (Bantuan Sayang Anak), sebagai langkah konkret dalam penanganan masalah stunting yang masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah termasuk Musi Banyuasin.

Tidak hanya fokus pada program jangka pendek, Bupati Muba juga telah menyepakati sejumlah target indikator makro pembangunan untuk jangka menengah dan panjang.

Bupati HM Toha mengharapkan pelaksanaan Musrenbang RPJMD, yang menjadi bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 yaitu Maju Lebih Cepat, Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin. ●





ALAM KULON PROGO YANG MENAKJUBKAN

Yogyakarta selalu punya tempat istimewa di hati para traveler. Jika kamu ingin menemukan lokasi yang lebih tenang, alami, dan belum terlalu ramai, Kulon Progo adalah jawabannya.

Wilayah Kulon Progo ini menyuguhkan deretan destinasi dan tempat wisata dengan nuansa asri dan harga tiket masuk yang sangat terjangkau.

Kabupaten Kulon Progo yang berada

makin mudah, Kulon Progo kian menarik perhatian wisatawan lokal maupun luar daerah.

5 Tempat Wisata Murah di Kulon Progo

Berikut ini lima destinasi wisata murah dengan pemandangan terbaik yang bisa kamu kunjungi di Kulon Progo.

1. Pronosutan View

Pronosutan View terletak di Dusun Pronosutan, Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini dapat dijangkau dengan kendaraan sekitar 1 jam dari pusat Kota Yogyakarta ke arah barat.

Pronosutan View terkenal dengan pemandangan sawah yang membentang luas di kiri dan kanan jalan. Jalan desa

belakang Pronosutan View. Saat cuaca cerah, kontur perbukitan tersebut tampak jelas dan indah, menambah kesan dramatis pada lanskap.

Pronosutan View menjadi spot favorit untuk bersepeda santai maupun jogging. Jalan beton yang lebar dan datar di antara sawah sangat ideal untuk aktivitas luar ruangan yang menyehatkan, jauh dari kebisingan kota.

Beberapa warung kopi dan angkringan sederhana berdiri di pinggir jalan, menawarkan tempat duduk santai dengan panorama langsung ke sawah. Tempat ini cocok untuk melepas penat sambil menyeruput kopi lokal.

2. Pantai Congot

Pantai Congot adalah salah satu destinasi wisata pantai yang menawan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Terletak di ujung barat Daerah Istimewa Yogyakarta, pantai ini menawarkan pesona alam yang masih asri dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian wisatawan seperti di pantai-pantai selatan lainnya.

Pantai Congot menyuguhkan pemandangan laut yang luas dengan ombak yang relatif tenang. Hamparan pasir hitam yang halus menjadi ciri khas, berpadu indah dengan langit biru dan hembusan angin laut yang menyegarkan.

Di sisi kanan dan kiri pantai, deretan pohon cemara udang serta semak pantai menambah suasana damai dan alami.

Salah satu daya tarik utama Pantai Congot adalah matahari terbenamnya yang sangat memukau. Ketika senja datang, langit berubah menjadi kanvas jingga keemasan yang memantul di permukaan air laut. Banyak pengunjung yang datang menjelang sore hari hanya untuk menyaksikan momen magis ini.

Pantai Congot terhubung langsung dengan muara Sungai Bogowonto, dan di sekitarnya terdapat hutan mangrove yang luas. Hutan ini bukan hanya berfungsi sebagai penahan abrasi, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai jenis burung dan fauna laut.

Wisatawan bisa menjelajahi kawasan mangrove dengan perahu kecil atau menyusuri jembatan bambu, menciptakan pengalaman yang sangat menyatu dengan alam.



di bagian barat DIY menyimpan banyak potensi wisata alam yang masih alami. Keindahan pantai, perbukitan, sawah, bahkan ekowisata air bisa kamu temukan di sini.

Keunikan setiap lokasi menjadikan pengalaman berwisata ke Kulon Progo terasa segar dan berbeda dari tempat wisata populer lainnya di Yogyakarta.

Dengan infrastruktur yang semakin berkembang dan akses jalan yang se-

yang lurus sejauh kurang lebih 1 kilometer menjadi ikon khas di tempat ini. Di kedua sisinya, sawah yang tertata rapi menciptakan lanskap menenangkan bak lukisan alam.

Setiap musim membawa pesona tersendiri, seperti musim tanam, permadani hijau yang subur dan musim panen, keemasan padi yang memesonakan.

Di kejauhan, berdiri megah Pegunungan Menoreh yang membingkai latar

3. Laguna Pantai Glagah

Pantai Glagah terkenal karena keunikan laguna alaminya yang berbeda dari pantai lain di Jogja. Di sini, kamu bisa merasakan dua suasana sekaligus: ombak laut yang besar dan laguna yang tenang. Pengunjung bisa menyewa perahu atau duduk santai menikmati pano-

rama yang memikat.

Tak hanya itu, keberadaan tetrapod raksasa yang menjadi ciri khas Pantai Glagah juga menjadi spot foto favorit. Fasilitas cukup lengkap dan biaya masuknya tergolong murah, menjadikannya pilihan tepat untuk wisata keluarga yang aman dan nyaman.



4. Bendungan Sermo

Sebagai satu-satunya waduk di Yogyakarta, Bendungan Sermo menjadi destinasi wisata air yang patut dikunjungi. Pemandangan danau yang luas berpadu dengan bukit hijau dan udara sejuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Waktu terbaik untuk datang adalah menjelang senja, ketika cahaya keemasan memantul di permukaan air dan menciptakan pemandangan sunset yang memukau.

Kawasan sekitar bendungan juga dilengkapi fasilitas perahu wisata dan spot kuliner lokal yang menambah daya tarik tempat ini. Biaya masuknya relatif murah, sangat ramah untuk wisatawan dari segala kalangan.

5. Ekowisata Sungai Mudal

Sungai Mudal menawarkan pesona air terjun alami dan kolam bening berwarna kebiruan yang dikelilingi hijaunya pepohonan. Terletak di kawasan Pegunungan Menoreh, destinasi ini cocok untuk kamu yang ingin menyatu dengan alam sambil bermain air di kolam alami.

Fasilitas yang tersedia cukup memadai, mulai dari gazebo untuk bersantai, jembatan bambu hingga taman bunga yang indah. Ekowisata ini sangat cocok untuk liburan keluarga atau pasangan muda yang mencari tempat sejuk dan tidak terlalu ramai.

Dari pantai eksotis, sawah luas, laguna menawan, air terjun alami, hingga waduk yang tenang, semua bisa kamu temukan di Kulon Progo tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Setiap tempat menawarkan keunikan tersendiri, menjadikannya surga wisata tersembunyi yang wajib dieksplorasi saat liburan ke Jogja. ●



Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguisse MOMEN SAKRAL PENUH HARU DAN KEHANGATAN KELUARGA

Ahmad Al Ghazali, putra sulung pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty, akhirnya resmi mempersunting kekasih hatinya, Alyssa Paramaitha Daguisse, dalam sebuah prosesi pernikahan yang berlangsung sakral dan penuh kebahagiaan pada Senin, 16 Juni 2025.

Akad nikah digelar di Hotel The St. Regis Jakarta, dengan nuansa mewah namun tetap kental akan nilai budaya dan kekeluargaan.

Dalam suasana yang khidmat, Al Ghazali mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas dengan lantang dan penuh keyakinan. Ia menyalami Andhika Daguisse yang bertindak sebagai wali nikah mewakili ayah Alyssa, Richard Vincent Daguisse.

Richard sendiri hadir menyaksikan langsung momen bersejarah itu, duduk di kursi terdepan mendampingi sang putri.

"Saya terima nikah dan kawinnya Alyssa Paramaitha Daguisse binti Richard Vincent Daguisse dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ucap Al dengan suara tegas yang langsung disambut ucapan sah dari para saksi.

Sebagai mahar, Al Ghazali menyerahkan logam mulia seberat 16,6 gram dan uang tunai sejumlah 2.025 Euro, yang mencerminkan tanggal pernikahan mereka yakni 16 Juni 2025. Mahar tersebut menjadi lambang cinta dan komitmen mereka, serta harapan agar perjalanan rumah tangga dimulai dengan berkah

dan ketulusan.

Alyssa tampil memukau dalam balutan kebaya brokat putih berhias kristal, dipadukan dengan siger Sunda yang megah serta roncean daun sirih di kening sebuah simbol kecantikan dan kesucian dalam adat Sunda. Penampilannya kian anggun

genakan beskap berwarna putih tulang dan kain batik khas Jawa, menampilkan kesan maskulin sekaligus elegan. Kedua mempelai terlihat serasi, bak pangeran dan putri dalam kisah dongeng.

Sebelumnya, keduanya menggelar acara siraman. Siraman Al



dan klasik, mencerminkan asal sang ibu, Risa Dewi, mantan model berdarah Garut.

Sementara itu, Al Ghazali men-

Ghazali digelar secara privat namun penuh makna di kediaman sahabat keluarga, Btari Asih, yang berlokasi di kawasan elit Pondok Indah, Ja-

karta Selatan. Kedua keluarga besar hadir lengkap. Ahmad Dhani datang bersama Mulan Jameela, sementara Maia didampingi sang suami, Irwan Mussry.

Dalam momen tersebut, tak ada sekat antara mantan dan pasangan baru. Maia bahkan terlihat akrab menyapa dan bersalaman dengan anak-anak Mulan. Ia tampil memesona dalam balutan kebaya klasik, penuh karisma seperti seorang ratu yang hendak menikahkan putra mahkotanya.

Melalui media sosial, Maia membagikan cuplikan video prosesi siraman yang diberi latar lirik lagu "Aku Pasti Kembali" yang menyentuh.

"Aku hanya pergi 'tuk sementara. Bukan 'tuk meninggalkanmu selamanya. Aku pasti 'kan kembali pada dirimu. Tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali."

Rangkain pernikahan Al Ghazali



sung tema Royal Javanese Wedding yang kental dengan budaya Jawa, khususnya nuansa khas Yogyakarta. Sebelum acara dimulai, Ahmad Dhani mengajak kedua besannya, Richard Vincent Daguisse dan Risa Dewi, berkeliling melihat langsung dekorasi venue yang telah dipersiapkan dengan sangat matang.

Richard, ayah dari Alyssa, memberikan pujian terhadap konsep dan dekorasi yang diusung.

"(Dekorasinya) luar biasa. Tunggu saja acaranya nanti malam. Saya sudah tinggal di Indonesia selama 32 tahun, dan ini benar-benar terasa sangat Indonesia. Konsepnya cocok sekali," ujar Richard kepada awak media di JCC, Kamis 19 Juni 2025.

Ahmad Dhani sendiri turun tangan langsung dalam menyiapkan konsep dan properti acara. Ia menyebut hampir seluruh ornamen, termasuk panggung dan alat musik, merupa-



Rembang, dan Yogyakarta. Selain itu, ia juga menambahkan sentuhan personal berupa deretan foto-foto para Raja Jawa yang dipasang sendiri olehnya dalam bingkai pigura.

"Saya yang pasang sendiri foto-fotonya. Harus saya, gak bisa orang lain. Ini bukan sekadar pesta pernikahan, tapi juga sebuah peristiwa budaya," ungkap Ahmad Dhani.

Pada momen puncak acara, Al Ghazali dan Alyssa Daguisse tampil memukau dalam balutan busana pengantin adat Yogyakarta. Mereka berjalan memasuki venue bak Raja dan Ratu, disambut alunan musik gamelan yang mengiringi setiap tamu yang hadir.

Alyssa tampil anggun mengenakan kebaya hitam dengan paes khas Jawa, sementara Al Ghazali tampil gagah dengan busana beskap dan blangkon senada. Keduanya mel-



dan Alyssa Daguisse berlanjut dengan acara ngunduh mantu yang diadakan oleh Ahmad Dhani di JCC, Usung Tema Royal Javanese Wedding

Ahmad Dhani menggelar hajatan akbar bertajuk unduh mantu dalam rangka menyambut resmi Alyssa Daguisse sebagai menantu. Acara megah ini berlangsung pada Kamis, 19 Juni 2025, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Hajatan tersebut menjadi puncak dari rangkaian pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguisse, setelah sebelumnya digelar akad nikah yang berlangsung khidmat.

Acara unduh mantu ini mengu-

kan milik pribadinya yang diambil dari gudangnya, bukan disewa dari vendor biasa.

"Dekorasi ini 99 persen sesuai dengan konsep yang kami inginkan. Semua ornamen kayu dan alat konser ini punya saya pribadi, bukan dari rumah, tapi dari gudang. Bahkan pelaminannya saya buat sendiri," kata Dhani.

Pelaminan tersebut dibuat dari kayu jati asli dan dirancang menyerupai chapel yang di bagian belakangnya dilengkapi layar LED raksasa menampilkan visual megah Candi Borobudur dan Prambanan.

Untuk memperkuat nuansa budaya, Dhani mendatangkan ornamen kayu jati dari daerah Lasem,

mباikan tangan ke arah tamu undangan yang menyambut hangat kehadiran mereka.

Di pelaminan, kedua mempelai duduk berdampingan bersama orang tua masing-masing. Al Ghazali ditemani Ahmad Dhani dan ibunya, Mulan Jameela, sementara Alyssa duduk bersama ayahnya Richard Vincent Daguisse dan ibunya Risa Dewi.

Para orang tua tampil serasi mengenakan busana adat. Ahmad Dhani dan Richard mengenakan beskap dengan kain batik dan blangkon, sedangkan Mulan Jameela dan Risa Dewi tampil anggun dalam kebaya fuchsia yang mencolok namun elegan. ●

TERGUSUR DAN AKHIRNYA MENGANGGUR

Tidak semua pemain Timnas Indonesia terutama yang menjalani naturalisasi mendapat tempat di banyak klub. Beberapa pemain itu kini malah berstatus pengangguran setelah diputus atau jarang dimainkan klubnya. Klub-klub di Liga 1 Indonesia menyatakan siap menampung para pemain diaspora tersebut.

Ternyata banyak pemain diaspora di Timnas Indonesia yang bakal putus kontrak per akhir Juni 2025 nanti. Para pemain yang dimaksud adalah Nathan Tjoe-A-On, Thom Hays, Justin Hubner, Rafael Struick, Shayne Pattynama, dan Jordi Amat. Beberapa klub Liga 1 Indonesia seperti Persib Bandung Bhayangkara Presisi serta Dewa United sempat menyatakan minatnya.

Para pemain diaspora itu meninggalkan klub lamanya usai hanya mendapatkan sedikit menit bermain. Ada yang memang kontraknya berakhir dan tak diperpanjang, namun beberapa karena kedua belah pihak sepakat ingin berpisah. Nathan Tjoe A On dilepas Swansea City dan kini diminati Bhayangkara FC. Pemain Timnas Indonesia lainnya juga

diminati beberapa klub Liga 1 Indonesia.

Bhayangkara Presisi Lampung FC dikabarkan siap mengamankan jasa Nathan Tjoe-A-On, yang baru saja dilepas Swansea City. Klub berjuluk The Guardians itu menyatakan kesiapannya menerima Nathan dengan tangan terbuka.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh COO Bhayangkara, Sumardji. Namun, ia tidak menyebutkan apakah sudah ada komunikasi langsung dengan Nathan.

Sumardji menyatakan bahwa pihaknya akan sangat senang jika sang pemain bersedia untuk bergabung.

"Kalau Nathan ingin bergabung, kami (Bhayangkara) akan sangat senang sekali untuk menerimanya," ucap Sumardji beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Nathan Tjoe A On juga disebut masih membuka peluang untuk kembali melanjutkan karirnya di Liga Belanda, salah satunya dengan memperkuat mantan klubnya, Excelsior Rotterdam, yang baru saja kembali promosi ke Eredivisie.

Bhayangkara Presisi sendiri bukan kali pertama dikaitkan dengan pemain keturunan Timnas Indonesia.

Sebelumnya, Shayne Pattynama juga sempat dirumorkan akan bergabung dengan The Guardians usai dilepas KAS Eupen.

Sedangkan Rafael Struick yang sempat dikaitkan dengan Bali United, kini dua klub Liga 1 lainnya ikut meramaikan perburuan tanda tangan Rafael Struick.

Persib Bandung dan Dewa United dikabarkan berminat untuk merekrut penyerang muda Timnas Indonesia tersebut, yang saat ini berstatus bebas transfer.

Dilansir dari Transfermarkt, nama Rafael Struick masuk dalam daftar buruan kedua klub tersebut.

Dewa United disebut sangat berminat dan tengah berupaya untuk bisa segera mengamankan jasa Struick, sementara Persib menilai gaya bermain striker berusia 22 tahun itu cocok dengan skema Bojan Hodak.

Ia pun diproyeksikan sebagai calon



BELUM ADA PEMAIN ABROAD YANG MASUK

Meski menyandang status pemain Timnas Indonesia yang mendapat pujian dari suporter namun tidak menjamin suksesnya karir mereka. Beberapa pemain diaspora ini malah kesulitan mendapat tempat di klubnya hingga akhirnya dilepas dan berstatus pengangguran.

Sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia akan berstatus tanpa klub di musim panas 2025-2026. Mereka meninggalkan klub lama tanpa memiliki kepastian klub baru yang akan dibela.

Ada yang memang kontraknya berakhir dan tak diperpanjang, namun beberapa karena kedua belah pihak sepakat ingin berpisah.

Klub-klub Liga 1 Indonesia telah menyiapkan skuad timnya untuk musim 2025-2026. Dari sejumlah nama yang masuk, belum ada satupun pemain abroad

dari Timnas Indonesia yang masuk tim. Persib Bandung yang disebut-sebut menggandeng Nathan Tjoe A On ternyata lebih memilih kiper Dukagjini, Cyrus Margono.

Di musim ini Persib Bandung berencana menggaet beberapa nama pemain Timnas Indonesia yang berstatus abroad. Namun dari sekian nama hanya ada nama Saddil Ramdani.

Meski sempat memperkuat klub Sabah Malaysia namun Saddil Ramdani telah lama tidak masuk skuad Timnas Indonesia. Sebaliknya Persib Bandung malah mengincar kiper Cyrus Margono

yang sekarang memperkuat Dukagjini Kosovo daripada mengincar beberapa pemain Timnas Indonesia lainnya.

Beberapa klub Liga 1 Indonesia sepertinya cukup berminat kepada para pemain ini. Diantaranya Persib Bandung, Bhayangkara Presisi FC, Dewa United serta Bali United.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui bahwa dirinya tertarik menggunakan jasa pemain keturunan Timnas Indonesia.

Ia menilai beberapa dari mereka memiliki kualitas mumpuni dan cocok untuk memperkuat skuad Maung Bandung.

Nama-nama seperti Shayne Pattynama, Jordi Amat, Thom Haye, Rafael Struick, hingga Justin Hubner saat ini sedang berstatus bebas transfer dan berpeluang digayet klub-klub Liga 1, termasuk Persib.

Namun, Bojan menyebut untuk mendatangkan mereka bukan perkara mudah, terutama karena tuntutan gaji yang cukup tinggi.

"Saya tidak pernah menyaksikan pertandingan mereka, termasuk banyak pertandingan sebelumnya. Tentu saja mereka punya kualitas untuk bermain di Persib, tapi banyak dari mereka yang terlalu mahal." ujar Bojan. ●



pengganti David da Silva atau Ciro Alves di lini depan Maung Bandung.

Sementara Thom Haye belum juga memberikan kesepakatan atau mengumumkan tentang klub mana yang diperkuatnya.

"Ya mungkin orang menemukan jawaban agak mengecewakan. Tapi saya masih belum dijelaskan mana klub yang saya akan bergabung," kata Haye dari laman The Haye Way.

Selain itu, saat ini kondisi bursa transfer cukup dinamis dan dia harus benar-benar siap dalam semua kondisi.

"Saya melihatnya berulang kali dalam karir saya dan juga pemain lain. Saya sudah cukup tenang dan kita akan melihat bagaimana perkembangan di pasar, jadi anda melihat ada lebih banyak traksi," ujarnya. ●



BERSINAR BERSAMA TIMNAS NILAI PASAR NAIK DRASTIS

Kesuksesan Timnas Indonesia melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ikut memberi dampak positif pada pemain. Setelah bermain baik di klub dan tim nasional, nilai pasar para pemain juga ikut melonjak.

Sosok yang paling mencolok adalah Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes yang kini menjadi pemain termahal di skuad Garuda dengan nilai pasar mel-

onjak tajam mengalahkan Mees Hilgers. Jay Idzes menjadi pemain termahal di Asia Tenggara dengan nilai hingga Rp 130,36 miliar.

Selain Jay Idzes, beberapa pemain Timnas Indonesia lainnya juga ikut naik seperti Beckham Putra dan Rizky Ridho. Sedangkan Mees Hilgers nilainya masih tetap tinggi meski kini di bawah Jay Idzes,

Market Value Jay Idzes melonjak tajam dari Rp 86,91 miliar menjadi Rp 130,36 miliar mengalahkan Mees Hilgers sekaligus menjadi pemain Indonesia dengan market value tertinggi di Asia Tenggara.

Untuk posisi dua ada Mees Hilgers dengan MV Rp 112,98 miliar lalu posisi tiga ada Kevin Diks dengan MVRp 86,91 miliar. Nilai ini berdasarkan update Transfermarkt pada 17 Juni lalu.

Ada beberapa hal yang membuat Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes

nilainya melonjak tinggi. Bek Timnas Indonesia tersebut masuk dalam tiga besar pemain bertahan yang berusia U25 soal 'defensive duels won' dari tujuh top Liga Eropa.

Dimana Jay Idzes mencatatkan 179 duel yang dimenangkan. Pemain yang kini berusia 25 tahun ini hanya kalah dari Diego Coppola (Hellas Verona) dan Enzo Boyomo (Osasuna).

Menariknya Jay Idzes unggul dari bek-bek ternama seperti Illya Zabarnyi yang merupakan bek Bournemouth serta Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen.

Imbasnya beberapa klub mulai mengajukan penawaran terhadap kapten klub Venezia. Meski klub terdegradasi ke serie B namun permainan Jay Idzes masuk kelas A.

Kini selain Udinese dan Bologna, Fiorentina juga dikabarkan ikut "bermain" untuk Jay Idzes.



Menariknya, menurut situs Transfermarkt, peluang Jay Idzes bergabung ke Fiorentina mencapai 68 persen.

Bursa perekrutan Jay Idzes sepertinya tak kunjung selesai dan tanpa kepastian. Bahkan kini probabilitas berlabuh ke Fiorentina pun mulai menurun



persentasenya.

Meski demikian media meyakini kans Jay Idzes beberapa hari ke depan bakal makin bisa mengemuka lagi, dengan Fiorentina, Bologna dan Udinese tetap jadi kandidat terkuatnya.

Di saat penawaran ke Torino diperkirakan mulai menurun, kini Lecce bakal jadi klub terbaru yang akan memajukan negosiasi di bursa.

Yang mengejutkan, nama klub Aston Villa pun kini diseret masuk dalam rumors sebagai salah satu klub yang juga tertarik dengan "Bang Jay".

Diburu Banyak Klub

Pemain lain yang meningkat tajam adalah Dean James dengan biaya sebesar €2 Juta. Kabar terhangat, Aek Athens saat ini tengah bernegosiasi dengan Go Ahead Eagle untuk pemain Timnas Indonesia tersebut.

Dean James dikabarkan tak akan sendiri, Aek Athens Saat ini sedang mengincar dua pemain Go Ahead yaitu Olivier Antman (23) dan juga Dean James (25).

Pemain Timnas Indonesia ini tampil solid di Eredivisie musim 2024/25. Dari 31 laga yang dijalani James mengemas 2 gol dan 3 assist. Meski menjadi pemain belakang namun ia rajin membantu serangan, dimana akurasi operannya mencapai 78 persen serta mampu melakukan 52 intersep.

Melihat penampilannya kini nilai pasar



Dean James meningkat tajam dari Rp 9,56 miliar naik jadi Rp 31,29 miliar atau lebih dari 100 persen.

Sedangkan Kevin Diks juga ikut melonjak tajam di pasaran setelah direkrut Borussia Monchengladbach. Klub Liga Jerman ini resmi umumkan perekrutan bek kanan Timnas Indonesia, Kevin Diks (28/RB) dari FC Copenhagen. Tanda tangan kontrak telah dilakukan, dan Diks akan bermain untuk Borussia Monchengladbach pada Bundesliga musim 2025/26.

Pemain berdarah Maluku ini sangat senang karena masa depannya jelas. Mengingat sebelumnya, nasibnya di FC Copenhagen sempat masih abu-abu karena kedua pihak belum menemukan titik cerah. Padahal, kontraknya berakhir pada Juni 2025.

Kevin Diks mengatakan kalau saat ini bisa lebih fokus lagi bermain di Danish Superliga hingga 30 Jun 2025, dan baru kemudian pindah ke Bundesliga per 1 Juli 2025.

Sebelum bermain untuk Copenhagen, Kevin Diks adalah mantan pemain milik klub Vitesse dan Fiorentina, dan juga pernah jadi pemain pinjaman ke

klub Feyenoord, Empoli dan AGF.

Pemain Timnas Indonesia lain yang mendadak melesat di Transfermarkt adalah Beckham Putra. Seperti diketahui pelatih Patrick Kluivert memanggil Beckham Putra ke Timnas Indonesia. Pemanggilan dadakan Beckham Putra ini dilakukan karena Septian Bagaskara alami cedera.

Ini adalah pemanggilan perdana untuk pemain Persib Bandung tersebut. Namun imbas yang diterima cukup besar. Ia kini menjadi salah satu pemain termahal di Liga 1 Indonesia. Nilai pasar Beckham Putra yang awalnya Rp 869,07 juta kini naik pesat jadi Rp 5,21 miliar. ●

Berikut para pemain Timnas Indonesia yang mengalami lonjakan harga di Transfermarkt sepakbola saat ini :

JAY IDZES
Rp 15,64 miliar naik menjadi Rp 130,36 miliar
KEVIN DIKS
Rp 69,53 miliar naik menjadi Rp 86,91 miliar
DEAN JAMES
Rp 9,56 miliar naik jadi Rp 31,29 miliar
MAARTEN PAES
Rp 26,09 miliar naik Rp 31,29 miliar
RAGNAR ORATMANGOEN
Rp 7,82 miliar naik Rp 10,43 miliar
RIZKY RIDHO
Rp 2,17 miliar naik menjadi Rp 9,56 miliar
BECKHAM PUTRA
Rp 869,07 juta naik pesat Rp 5,21 miliar

PELOPORI TURNAMEN ANTARPARPOL, JADI MODEL NASIONAL

Provinsi Sumatera Selatan kembali mencetak sejarah sebagai pelopor kegiatan yang memajukan dunia olahraga dengan politik secara elegan. Untuk pertama kalinya di Indonesia, turnamen sepak bola antarpengurus partai politik digelar dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang.

Turnamen ini menandai inovasi baru dalam membangun komunikasi lintas partai. Melalui sepak bola, Sumsel membuktikan bahwa dinamika politik tak harus melulu dalam bentuk debat, tetapi juga bisa lewat kerjasama dan sportivitas di lapangan.

"Saya bangga Sumsel menjadi yang pertama. Ini bentuk kreativitas dalam mempererat hubungan antar partai sekaligus mendekatkan politik ke rakyat," kata Herman Deru dalam sambutannya.

Ia menyebut kegiatan ini merupakan simbol dari demokrasi yang sehat dan inklusif. Menurut Herman Deru, pertandingan ini menjadi sarana membangun solidaritas untuk bersama-sama menyukseskan agenda pembangunan daerah.

"Kita bertanding bukan untuk saling

menjatuhkan, tapi untuk saling mengenal dan menguatkan," ungkapnya.

Gubernur Herman Deru juga menekankan agar kegiatan ini tidak berhenti sebagai ajang seremonial, tetapi bisa berkelanjutan dan menjadi kalender tetap dalam agenda politik yang sehat.

"Kalau bisa ini jadi agenda tahunan, bahkan bisa dijadikan turnamen regional antar provinsi," ujarnya.

Ia juga menekankan kepada peserta dan penyelenggara untuk menjaga nilai-nilai fair play, semangat kekeluargaan, serta tidak membawa rivalitas politik ke lapangan.

"Lapangan ini tempat kita bersatu, bukan bertanding untuk superioritas partai. Kita satu dalam tujuan untuk membangun Sumsel," tegas Herman Deru.

Kepala Kesbangpol Sumsel, HM



Alfajri Zabidi, menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan bentuk pendekatan persuasif pemerintah dalam membina hubungan antar partai.

“Dengan metode partisipatif seperti ini, politik tidak terasa menegangkan. Justru terasa menyenangkan,” katanya.

Turnamen ini diikuti oleh empat partai politik: Partai NasDem, PKS, PDIP, dan Golkar. Pertandingan berlangsung selama tiga hari, dari 9 hingga 11 Juli 2025, dengan total hadiah sebesar Rp50 juta.

Pemenang turnamen akan mendapatkan penghargaan berupa uang tunai. Juara 1 memperoleh Rp20 juta, juara 2 Rp15 juta, juara 3 Rp10 juta, dan juara 4 Rp5 juta.

Ajang ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang serupa dalam membangun komunikasi politik yang lebih inklusif dan positif.

Satukan Spirit dan Generasi Muda Sumsel

Sebelumnya Pemprov Sumsel juga menggelar dua ajang olahraga bergengsi digelar serentak di Sumatera Selatan sebagai upaya mempererat silaturahmi. Gubernur H. Herman Deru membuka Porprov Korpri 2025 sekaligus menutup Turnamen Sepak Bola U-15 Piala Gubernur Sumsel di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang.

Kehadiran ribuan ASN dan atlet muda dari berbagai kabupaten/kota menciptakan suasana semarak dan penuh semangat. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Sumsel serius membangun budaya olahraga dari dua line sekaligus yakni aparatur negara dan generasi muda.

Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa Porprov Korpri merupakan awal dari langkah besar menuju Pornas Korpri XVII yang akan diselenggarakan di Sumsel pada Oktober 2025. Ia meminta seluruh ASN menunjukkan komitmen dan sportivitas tinggi sebagai bagian dari integritas pelayanan publik.

“ASN harus sehat secara jasmani dan rohani. Kompetisi ini membentuk karakter kuat dalam menghadapi tan-



tangan kerja dan kehidupan,” ucap Gubernur Deru.

Sementara itu, Turnamen U-15 juga mendapat sorotan. Dengan format kompetisi yang ketat, ajang ini melahirkan talenta muda berkualitas. Ogan Ilir sukses keluar sebagai juara dan berhak membawa pulang piala bergilir, piala tetap, serta uang pembinaan Rp40 juta.

Palembang, Muara Enim, dan Musi Banyuasin juga tampil impresif dengan meraih peringkat dua hingga empat. Setiap tim mendapat piala tetap serta dana pembinaan sebagai motivasi pengembangan bakat di daerah masing-masing.

Kepala Dispora Sumsel Rudi Irawan,

Porprov Korpri 2025 diikuti lebih dari 1.500 atlet ASN dengan dukungan ratusan pelatih dan official. Sebanyak 12 cabang olahraga dipertandingkan di berbagai venue termasuk Jakabaring Sport City, selama lima hari ke depan.

Porprov Korpri tidak hanya ajang prestasi, tapi juga pembinaan solidaritas dan gaya hidup aktif bagi ASN.

“Ajang ini memperkuat sinergi internal di pemerintahan, serta menunjukkan ASN bisa menjadi teladan gaya hidup sehat,” ujar Rudi.

Gubernur juga menitipkan pesan agar seluruh juri dan wasit menjunjung tinggi sportivitas dan integritas selama pelaksanaan pertandingan. •



LAUNCHING MASKOT DAN LOGO PORPROV XV DAN PEPARPROV V SUMSEL 2025

Semangat pelaksanaan Porprov XV dan Peparprov V di Kabupaten Musi Banyuasin terus digalakkan. Wakil Gubernur Sumsel H.Cik Ujang bersama Bupati dan wakil Muba secara resmi meluncurkan maskot dan logo Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV dan Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov) V Sumatera Selatan Tahun 2025.

Peluncuran ini berlangsung semarak pada Sabtu malam (28/6/2025), bersamaan dengan Malam Puncak Festival Kuliner Kitek Nia 2025 "The Taste of Musi Banyuasin" di Jalan Depan Rumah Dinas Bupati Muba.

Ribuan masyarakat memadati lokasi acara, menyambut penuh antusias ajang peluncuran yang menandai dimulainya perjalanan Muba sebagai tuan rumah dua perhelatan olahraga terbesar tingkat provinsi ini.

Bupati Muba HM Toha SH mengatakan Muba siap menjadi tuan rumah yang ideal untuk Por-

prov XV dan Peparprov V Sumsel, dan peluncuran maskot dan logo ini bukan hanya bentuk kesiapan teknis, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat ekonomi lokal melalui sinergi dengan UMKM dan sektor pariwisata.

"Kabupaten Musi Banyuasin telah siap menjadi tuan rumah Porprov XV dan

Peparprov V. Kami menargetkan sukses penyelenggaraan secara teknis dan administratif, dengan venue yang telah disiapkan sesuai standar,"

tegasnya. Selain itu, Bupati menegaskan target utama Muba bukan hanya sukses

acara, tetapi juga meraih juara umum dalam perolehan medali.

Adapun enam target besar Muba sebagai tuan rumah, yakni sukses penyelenggaraan teknis dan administratif dengan seluruh venue siap digunakan sesuai standar, juara umum, kampanye visual yang kuat melalui logo, maskot, dan promosi digital masif, kolaborasi erat antar pemangku kepentingan.

Kemudian peningkatan ekonomi lokal dan infrastruktur melalui dukungan sponsor dan CSR perusahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM lokal dalam menyelenggarakan event olahraga berskala besar.

Peluncuran logo dan maskot ini dikemas dalam Festival Kuliner Kitek Nia, yang berlangsung sejak 26-28 Juni dengan menghadirkan 136 stand



UMKM kuliner secara gratis.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Muba, Dr M Fariz menerangkan bahwa festival ini menjadi bagian dari upaya awal menginventarisasi penggerak ekonomi lokal untuk mendukung perhelatan Porprov.

"Kami siapkan semua secara transparan dan akuntabel. Saat ini progres venue sudah mencapai 80 persen," jelasnya.

dan semangat sportifitas. Muba punya perangkat penting untuk mewujudkan kesuksesan Porprov dan Peparprov," ujarnya.

Wagub mengajak semua pihak menjadikan momentum ini untuk terus memajukan Sumsel, khususnya dari sisi kuliner dan olahraga.

Peluncuran logo dan maskot ditandai dengan penekanan sirine Bupati Muba

Bupati Musi Banyuasin begitu meriah disaksikan oleh masyarakat pecinta kuliner. Kegiatan ini dalam menyambut pelaksanaan Porprov XV dan Peparprov Sumsel 2025.

Jelang weekend panjang, terhitung dari tanggal merah di hari Jum'at, Sabtu dan Minggu. Masyarakat Muba akan dimanjakan dengan berbagai macam kuliner untuk mengisi libur panjangnya. Tak tanggung-tanggung stand kuliner yang berjejer di Depan Rumah Bupati ini menghadirkan sebanyak 136 UMKM yang ada di Muba.

Bahkan di malam puncaknya nanti, pada Sabtu malam (28/6/2025). Festival kuliner jelang diluncurkan Maskot Porprov-Peparprov dipastikan akan membawa positif peningkatan ekonomi dan jiwa kewirausahaan masyarakat. Termasuk tampilnya Dide Irawan Hijau Daun, yang tentunya siap menghibur masyarakat Muba.

"Pemotongan pita ini menjadi sebuah tanda bahwa telah dilakukan pembukaan Festival Kuliner Kitek Nia Tahun 2025 The Taste of Musi Banyuasin. Alhamdulillah dengan adanya festival kuliner ini dapat membantu para UMKM untuk mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat. Yang juga bisa bisa menaikkan omset para UMKM," kata Bupati HM Toha saat mengunjungi seluruh stand kuliner.

Disampaikan Bupati Muba bahwasanya, Kabupaten Muba juga memiliki berbagai macam kuliner yang menarik dan unik serta cita rasa enak. Melalui festival kuliner ini menjadi langkah tepat untuk mempromosikan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Semoga melalui festival kuliner ini Kabupaten Muba bisa maju lebih cepat dan mendorong para UMKM untuk terus berkreasi, sehingga potensi-potensi ekonomi dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat," ungkap Toha. ●



la juga menyebutkan bahwa sekitar 6.000 atlet dan ofisial dari seluruh Sumsel akan hadir di Muba pada 18-31 Oktober (Porprov) dan 1-7 November 2025 (Peparprov).

"Beberapa test event seperti Bupati Cup bulutangkis, pencaksilat, voli dan balap motor sudah dan akan digelar untuk memastikan kesiapan," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang menyampaikan apresiasi tinggi atas persiapan matang yang dilakukan Muba.

"Dua ajang ini bukan hanya tentang kompetisi, tapi juga tentang persatuan

bersama para tamu kehormatan. Acara kemudian ditutup meriah dengan penampilan artis ibu kota, Dide Hijau Daun.

Gelar Festival Kuliner Kitek Nia

Festival Kuliner Kitek Nia Tahun 2025 dengan tema The Taste of Musi Banyuasin yang berlangsung di sepanjang jalan depan rumah dinas





BANK DKI BERUBAH JADI BANK JAKARTA

Bank DKI resmi berganti nama dan logo menjadi Bank Jakarta yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta.

Rebranding ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam menyiapkan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta roadmap jangka panjang menuju Initial Public Offering (IPO).

Perubahan ini juga menandai dimulainya fase baru transformasi PT Bank DKI menuju arah yang lebih modern, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional dan regional.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur, Rano Karno, berharap, transformasi Bank DKI menjadi Bank Jakarta dapat menjadi lebih profesional serta dipercaya publik.

"Saya bersama Bang Doel menaruh harapan yang tinggi kepada Bank Jakarta untuk mentransformasi diri menjadi bank profesional dan dipercaya publik serta mempersiapkan diri IPO pada tahun depan," ujar Pramono saat peluncuran nama baru dan logo Bank Jakarta di Taman Literasi Martha Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, Minggu, 22 Juni 2025.

Selaku pemegang saham mayoritas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan seluruh jajaran direksi dan komisaris Bank Jakarta meningkatkan predikat melalui IPO. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan penambahan modal sekitar Rp3 triliun agar cita-cita Bank Jakarta naik kelas bisa tercapai.

"Profesionalisme menjadi kata kunci untuk membangun Bank Jakarta dan dikelola oleh orang-orang perbankan," terang Pramono.

Mantan Sekretaris kabinet Indonesia

Maju ini menyatakan, Bank Jakarta akan membangun kantor representatif dan membanggakan bagi warga Jakarta.

"Bahkan, saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan, kalau itu bisa jadi tempat Bank Jakarta, saya meyakini itu akan membanggakan warga Jakarta," tuturnya.

Pramono dan Rano Karno juga menaruh harapan yang tinggi kepada Bank Jakarta untuk menjadi bank profesional dan betul-betul dipercaya publik.

"Tugas utama direksi dan jajaran Bank Jakarta adalah mempersiapkan diri untuk IPO tahun depan. IPO hanya akan

tuk mempertahankan identitas daerah dalam bank milik daerah," ujar Pramono.

Nama tersebut dipilih karena bersifat sederhana, universal, dan mudah dikenali, serta memosisikan Jakarta setara dengan kota-kota finansial dunia.

Identitas visual baru Bank Jakarta tetap mempertahankan simbol Monumen Nasional (Monas), yang digambarkan dengan tiga garis diagonal tanpa lingkaran pembatas.

"Logo baru menyerupai api Monas yang menjulang bebas ke langit, melambungkan aspirasi Jakarta yang tak terbatas ruang dan waktu menuju pang-



tercapai jika bank dikelola secara profesional," ujarnya.

Pramono menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap bank milik daerah tersebut agar transparansi terjaga dan target IPO terpenuhi. Ia berharap Bank Jakarta selain menjadi kebanggaan Jakarta, tapi juga mampu bersaing secara global.

Pramono juga menjelaskan, nama Bank Jakarta dipilih sebagai representasi identitas baru Jakarta di panggung global.

"Call name Jakarta merupakan aspirasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham pengendali un-

gung global," jelas Pramono.

Dari sisi warna, logo Bank Jakarta kini mengusung palet merah jingga sebagai warna utama, menggantikan merah sebelumnya.

Warna merah jingga dipilih karena dinilai lebih merepresentasikan karakter Jakarta dan budaya Betawi penuh semangat, kreatif, dan optimis. Sedangkan, warna hitam digunakan sebagai fondasi untuk menunjukkan kepercayaan dan kredibilitas institusional.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo, menyatakan, pemilihan momen peluncuran yang bertepatan dengan HUT Jakarta memiliki makna

simbolis.

"Kami memilih hari ini (22 Juni 2025) agar semangat perubahan Bank DKI berkorelasi langsung dengan semangat transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif, modern, dan berdaya saing tinggi," jelasnya.

Dia memaparkan, rebranding nama dan logo baru Bank Jakarta mencerminkan arah, semangat, dan komitmen baru yang lebih kuat.

Menurut Agus, selama enam dekade berdiri, Bank DKI telah tumbuh melayani warga Jakarta sebagai bank pembangunan daerah yang kokoh.

Namun, seiring perubahan zaman, ekspektasi masyarakat semakin tinggi, perkembangan teknologi bergerak cepat dan kompetisi meluas, tidak hanya dari bank lain tetapi juga perusahaan teknologi finansial yang inovatif dan agresif.

"Untuk itu, kami harus bertransformasi dimulai dari identitas. Inilah latar belakang dari keputusan melakukan rebranding sebagai simbol bahwa Bank DKI siap menatap masa depan dengan cara baru yang lebih kuat, adaptif dan profesional," paparnya.

Agus menambahkan, rebranding tidak berdiri sendiri, tapi juga bagian dari langkah yang berkelanjutan, yakni transformasi digital untuk menghadirkan layanan berbasis ekosistem.

Kemudian, perbaikan proses bisnis untuk peningkatan produktivitas, kualitas kredit dan dana murah; penguatan manajemen risiko serta tata kelola modernisasi infrastruktur IT dan keamanan cyber. Termasuk penguatan budaya kerja berbasis nilai EPIK, yaitu excellent, profesionalisme, integrity, customer focus, dan collaboration.

"Semua langkah ini berujung pada satu tujuan besar, yakni mewujudkan Bank DKI sebagai institusi keuangan yang tumbuh sehat, dipercaya, dan berdaya saing tinggi," tegasnya.

Agus menambahkan, rebranding ini bukan hanya perubahan visual, tetapi mencerminkan transformasi menyeluruh yang sedang berlangsung di tubuh Bank Jakarta, meliputi penguatan tata kelola, risk management, dan budaya kerja profesional; akselerasi transformasi digital dan integrasi layanan berbasis ekosistem; modernisasi infrastruktur IT

dan peningkatan keamanan siber; dan penguatan fungsi intermediasi, produktivitas kredit, serta akuisisi dana murah secara berkelanjutan.

"Kami ingin masyarakat Jakarta merasakan bahwa perubahan ini bukanlah kosmetik, tetapi mencerminkan komitmen mendalam untuk menjadi bank yang kuat secara finansial, sehat dalam tata kelola, dan hadir secara nyata dalam

Depan', sebuah ajakan kolektif untuk tumbuh bersama, berdaya saing tinggi, dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan," katanya.

Sekretaris Perusahaan PT Bank DKI, Arie Rinaldi, menjelaskan, penggunaan nama dan logo baru 'Bank Jakarta' akan diterapkan secara bertahap dan dalam masa transisi masih akan digunakan bersama dengan identitas sebelumnya.



kehidupan masyarakat," ungkap Agus.

Agus menyampaikan, peluncuran Taman Literasi Blok M merepresentasikan ruang publik yang hidup, inklusif, dan mencerdaskan. Menurut Agus, taman ini menggambarkan esensi dari peran baru Bank Jakarta, yakni memberdayakan, menginspirasi, dan membangun kepercayaan dari akar masyarakat.

"Ini juga sejalan dengan tagline baru Bank Jakarta 'Membangun Masa

"Semua hubungan hukum dengan nasabah dan mitra tetap berjalan normal dan tidak mengalami perubahan," ucapnya.

Dengan peluncuran ini, PT Bank DKI menegaskan tekadnya untuk melangkah lebih jauh sebagai Bank Jakarta, sebuah institusi keuangan yang tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi juga hadir dengan semangat pelayanan publik, relevansi digital, dan visi keberlanjutan. ●

ALAMAT PANEL SURYA KIAN MERAJALELA

Salah satu bisnis yang berpotensi akan berkembang pesat di Indonesia adalah industri panel surya (solar cell). PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI) mengibarkan bendera sebagai salah satu pemain kunci industri perlengkapan untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) itu.

Baru peluncuran halus (soft launching) pada Oktober 2024, Trina Mas Agra Indonesia resmi beroperasi pada Juni 2025. Menteri Perindustrian (Men-

surya dalam satu lokasi itu merupakan salah satu upaya membentuk ekosistem industri pendukung energi baru terbarukan nasional. Maklum saja, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, menggariskan, pemerintah menargetkan pemenuhan pasokan dari sumber energi terbarukan mencapai 52,8 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, kata Menperin, sekitar 17,1 GW ditargetkan akan bisa dipasok dari PLTS pada 2034 mendatang.

RUPTL 2025-2034, menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), yang 76 persen atau 52,9 GW di antaranya berasal dari EBT dan storage. Rinciannya, Pembangunan tenaga surya direncanakan sebesar 17,1 GW, tenaga hidro 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, nuklir 0,5 GW dan storage 10,3 GW.

visi pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih demi masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sedangkan Menperin Agus menyatakan, upaya mewujudkan pasokan dari energi baru terbarukan tersebut, kata dia pula, maka menjadi urgensi bagi Indonesia untuk mendapat sumbangan dari industri panel surya dalam negeri. Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kata dia, daya saing produk modul surya buatan dalam negeri yang masih tertinggal dibandingkan dengan produk impor.

"Harga PLTS lokal masih 30 sampai 45 persen lebih tinggi dibanding produk impor," katanya. Mengenai daya saing harga ini Menperin mengemukakan perhatian dan harapan melalui pendiri pabrik agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri itu.

Pabrik solar panel yang terintegrasi dengan perakitan modul panel surya tersebut, kata dia, diharapkan mampu menjawab ketergantungan terhadap produk impor. "Industri panel surya ke depan diharapkan tidak hanya sebatas sebagai pemasok teknologi, namun juga menjadi katalis untuk terciptanya industri terbarukan yang berdaulat," katanya.

Sedangkan Wakil Presiden Direktur PT Trina Mas Agra Indonesia Lokita Prasetya mengatakan, pabrik ini memiliki kapasitas produksi sebesar 1 GB per tahun dengan daya yang dihasilkan mencapai 720 Wp per panel. Pabrik dengan nilai investasi mencapai Rp1,5 triliun tersebut, kata dia, ditargetkan mampu meningkatkan produksi hingga 3 GW per tahun.

Pabrik teknologi panel.modus surya terbesar ini, ujar dia lagi, siap mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Seiring dengan tumbuhnya ekosistem energi baru terbarukan, Lokita meyakini biaya produksi penyediaan pembang-



perin) Agus Gumiwang Kartasasmita meresmikan pembukaan pabrik solar sel dan modul panel surya terbesar di Indonesia itu di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah.

Di acara peresmian Menperin Agus Gumiwang mengemukakan, keberadaan pabrik yang terintegrasi antara produksi solar sel dan panel

Nah, dalam peluncuran halus akhir tahun lalu, terungkap pabrik TMAI dirancang untuk memenuhi kebutuhan panel surya di pasar domestik dan internasional. Dengan fasilitas produksi yang terintegrasi dan berteknologi tinggi, pabrik ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem energi terbarukan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan

kit listrik ini akan semakin mudah dan berkualitas.

Pada peluncuran halus, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan melalui perusahaan patungan antara PLN Indonesia Power Renewables dengan Trina Solar Co Ltd dan PT Dian Swastatika Sentosa yaitu PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI), siap memproduksi modul panel surya terintegrasi dengan teknologi mutakhir yaitu Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon). Dengan teknologi yang belum pernah diterapkan di industri panel surya dalam negeri tersebut, efisiensi mencapai 23,2 persen dari rata-rata saat ini di Indonesia 20 persen.

"Pabrik ini dikembangkan bersama dengan perusahaan tier-1 industri solar panel dunia dan diharapkan mampu memenuhi permintaan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Dengan teknologi N-type Topcon yang telah memenuhi standar bankability AAA dari Bloomberg New Energy Finance (BNEF), produk yang dihasilkan memiliki efisiensi dan keandalan yang tinggi, ini membuktikan keseriusan kami membangun industri EBT," ujar Edwin.

Sebagai catatan, peresmian pabrik TMAI ini merupakan realisasi dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU, Memorandum of Understanding), antara PT PLN (Persero) dengan sembilan perusahaan asal China dalam kerja sama pengembangan EBT di Indonesia pada Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing, China. Penandatanganan MoU oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dalam lawatannya ke Tiongkok pada 15 - 18 Oktober 2023.

Sembilan perusahaan tersebut meliputi State Grid Corporation of China (SGCC) dan Trina Solar China dalam pengembangan smart grid sebagai backbone kelistrikan energi bersih di Indonesia dan tujuh perusahaan lainnya yakni The Export-Import Bank of China, Sinosure, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, State Development & Investment Corp. Ltd, Huawei Tech Investment, dan China Energy International Group dengan total nilai valuasi kerja sama (termasuk



pendanaan) sebesar lebih dari 54 miliar USD.

Kelak kerja sama antara PLN dan SGCC juga mencakup studi bersama dalam pemanfaatan energi terbarukan, penyimpanan tenaga listrik, integrasi jaringan listrik hingga manajemen jaringan cerdas untuk meningkatkan sistem tenaga listrik yang andal, berkualitas dan ekonomis. Sedangkan dengan Trina Solar, PLN melalui PLN Indonesia Power Renewables bermitra dengan Trina Solar, Sinar Mas, dan Agra Surya Energi untuk pembangunan pabrik sel dan panel surya terbesar se-Indonesia di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah.

"Trina Solar ini perusahaan terkemuka dengan teknologi masa depan. Bersama-sama, kami telah meluncurkan joint venture manufaktur Solar PV. Kami akan memperluas kapasitas dan produksi untuk memasok pasar Solar

PV skala besar di Indonesia," ujar Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Ia menjelaskan, pembangunan manufaktur Solar PV di Kendal menunjukkan semangat kolaborasi yang terus diusung PLN. Hal ini semata-mata untuk memaksimalkan potensi energi surya di Indonesia yang sangat besar, mencapai 207 Gigawatt (GW). Kolaborasi seperti ini diharapkan bisa mengakselerasi skenario transisi energi pemerintah Indonesia yang ambisius, dengan target 75 persen penambahan kapasitas energi berasal dari energi terbarukan dan 25 persen sisanya dari gas alam pada 2040.

Selain PLN, Badan Usaha Milik Negara lainnya, PT Pertamina (Persero) juga mengembangkan industri panel surya. Jika BUMN PLN dan Pertamina ikut serta, alamat panel surya kian merajalela. ●



KARAWANG JADI SAKSI HILIRISASI

Jalan hilirisasi sumber daya alam semakin terbentang. Kali ini menyangkut bahan baku mineral nikel menjadi produk industri baterai kendaraan listrik. Kawasan Artha Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat menjadi saksi.

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation dan CBL, Contemporary, Brunp, Lygend. Terima kasih, demikian saya nyatakan dimulai."

Demikian ungkapan Presiden Prabowo Subianto dalam peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat. Prabowo tiba di lokasi acara sek-

tar 13.45 WIB, Minggu siang menjelang petang, pada 29 Juni 2025.

Tampak mendampingi Presiden antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga pejabat daerah setempat. Selanjutnya Presiden mendengarkan sejumlah penjelasan terkait dengan proyek pabrik hilir itu dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, sebelum akhirnya memasuki venue utama acara dan menyampaikan sambutan. Serangkaian dengan itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot turut menyaksikan acara tersebut secara virtual dari Desa Buli Asal, Halmahera Timur, Maluku Utara, lokasi pengembangan hulu proyek hilirisasi nikel ini.

Dalam sambutannya Presiden mengemukakan pentingnya pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Ia juga menyampaikan target swasembada energi di Indonesia akan

mampu dicapai dalam waktu relatif singkat, yakni dalam lima hingga enam tahun ke depan.

"Saya diberitahu oleh para pakar, bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi dan hitungan saya tidak lama. Lima tahun, paling lambat enam tahun, kita bisa swasembada energi," ujarnya.

Sedangkan proyek hilirisasi nikel di Indonesia mengarah ke pembentukan ekosistem baterai mobil listrik terintegrasi. terakup di dalamnya enam proyek industri dari hulu ke hilir. Ada lima proyek yang dikembangkan di Halmahera Timur, sedangkan satu berada di Karawang. Proyek hilirisasi nikel ini melibatkan konsorsium PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), PT Indonesia Battery Corporation (IBC) dan anak usaha Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), raksasa industri baterai global yaitu CATL, Brunp and Lygend (CBL). Konsorsium membentuk perusahaan patungan yakni PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB). CATL sendiri berpusat di Ningde, Fujian, China.

Di Halmahera Timur, ANTAM dan Hong Kong CBL Limited (HK CBL) telah

membentuk PT Feni Halmim (PT FHT) untuk mengembangkan kawasan industri energi baru yang terdiri atas proyek pertambangan nikel, smelter pirometalurgi dengan kapasitas 88.000 ton refined nickel alloy per tahun (2027). Selain itu, tercakup juga produksi smelter hidrometalurgi menghasilkan 55.000 ton Mixed Hydroxide Precipitate per tahun (2028), pabrik bahan katoda Nickel Cobalt Manganese (NCM) sebesar 30.000 ton per tahun (2028), serta fasilitas daur ulang baterai menghasilkan logam sulfat dan lithium karbonat sebanyak 20.000 ton per tahun (2031).

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek hilirisasi nikel dari hulu ke hilir ini menelan investasi sekitar Rp100 triliun. Proyek ini memiliki luas 3.023 hektar (ha) serta mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung, pertumbuhan ekonomi lokal, serta 18 proyek infrastruktur dermaga multifungsi.

Kecuali itu, proyek ini diharapkan bisa menghasilkan daya sebesar 15 gigaWatts per jam (GWh). Proyek ini juga dirancang ramah lingkungan dengan pemanfaatan kombinasi energi seperti PLTU 2x150 MW, PLTG 80 MW, pembangkit dari limbah panas 30 MW, dan tenaga surya sebesar 172 MWp—termasuk 24 MWp di pabrik Karawang.

Proyek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasokan baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi (battery energy storage) baik untuk pasar domestik maupun global. Khusus proyek pabrik baterai lithium ion di Karawang, IBC dan CBL membentuk perusahaan patungan bernama PT Contemporary Ampere Technology Indonesia Battery (CATIB).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut akan hadir bersama Presiden Prabowo untuk meresmikan proyek hilirisasi nikel terintegrasi dari hulu ke hilir itu pada Juni 2025. Di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 23 Mei 2025 Bahlil mengungkapkan groundbreaking Proyek Dragon ini merupakan yang pertama dari sejumlah 18 proyek hilirisasi prioritas.

Dalam kesempatan lain Bahlil yang pernah menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan proyek ini bisa memicu investor lain untuk menanamkan modal

di Indonesia. Peralnya, proyek ini membuktikan bahwa hilirisasi di Indonesia lebih ekonomis. "Pasti negara-negara lain Juga berpikir kalau ini [hilirisasi] semuanya dilakukan di Indonesia, maka biaya produksi akan lebih murah," kata Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa, 24 Mei 2025.

semua dibawa ke pusat," kata Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, Bahlil pun meminta kontraktor untuk melibatkan pengusaha lokal dalam membangun proyek hilirisasi nikel tersebut. Pelibatan itu khususnya dalam pengadaan makanan, sumber daya manusia, hingga pasokan energi seperti BBM. "Jangan pengusaha Jakar-



Sedangkan dalam acara peletakan batu pertama di Karawang Bahlil mengingatkan proyek mega proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) dari hulu ke hilir harus melibatkan pengusaha lokal. Menurut dia, hilirisasi harus menerapkan nilai keadilan, khususnya untuk masyarakat lokal dan pengusaha setempat. "Atas arahan presiden, hilirisasi harus berkeadilan untuk masyarakat daerah dan pemerintah daerah, tidak

yang ada di daerah. Tapi pengusaha daerah yang ada di daerah. Jadikan pengusaha daerah jadi tuan di negerinya sendiri," tandas Bahlil.

Ia juga mengemukakan, selain menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja, dampak berganda proyek di Karawang secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan kepada 35 ribu orang. Jalan terus hilirisasi. Karawang sudah menjadi saksi. ●

TARIF TRUMP MULAI 1 AGUSTUS 2025

Tak ada negara eksportir tujuan Amerika Serikat yang gembira dengan tarif impor Presiden Donald J Trump. Lalu bagaimana?



Mana mungkin Indonesia happy dengan tarif (impor) AS yang keluar pada Senin, 7 Juli 2025. Belum lagi kemungkinan tarif tambahan bagi negara-negara BRICS dua hari kemudian.

Begitulah, pada Senin, 7 Juli 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada pemimpin Indonesia, Bangladesh, Kamboja, dan Thailand mengenai tarif baru bagi ekspor ke AS. Isinya, mulai 1 Agustus, 2025, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap Indonesia, 36 persen terhadap Kamboja dan Thailand, serta tarif 35 persen terhadap Bangladesh.

Seperti halnya kepada negara-negara lainnya, dalam suratnya Trump memperingatkan pula agar para pemimpin empat negara termasuk Indonesia tak membalas kebijakan tarif tadi. Jika membalas, Trump mengemukakan akan mengenakan kenaikan tambahan di atas tarif semula.

Beriringan dengan itu, Presiden Trump dikabarkan mengancam pula akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen bagi negara-negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari kelompok BRICS. BRICS semula merupakan singkatan negara-negara Brazil, Russia, India, China, dan South Africa, yang menjadi penyokong utamanya. Namun, kini BRICS sudah menambah keanggotaan antara lain Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Nah, mengenai BRICS ini, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir menyatakan bahwa pertemuan negara-negara BRICS tidak dimaksudkan sebagai upaya melawan Amerika Serikat maupun kelompok negara manapun. "Sebenarnya, yang pertemuan presiden tidak ada upaya apapun untuk melawan Amerika atau yang lainnya," katanya se usai melepas keberangkatan Presiden menuju Brasilia, di Rio De Janeiro, Brasil, Senin, 7 Juli 2025.

Ia menegaskan bahwa fokus utama pertemuan BRICS adalah memperkuat kerja sama negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan global, bukan membentuk blok tandingan terhadap negara besar manapun. Arrmanatha juga menyampaikan bahwa tidak ada satu pun pembahasan dalam forum

tersebut yang bertentangan dengan kepentingan negara berkembang atau menyerang negara tertentu.

Dari berbagai pemberitaan, Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen kepada negara yang mendukung kebijakan Anti-Amerika dari BRICS. Pernyataan Trump melalui akun media sosial Trust itu disuarakan di tengah pertemuan

saling menimbulkan dampak satu sama lain.

"Dari ketidakpastian arah kebijakan internasional dan yang terutama juga muncul adalah kalau pihak negara itu selalu pasti ada perbedaan, itu bukan sesuatu yang baru perbedaan kepentingan, bedanya adalah bagaimana mekanisme untuk membahas dan menyelesaikannya," kata Sri Mulyani dalam



para pimpinan dan delegasi dalam KTT BRICS yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

Sedangkan dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan situasi global masih terus sangat volatile (labil) dan kompleks. Ia mengemukakan, risiko ini terus muncul akibat kebijakan negara-negara besar terutama AS, Eropa, Jepang, RRC, Rusia dan sekarang BRICS yang kemudian

Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa, 9 Juli 2025.

Bu Menkeu menjelaskan, dahulu, pasca perang dunia ke-II, persetujuan diselesaikan melalui wadah seperti, PBB, IMF, Bank Dunia, WHO, WTO dan lainnya. Namun, dalam perkembangan saat ini, dispute dan perbedaan sulit diselesaikan lagi di dalam lembaga tersebut. "Namun hari-hari ini peranan dari lembaga-lembaga multilateral itu menjadi san-

• INFO EKONOMI

gat lemah atau tidak dihormati," katanya.

Jadi, menurutnya, kondisi global saat ini hampir mirip dengan sebelum perang dunia. Banyak negara-negara dengan kuasa besar yang memaksakan kepentingan dan tujuannya saat ini. "Yang terjadi adalah hampir mirip dengan sebelum perang dunia II yaitu kalau negara punya tujuan dan punya kepentingan. Dia kemudian secara sepihak bisa memaksakan kehendaknya kepada negara lain," tambahnya.

Efek dari kondisi ini, muncul lah ancaman dan invasi militer antar negara. Dia mencontohkan, perang yang terjadi di Ukraina, di Timur Tengah dan perang dagang Amerika Serikat (AS).

AS di bawah kendali Presiden Donald Trump, kata Sri Mulyani, secara eksplisit menyampaikan bahwa persaingan den-

domestik mendesak pemerintah Indonesia segera merumuskan strategi responsif dan antisipatif menghadapi kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sektor industri nasional, khususnya yang bergantung pada ekspor ke Negeri Paman Sam.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan bahwa dunia usaha masih menunggu sikap resmi pemerintah untuk dijadikan acuan bersama dalam menyikapi tekanan tarif tersebut. Ia menyebut tim diplomatik Indonesia masih berada di Washington DC untuk menjajaki jalur negosiasi. "Tenggat im-

melonjaknya biaya produksi, serta permintaan global yang lesu. "Ekspor ke AS memang hanya menyumbang sekitar 10 persen dari total ekspor nasional, namun efek domino terhadap pelaku industri, tenaga kerja, dan stabilitas usaha tidak bisa dianggap ringan," tambahnya.

Jadi, Shinta mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk merespons kondisi ini, antara lain:

- Menerapkan skenario timbal balik dengan mendorong peningkatan impor komoditas strategis asal AS seperti kedelai, kapas, jagung, produk susu, dan minyak mentah;

- Diversifikasi pasar ekspor dengan memperluas jangkauan pasar nontradisional dan meningkatkan efisiensi rantai pasok;

- Reformasi regulasi nasional untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan memperkuat perlindungan terhadap sektor industri terdampak.

"Momentum ini justru bisa menjadi titik tolak untuk mempercepat agenda reformasi struktural, melalui deregulasi menyeluruh dan sinergi antar kementerian dan lembaga," tegasnya.

Senada dengan Apindo, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai tarif 32 persen tersebut sebagai ancaman serius bagi produk ekspor nasional. "Daya saing kita di pasar AS jelas akan terpukul. Sektor padat karya berisiko mengalami penurunan permintaan, bahkan bisa terjadi pengurangan tenaga kerja jika tidak segera diantisipasi," ujar Sarman.

Ia mengajak semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, dunia usaha, maupun asosiasi industri untuk segera duduk bersama menyusun peta jalan mitigasi, termasuk kemungkinan relokasi pasar dan insentif fiskal bagi pelaku ekspor.

Sedangkan di mata pakar Hubungan Internasional Prof Hikmahanto Juwana, penerapan tarif yang akan dimulai pada 1 Agustus 2025 itu bermakna negosiasi Indonesia yang diwakili Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan AS mengenai tarif sudah tidak banyak manfaatnya. "Menurut saya, Pak Menko nggak perlu datang, kalau sudah di Amerika, batalkan pertemuan dengan pihak AS. Kenapa? Karena surat sudah



gan China dianggap sebagai ancaman terbesar di bidang ekonomi dan keamanan. Maka dari itu, AS menerapkan kebijakan ketat untuk China, bahkan sampai ke tarif dagang dan perusahaan China.

Kebijakan yang dilakukan Presiden Trump ini dianggap sebagai langkah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan ancaman terhadap AS. "Inilah yang sedang kita hadapi yang tadinya negara dalam konteks Global bekerja sama di mana satu negara bisa sejahtera dan makmur dengan mengajak negara lain untuk ikut sejahtera. Sekarang kalau satu negara sejahtera, berarti negara lain akan berkorban atau terkorbakan. Zero sum game menjadi dominan," papar Sri Mulyani.

Sedangkan kalangan dunia usaha

plementasi tarif pada 1 Agustus masih membuka ruang diplomasi. Ini adalah momen krusial yang harus dimanfaatkan dengan pendekatan konstruktif," ujar Shinta dalam pernyataan tertulis, Selasa, 8 Juli 2025.

Menurut Shinta, tarif 32 persen yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump mencerminkan dinamika negosiasi dagang yang memanas. Namun jika diterapkan penuh, kebijakan ini dapat menjadi pukulan keras bagi industri padat karya, terutama sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan mainan anak yang selama ini menjadi kontributor utama ekspor Indonesia ke AS.

Ia mengingatkan bahwa dampak tarif ini makin berat karena bersamaan dengan penurunan indeks manufaktur,

dikeluarkan oleh Trump dan mengatakan bahwa Indonesia akan dikenakan 32 persen. Pertanyaannya lalu mau negosiasi apa?" kata Hikmahanto Rabu, 9 Juli 2025.

Ia menambahkan, Trump sudah membuat ancaman yang jelas terhadap negara-negara anggota BRICS. Dia mengatakan RI sebaiknya membatalkan negosiasi dengan AS. "Kedua, ingat ya bahwa Trump sudah mengancam bahwa terhadap negara-negara BRICS akan dikenakan tambahan 10 persen, berarti apa? 42 persen. Pertanyaan kita, lalu apa kita mau menegosiasi mau mengatakan kalau kita akan keluar dari BRICS? Kan tidak mungkin. Oleh karena itu menurut saya, Pak Menko batalkan pertemuan dengan pihak Amerika Serikat, siapa pun itu, kembali," ujarnya.



Yang terjadi adalah hampir mirip dengan sebelum Perang Dunia II yaitu kalau negara punya tujuan dan punya kepentingan.

Hikmahanto memprediksi tarif Trump akan mendapat perlawanan di dalam negeri AS. Dia meminta RI tak panik menyikapi tarif dari Trump. "Nanti kita tunggu saja tanggal 1 Agustus, benar nggak dikenakan? Siapa tahu di Amerika Serikat, kebijakan ini akan dihajar lagi oleh bursa di Amerika Serikat dan akhirnya Trump akan memundurkan lagi. Jadi jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu panik menurut saya, nggak usah panik," ucapnya.

Hikmahanto menyarankan Indonesia membentuk koalisi dengan sejumlah negara untuk menghadapi tarif impor Trump. Menurut Hikmahanto, RI dan sejumlah negara dapat membentuk kesan AS sebagai musuh bersama. "Kemudian, kita yang harus kita lakukan sekarang ini adalah kita berkoalisi, karena memang surat itu dilakukan secara bilateral. Ingat

ya waktu pertama kali dikenakan sekian persen itu diumumkan oleh Trump keseluruhannya yang membuat banyak negara itu menganggap 'Oh kita sekarang punya musuh bersama', common enemy, yaitu Trump. Sehingga banyak yang melawan," sebutnya.

Hikmahanto mencontoh koalisi dapat dibentuk bersama sejumlah negara tetangga. Dia mengatakan perlawanan berbagai negara terhadap tarif Trump dapat membuat situasi di AS bergejolak. "Kalau kita bersatu, berkoalisi, nanti yang akan menderita itu rakyat Amerika Serikat. Karena dia lah yang akan membayar tarif-tarif yang tinggi itu. Jadi sudah biarin saja, nanti rakyat Amerika yang akan menentukan nasib dari Trump, kita tunggu. Sekali lagi yang perlu saya sampaikan, kita tunggu, jangan kemudian kita da-



tang ke sana," tandasnya.

Menko Airlangga memang berencana terbang ke AS untuk menindaklanjuti pengenaan bea masuk resiprokal yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Alasannya, bea masuk resiprokal sebesar 32 persen baru akan diberlakukan pada 1 Agustus 2025, pemerintah berpandangan saat ini masih terdapat ruang bagi kedua pihak untuk bernegosiasi.

"Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia yang baru saja keluar," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Selasa, 8 Juli 2025.

Menurut dia, masih tersedia ruang un-

tuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah AS. "Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan," ujar Haryo.

Sebagai informasi, keputusan AS untuk mengenakan bea masuk resiprokal terhadap barang impor dari Indonesia termuat dalam surat Trump yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Merujuk pada surat tersebut, bea masuk 32 persen akan dikenakan atas seluruh barang impor yang tidak tercakup dalam kebijakan bea masuk sektoral.

Bea masuk yang diberlakukan AS masih lebih rendah bila dibandingkan dengan yang diterapkan atas beberapa negara tetangga seperti Kamboja (36 persen), Laos (40 persen), dan Thailand (36 persen). Na-

mun, bea masuk yang diberlakukan atas Indonesia tersebut tergolong tinggi bila dibandingkan dengan bea masuk yang diberlakukan atas Malaysia (25 persen) dan Vietnam (20 persen).

Trump melalui suratnya pun mengingatkan Indonesia untuk tidak menerapkan retaliasi atas bea masuk resiprokal. "Harap dipahami bahwa bea masuk ini diperlukan untuk mengoreksi kebijakan tarif dan nontarif yang diberlakukan Indonesia selama bertahun-tahun serta hambatan perdagangan yang menyebabkan defisit dagang dengan AS," demikian antara lain isi surat Trump.

Toh penerapan Tarif Trump masih menimbulkan banyak tanda tanya. Semuanya akan lebih jelas setelah 1 Agustus 2025. ●

SIAP-SIAP KOPERASI MERAH PUTIH

Peringatan Hari Koperasi setiap 12 Juli akan berbeda dari biasanya. Kali ini, peringatan Hari Koperasi beriringan dengan pe-luncuran 80 ribu Koperasi Merah Putih.

Di depan para wakil rakyat di Komisi VI DPR, Menteri Koperasi Budi Arie mengungkapkan, pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sudah hampir 100 persen rampung. Dari 80 ribu lebih desa/kelurahan yang telah membentuk koperasi,

saat membentuk koperasi desa/kelurahan merah putih seperti faktor geografis dan perbedaan budaya.

Alhasil, sejumlah wilayah di beberapa provinsi masih belum mampu mencapai angka 100 persen dalam pembentukan koperasi. Ia menyebut, yang belum 100 persen tadi antara lain berada di Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Banten.

Sebelumnya, Budi Arie sudah menyebutkan delapan tantangan Kopdes Merah Putih. "Masa depan gerakan koperasi ada di tangan seluruh warga bangsa. Saatnya kita bergerak dan maju bersama. Delapan tantangan harus kita atasi bersama. Karena kunci

2. Adanya persepsi atau image negatif publik terhadap koperasi karena kasus koperasi bermasalah dan pinjol ilegal berkedok koperasi.
3. Koperasi masih dianggap kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi.
4. Skala ekonomi dan potensi setiap desa berbeda.
5. Kapasitas dan kompetensi SDM di setiap desa berbeda.
6. Kemungkinan adanya elite capture dalam pembentukan dan kepengurusan.
7. Kemungkinan fraud dalam pengelolaan yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel.
8. Potensi keberlanjutan lembaga dan



sambungannya, sebanyak 77.120 sudah berbadan hukum.

"Koperasi desa/kelurahan terdapat 80.560 telah terbentuk. Sebagian besar provinsi 100 persen terbentuk," ujarnya di hadapan anggota Komisi VI DPR RI, Rabu, 9 Juli 2025.

Ia menambahkan, tercatat sudah 77.120 kopdes merah putih memiliki SK badan hukum. Namun, ia mengakui pula beberapa tantangan yang ditemui

kemajuan dan kemandirian koperasi adalah orang (SDM), organisasi, dan sistemnya harus bagus dan kuat," ungkapnya dalam pernyataan resmi pada awal Mei 2025.

Delapan tantangan Kopdes Merah Putih yang ia maksud adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif akan pentingnya koperasi.

usaha koperasi ke depan.

Soal delapan tantangan ini menjadi penting lantaran, kata Budi Arie, Kopdes Merah Putih bergerak di semua sektor, termasuk sektor perumahan. Saat ini, pemerintah mewajibkan tujuh unit usaha yang wajib dijalankan, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudan-

gan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.

"Kita bergerak di semua sektor. Kopdes Merah Putih mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri (Wamen PKP Fahri Hamzah) atau Kementerian Perumahan Rakyat, itu bisa juga untuk perumahan di desa," kata Budi Arie saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

Budi mengatakan keterlibatan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan sudah menjadi pembahasan di dua kementerian tersebut. Meski begitu, Budi menyebut sifatnya masih belum resmi. "Sudah, secara informal kita sudah bicara," jelas dia.

Toh persiapan peluncuran koperasi

dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi.

Hadir dalam rapat ini antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Perwakilan BUMN, Gubernur, Bupati dan Wali Kota

dan diikuti secara daring oleh seluruh daerah, dengan pelatihan pengurus dijadwalkan pada 15-16 Juli 2025.

Nah mengenai kesiapan operasional dan kelanjutan koperasi merah putih, Budi Arie mengemukakan kementeriannya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 5,98 triliun.

Tambahan anggaran itu sebagian besar digunakan untuk fasilitas pendampingan serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) merah putih.

"Kementerian Koperasi mengusulkan total anggaran belanja tambahan di tahun 2025 sebesar Rp 5,98 triliun dengan fokus pada dukungan manajemen sebesar Rp 340 miliar, perkoperasian sekitar Rp 5,6 triliun,"

73 KOPERASI MAJU Indonesia ADIL MAKMUR

seluruh Indonesia.

Hal-hal teknis ikut dibahas di rakor ini. Antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Permenkes terkait soal



merah putih terus berlanjut. Sementara Budi Arie di DPR, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Des/Kel Merah Putih menggelar rapat persiapan launching koperasi desa.

Rapat ini juga membahas tentang pembiayaan dan perizinan apotek dan klinik di koperasi desa. Ferry didampingi oleh Deputy Bidang Kelembagaan

apotek dan klinik di unit koperasinya. Tujuannya, untuk mendukung pembiayaan dan perizinan operasional 103 mock-up (percontohan) di 38 provinsi.

Setiap koperasi merah putih yang menjadi percontohan wajib memiliki gerai sembako, apotek, klinik, koperasi, simpan pinjam, gudang, dan kendaraan logistik. Adapun peresmian nasional akan digelar di Klaten, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025 mendatang

kata Budi Arie.

Budi menerangkan anggaran terbagi menjadi dua skema, yakni reguler sebesar Rp 1,2 triliun dan dekonsentrasi sebesar Rp 4,78 triliun. Apabila usulan tambahan itu disetujui, Budi menyebut total anggaran di kementeriannya mencapai Rp 6,45 triliun.

"Anggaran ditunjukkan untuk melaksanakan tujuh tugas utama sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025 antara

• INFO EKONOMI

lain menyusun model bisnis KD-KMP [Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih], membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan, dan memberikan pelatihan serta pendampingan untuk memperkuat kapasitas Koperasi Desa," terang Budi.

Berdasarkan paparan yang disajikan, anggaran yang dibutuhkan untuk menyusun model bisnis Kopdeskel Merah Putih sebesar Rp 500 juta, menyusun modul pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih Rp 3,9 miliar, inventarisasi koperasi yang ada Rp 30,9 miliar. Selain itu, fasilitas pendampingan edukasi serta pelatihan untuk SDM

ciannya rupiah murni sebesar Rp 85 miliar dan LPDB-koperasi sebesar Rp 226,03 miliar.

"Mengantisipasi program tahun berikutnya, Kementerian Koperasi mengusulkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp7,85 triliun dengan rincian pagu dukungan manajemen sebesar Rp 514,12 miliar dan perkoperasian sebesar Rp7,34 triliun," jelas Budi Arie.

Adapun fokus belanja tahun 2026 akan mencapai 10 prioritas strategis, yaitu penguatan kelembagaan, transformasi digital, pengembangan usaha, peningkatan daya saing, penguatan sektor keuangan, pengawasan kope-

nya.

Menurut Bu Menkeu, dana desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi jaminan dalam pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih. Ia mengatakan jaminan dana desa itu untuk menjaga kehati-hatian perbankan dalam ikut membangun perekonomian di desa. Pasalnya tidak semua desa sudah terampil atau memiliki kapasitas dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

"Kalau ternyata desanya ada yang sudah terampil, bagus, pasti kegiatan ekonominya akan sustainable. Tapi



Kopdeskel Merah Putih mencapai Rp 5,1 triliun, penguatan manajemen digitalisasi Kopdes Rp 220 miliar, sosialisasi masif sebesar Rp 163 miliar, hingga monitoring serta evaluasi Rp 140,6 miliar.

Lebih lanjut, Budi Arie juga meminta tambahan anggaran Rp 7,85 triliun untuk tahun anggaran 2026. Total pagu anggaran untuk 2025, Kementerian Koperasi mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 311 miliar dengan perin-

rasi, pengembangan sumber daya manusia, penguatan data dan informasi, pemberdayaan koperasi di daerah, serta pendanaan koperasi oleh LPDB. Budi menerangkan hal ini merupakan kelanjutan dari langkah besar membangun Koperasi Desa sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan.

Bagaimana dengan kelangsungan usaha koperasi merah putih? Untuk pertanyaan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki jawaban-

kalau desa belum banyak kapasitas, pasti bank-nya akan mengatakan nanti kalau macet seperti apa?" kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu, 9 Juli 2025.

Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah mencoba mengkombinasikan untuk terus menjaga keseimbangan. "Antara kehati-hatian bank untuk ikut membangun dalam perekonomian di desa, namun di sisi lain juga dari sisi menggunakan instrumen APBN sendiri

yaitu menjadi semacam penjamin, dana desanya sebagai penjamin,” tambahnya.

Kementerian Keuangan sendiri mengalokasikan dana desa sekitar Rp 70 triliun per tahun. Dana desa ini merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan di desa.

“Kami di Kementerian Keuangan melalui dana desa yang sekitar Rp 70 triliun per tahun, maka dia bisa menjadi semacam katalis maupun sebagai penjamin sehingga kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehati-hatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” ujar Bu Menkeu.

Sri Mulyani menyebut struktur yang sedang dibahas pemerintah saat ini yaitu bagaimana dana desa dihubungkan dengan koperasi sehingga bisa menjadi milik anggota. Dengan demikian bisa memberikan keyakinan bahwa koperasi tersebut akan dikelola dengan baik.

“Governance yaitu tata kelola, capacity building, struktur laporan keuangan dan lain-lain ini nanti teman-teman yang ada di perbankan harus melakukan PR-nya juga. Jadi mereka akan melihat oh kapasitas ini belum, jadi siapa yang harus bantu dulu supaya koperasi ini bisa benar-benar jalan, tapi koperasinya harus dibangun, harus dibentuk dulu,” jelas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, program Kopdes/Kopkel Merah Putih adalah tanggung jawab bersama yang tujuannya baik. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, ia berharap program itu dapat berjalan dengan baik.

“Ide awalnya adalah di desa itu punya kapasitas untuk memiliki unit usaha yang bisa menjadi sumber pendapatan dan sumber kesejahteraan bagi masyarakat desa tersebut, koperasi kan anggotanya masyarakat desa. Idenya kan bagus untuk itu,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Koperasi Merah Putih, yang juga Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyatakan seluruh persiapan menuju peluncuran program Koperasi Desa (Kopdes) pada 19 Juli mendatang telah hampir rampung. Dalam rapat

koordinasi yang digelar bersama jajaran kementerian dan BUMN, Zulkifli memastikan kesiapan 80 unit mock-up gerai koperasi yang akan menjadi model percontohan.

“Segala persiapan menuju launching tanggal 19 Juli nanti Kopdes ini sudah 100 persen. Tersedia 80 mock-up gerai koperasi yang siap beroperasi,” ujar Zulhas, Rabu, 25 Juni 2025.

Ia menambahkan mulai 1 Juli 2025, platform digital untuk layanan kredit koperasi akan mulai dapat digunakan oleh masyarakat. “Platform pinjamannya sudah bisa digunakan mulai 1 Juli. Ini bukan hanya soal pembiayaan, tapi kemudahan akses digital bagi masyarakat desa,” katanya.

Menko Zulkifli juga menyebutkan perlunya infrastruktur logistik seperti

melalui Kongres Gerakan Koperasi Pertama yang dilaksanakan di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 12 Juli 1947. Kongres ini dihadiri 500 utusan dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Para tokoh pergerakan koperasi ini bersepakat mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) sebagai organisasi tunggal yang menaungi seluruh koperasi di Indonesia.

Penetapan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia baru dilaksanakan berdasarkan kongres kedua pada 15-17 Juli 1953 di Bandung. Pada kongres ini, SOKRI berganti menjadi Dewan Koperasi Indonesia dan penetapan Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Sampai sekarang, koperasi-koperasi



cold storage dan dryer (alat pengering) di beberapa gerai, khususnya di wilayah pertanian dan perikanan. “Dryer dibutuhkan untuk pengeringan gabah dan jagung, sementara untuk sektor kelautan dan perikanan, dibutuhkan cold storage dan kalsurit,” ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan percepatan program Kopdes ini tidak lepas dari dukungan kuat lintas sektor, termasuk kementerian dan BUMN. “Saya laporkan kepada Presiden, ini bisa terjadi bukan karena saya, tapi karena kolaborasi para menteri, dukungan BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, PT Pos, Pertamina, Pupuk Indonesia, dan lainnya. Semua luar biasa,” tegasnya.

Nah, jika melihat sejarahnya, setelah Proklamasi Kemerdekaan, gerakan koperasi yang terpecah disatukan

di Indonesia juga sudah mengalami banyak perubahan sesuai dengan kemajuan zaman. Koperasi juga dibentuk di banyak sektor, seperti pertanian, industri, hingga jasa. Peran mereka tidak hanya dalam perekonomian, tetapi juga dalam pembangunan nasional.

Hari Koperasi Nasional ke-78 pada 2025 menjadi momen yang penting bagi koperasi Indonesia. Melalui peringatan ini, pemerintah akan membangkitkan dan memasifkan kembali koperasi menjadi salah satu penggerak ekonomi.

Selain perekonomian, koperasi juga berperan dalam pembangunan nasional. Koperasi Merah Putih tentu menjadi faktor penting yang akan ikut menentukannya. Selamat Hari Koperasi, semoga Koperasi Merah Putih sukses...•



ZERO ODOL TETAP JADI

Harap maklum, upaya melarang kendaraan yang melebihi ukuran dan volume angkutan (over dimension and overloading, ODOL) tetap diterapkan. Tujuan utamanya mengurangi tingkat kecelakaan.

Malah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, penerapan Zero ODOL lebih cepat lebih baik. Apa pasalnya?

Menhub Dudy menjelaskan jika melihat roadmap atau peta jalan yang disusun oleh pemerintah pada 2017, kebijakan Zero ODOL sudah mundur dari target semula yakni pada 2023. Namun, permintaan penundaan dari berbagai pihak membuat penerapan kebijakan ini kembali mundur.

"Pada dasarnya semulanya ini zero ODOL sudah mundur dari dulu-dulu, tapi ini kita sedang susun kembali dengan pemangku kepentingan (stakeholder)," ujarnya saat diskusi dengan

media di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

la menjelaskan, kebijakan zero ODOL telah lama direncanakan sejak 2009, namun terus mengalami penundaan hingga saat ini. "Mundur mungkin ya, tapi saya harapkan tidak sampai terlalu lama karena kalau sampai (tahun) 2027, itu seperti yang sudah saya bilang, semakin kita mengundur maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak," kata Menhub.

Oleh sebab itu dia menekankan pentingnya percepatan penerapan kebijakan zero kendaraan ODOL demi mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan transportasi jalan nasional. Menhub berharap penundaan tidak berlangsung lama, karena semakin lama ditunda maka potensi kecelakaan lalu lintas akibat ODOL akan terus meningkat.

"Seperti tadi, lebih cepat lebih baik supaya tidak ada korban-korban lagi yang timbul berkaitan dengan ODOL," tegas Menhub.

Sebelumnya Menhub menekankan pentingnya percepatan penerapan kebijakan zero ODOL demi mencegah kecelakaan fatal terulang setelah ter-

catat 6.000 korban jiwa akibat pelanggaran muatan sepanjang 2024. Dia menyebutkan sepanjang 2024 tercatat 27.337 kecelakaan melibatkan angkutan barang, menyumbang sekitar 10 persen dari total kecelakaan lalu lintas nasional yang menjadi sorotan serius pemerintah dalam kebijakan keselamatan transportasi.

Dari seluruh kecelakaan tersebut pelanggaran muatan ODOL, berdasarkan data Jasa Raharja yang menunjukkan tingginya risiko kecelakaan dari praktik kelebihan dimensi dan beban.

"Jumlah yang meninggal yang berkaitan dengan kecelakaan ODOL pada tahun 2024 dari Jasa Raharja sebanyak 6.000-an yang meninggal yang terkait dengan kecelakaan yang melibatkan angkutan barang," kata Menhub.

Menurut dia, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola logistik darat sebab nyawa manusia tidak boleh dikompensasikan demi efisiensi atau keuntungan dalam pengangkutan barang.

Implementasi kebijakan zero ODOL telah dicanangkan sejak 2017. Namun, belum berjalan optimal akibat berbagai



penundaan dan keberatan dari sejumlah pihak. Meski sudah disepakati oleh pemangku kepentingan untuk diterapkan pada tahun 2023, kebijakan zero ODOL terus ditunda sejak 2017 akibat permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku usaha logistik nasional.

Padaحال, lanjut Menhub, regulasi mengenai larangan kelebihan dimensi dan beban pada kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau sejak 16 tahun lalu.

Toh menjelang penerapannya pada 2026, faktor insentif atau imbalan terhadap kepatuhan menerapkan zero ODOL pun menjadi bahan pertimbangan. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan berencana memberi insentif bagi perusahaan angkutan barang yang patuh terhadap aturan zero ODOL.

"Aspek penguatan berikutnya, pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang dan pengelola kawasan industri yang masing-masing menerapkan atau melanggar Zero lebih dimensi dan lebih muatan atau Odol," ungkap Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Yusuf Nu-

groho dalam forum diskusi Zero Odol di Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025.

Selain insentif, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperbaiki kesejahteraan pengemudi truk angkutan barang. Yusuf menyebut salah satu upaya dilakukan dengan menyesuaikan upah sopir dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). "Standard kerja yang layak bagi pengemudi antara lain melalui standarisasi upah pengemudi angkutan barang seperti UMP maupun UMK maupun kesejahteraan lainnya," kata dia.

Yusuf pun mengemukakan, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan

Perpres Penguatan Logistik Nasional yang memuat rencana aksi terkait implementasi zero ODOL. Menurut dia, sudah tersedia rancangan rencana sembilan aksi terkait implementasi penanganan ODOL yang akan tertuang dalam Perpres Penguatan Logistik Nasional.

Dia menyebutkan sembilan aksi tersebut, pertama integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik. "Dengan integrasi itu lebih meningkatkan tingkat akurasi dalam pendataan angkutan barang yang tentunya nanti ditindaklanjuti terhadap kepatuhan dari penyelenggaraan angkutan barang itu sendiri,"



• INFO EKONOMI

kata Yusuf dalam Forum Kramat bertajuk 'Zero ODOL Policy' yang digelar di PBNU Jakarta, Jumat.

Melalui integrasi itu nantinya bila ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam sistem penyelenggaraan transportasi baik kelebihan dimensi dan kelebihan muatan, maka penerapan sanksinya juga bisa melalui sistem elektronik.

"Sistem ini akurasi akan lebih baik tidak berdasarkan subjektif dari sese-

ran dampak penerapan kebijakan zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik, dan inflasi.

Selanjutnya aksi ketujuh penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, antara lain melalui standarisasi upah pengemudi angkutan barang sebagaimana UMP/UMK; aksi kedelapan deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penerapan zero ODOL.

yang memiliki peran penting dalam mendukung penguatan sistem logistik nasional. "Ini semua dikomandoi oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," kata Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga pernah menyinggung soal insentif. Menurut AHY, pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif dan disinsentif agar penertiban truk Odol bisa



orang sehingga pemberian sanksinya pun juga mengena, tepat sasaran," ujarnya.

Aksi kedua yaitu pengawasan, pencatatan, penindakan dan penghapusan pungli di sektor transportasi darat; aksi ketiga penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten-kota, serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik; aksi keempat peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multimoda angkutan barang.

Sedangkan aksi kelima pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang dan pengelola kawasan industri yang masing-masing menerapkan atau melanggar zero ODOL; aksi keenam kajian penguku-

Aksi kesembilan yakni kelembagaan mengenai pembentukan Komite Kerja Percepatan Pengembangan Konektivitas Nasional (KP2KN) sebagai delivery unit lintas sektor untuk percepatan pengembangan konektivitas di seluruh moda transportasi, termasuk logistik.

Penyusunan Rancangan Perpres tentang Penguatan Logistik Nasional itu berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infracwil).

Selain itu, penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, di antaranya Kemenhub, Kemendagri, Kemenperin, Kemendag, Kemen-PU, Polri, serta kementerian lembaga lainnya

berjalan efektif. "Memang ada pembahasan tadi, ada insentif dan disinsentif yang sedang kita hitung supaya ini efektif. Sehingga jangan sampai kita hanya mencegah tapi ada solusi," ujar AHY, Selasa, 6 Mei 2025.

Sedangkan kajian konkret penerapan zero ODOL menunjukkan akan berimplikasi pada keperluan penambahan jumlah truk yang menjadi kendaraan logistik. Yang perluantisipasi lanjutan, beban muatan truk terhadap jalan juga akan semakin besar, selanjutnya dampak terhadap infrastruktur jalan dan peningkatan kemacetan juga

Dosen Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti yang berpartisipasi dalam penelitian ini, Suripno, menga-

takan penerapan Zero ODOL memberikan implikasi terhadap kenaikan biaya angkutan jalan dan penambahan armada truk. Total beban biaya yang tinggi otomatis akan mempengaruhi laju sektor pertumbuhan logistik dan juga perubahan harga pada level konsumen di tahun-tahun berikutnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti mencatat rata-rata biaya angkutan truk ODOL per ton per kilometer men-

aya angkutan jalan atau biaya distribusi sebesar Rp 5.990,36 triliun per tahun.

"Biaya inilah yang akan memberikan dampak pada peningkatan harga komoditas di level konsumen akhir," tambah Suripno.

Jadi, penggunaan truk ODOL itu oleh para pengusaha justru dapat menghemat biaya sebesar Rp 5.990,36 triliun per tahun. Toh simpulan ini berbeda dengan kajian pakar transportasi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik

lain dan menyebabkan kerusakan infrastruktur," ujarnya.

Iwan menjelaskan kecelakaan akibat rem blong kerap kali terjadi bukan karena kerusakan teknis semata, melainkan karena muatan yang melebihi kapasitas kendaraan. "Jika muatan melebihi kapasitas, misalnya truk yang seharusnya mengangkut maksimal 8 ton dibebani lebih, maka rem bisa gagal berfungsi maksimal," kata dia.

la juga menegaskan bahwa kend-



capai Rp1.084,3. Sementara, rata-rata biaya angkutan jika diterapkan Zero ODOL naik menjadi Rp 2.933,8 per ton per kilometer.

Sementara itu, disebutkan, pada saat penerapan Zero ODOL secara total terjadi penambahan populasi truk sebanyak 60,3%. Data Badan Kebijakan Transportasi menyebutkan total populasi kendaraan ODOL adalah 59% dari total populasi kendaraan. "Ini jelas akan mempengaruhi biaya distribusi per tahun," kata Suripno.

Dengan menggunakan data populasi kendaraan dari Aptrindo, pada 2020 tercatat sebanyak 7.776.852 kendaraan. Hasil penelitian ITL Trisakti menghitung terjadi kenaikan total bi-

(PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada (UGM) Iwan Puja Riyadi.

"Kendala distribusi tidak berkaitan langsung dengan Zero ODOL, tapi dapat diatasi dengan tanggung jawab pengusaha untuk meningkatkan frekuensi atau armada pengiriman yang sesuai kapasitas," kata Iwan, Senin, 7 Juli 2025.

Menurut dia, praktik ODOL selama ini hanya menguntungkan segelintir pihak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. "Ada kecenderungan pengusaha berlaku curang dan serakah. Mereka memuat lebih banyak barang dari kapasitas kendaraan dengan dalih efisiensi, padahal membahayakan keselamatan pengendara

araan ODOL mempercepat kerusakan jalan sebab beban yang tidak sesuai dengan kelas jalan membuat infrastruktur cepat rusak dan menambah beban anggaran negara. Lebih lanjut, Iwan menyarankan seluruh pihak mampu membedakan antara masalah teknis kendaraan yang diatur dalam kebijakan zero ODOL dengan persoalan distribusi logistik.

Maka Iwan mendorong penerapan aturan ini nantinya disertai penegakan hukum yang konsisten. "Dengan zero ODOL, kita memberi proteksi pada pengusaha yang taat aturan sekaligus menjaga keselamatan pengendara lain. Ini bukan sekadar aturan, tapi bentuk perlindungan," tandasnya. •



PRABOWO BERTEMU LULA DA SILVA

Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Mempererat hubungan kedua negara.

Sejak meninggalkan Tanah Air pada Selasa, 1 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto berada di luar negeri. Agenda perjalanan kali ini antara lain berkunjung ke Arab Saudi dan melaksanakan ibadah umrah. Selanjutnya, Presiden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.

Nah, selepas menghadiri KTT BRICS 2025, Presiden Prabowo melanjutkan lawatan ke ibu kota Brasil, Brasilia, pada Senin petang, 7 Juli 2025, waktu setempat. Di kota ini, Prabowo menemui Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brasil pada Rabu, 9 Juli 2025 pagi waktu setempat.

Dari tayangan langsung (live) YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo menjalani upacara penyambutan kenegaraan di Istana Kepresidenan Brasil. Tampak Presiden turun dari kendaraan yang membawanya masuk ke

dalam Istana. Mengenakan setelan jas berwarna gelap dengan peci berwarna hitam, Prabowo memberi hormat kepada pasukan berbaju putih yang bertugas menyambutnya.

Didampingi oleh komandan pasukan berseragam parade berwarna biru-putih-merah dan bersenjata lengkap, Presiden Prabowo melangkah melewati barisan prajurit yang berdiri tegap dan memberikan penghormatan. Usai menerima laporan komandan upacara, Presiden Prabowo berjalan menuju istana, melintasi tangga dan pasukan jajar kehormatan, menuju ke arah Presiden Lula yang telah bersiap menyambut di depan pintu istana.

Keduanya tampak berjabat tangan dan saling bertukar obrolan. Dalam prosesi penyambutan itu, Presiden Lula tampak menggandeng lengan Presiden Prabowo seraya mengajaknya masuk ke dalam gedung istana.

Selang kemudian, keduanya muncul dari balik balkon istana untuk menyaksikan jalannya parade puluhan pasukan kavaleri yang melintas di depan istana. Presiden Prabowo tak hentinya memberikan sikap hormat ke arah kavaleri di tengah suara derap kaki kuda yang terdengar seirama dengan langkah tegap para prajurit.

Pandangan mata, baik dari warga Brasil maupun awak media internasional, menyaksikan langsung momen langka ketika Presiden Prabowo dan Presiden Lula disambut dengan parade pasukan berkuda yang memukau. Momen ini menjadi simbol penghormatan kedua negara dalam rangka mengawali rangkaian agenda bilateral.

Sebelumnya, saat tiba di Pangkalan Udara Brasilia, Presiden Prabowo menerima sambutan resmi pemerintah Brasil yang diwakili Secretary for Asia Susan Kleebank, Duta Besar Brasil untuk Indonesia George Prata dan Chief of Airbase Kolonel Nicolas. Selain itu turut menyambut pula Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Brasil Eddy Yusuf yang didampingi Atase Pertahanan RI untuk Brasil Kolonel Inf. Rizal Ashwan.

Selepas menuruni tangga pesawat Garuda Indonesia-1, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi bagi kepala negara dari pasukan jajar kehormatan militer Brasil yang juga menandai awal rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di ibu kota Brasil tersebut.

Dalam lawatan ke ibu kota Brasil ini Presiden Prabowo direncanakan untuk menerima upacara penyambutan kenegaraan serta mengadakan pertemuan dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan Brasil. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis di antara kedua negara serta memperluas dan menjajaki potensi kerja sama konkret antara Indonesia dan Brasil di berbagai bidang.

Kunjungan ini juga menjadi cerminan dari keseriusan misi diplomasi Presiden Prabowo untuk memperkuat kemitraan global Indonesia, khususnya dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin yang memiliki potensi besar dalam

kerja sama selatan-selatan.

Sedangkan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Brasilia, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Wakil

Pembangunan Sosial dan Pengentasan Kelaparan Wellington Dias, Menteri Lingkungan dan Iklim Marina Silva, Menteri Komunikasi Sidonio Palmeira, Sekretaris Jenderal Kepresidenan Marcio Macedo, Menteri Pendidikan Camilo Santana, serta Menteri Pertanian dan Peternakan Carlos Favaro.

Acara itu berlangsung dalam Ruang Konferensi Istana yang berada di lantai dua berdekatan dengan posisi balkon istana. Usai pertemuan tertutup dan dis-



Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 11.00 waktu setempat itu adalah rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brasil, sekaligus mempererat hubungan strategis kedua negara di berbagai bidang. Sedangkan Presiden Lula memimpin langsung delegasi Brasil yang terdiri atas lima menteri utama, yakni Menteri Bantuan

kusi bersama delegasi masing-masing, kedua Presiden dijadwalkan memberikan pernyataan pers bersama sebagai penanda selesainya pertemuan resmi dan komitmen baru dalam memperkuat hubungan diplomatik kedua negara.

Presiden Prabowo dan rombongan terjadwal meninggalkan Brasilia pada Rabu petang, 9 Juli 2025. Agenda berikutnya sudah menanti. ●



Pidato AHY di Forum BRICS

KOMITMEN INDONESIA BANGUN KOTA INKLUSIF

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun kota inklusif dan berkelanjutan pada Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Brasil.

"Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia hadir membawa harapan dan tanggung jawab dalam membentuk masa depan yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan," kata AHY dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

AHY menekankan pentingnya kerja sama global dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim, terlebih adanya ketimpangan dalam akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap risiko ini.

Ketua Umum Partai Demokrat ini menyoroti dua tekanan besar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, yaitu laju urbanisasi yang sangat cepat dan risiko perubahan iklim yang semakin nyata.

AHY mengungkapkan lebih dari separuh penduduk Indonesia saat ini tinggal di kota. Jumlah itu diproyeksikan meningkat menjadi 70 persen pada 2045.

"Kami harus memastikan pertumbuhan kota yang inklusif dan tangguh. Tidak boleh ada yang tertinggal," ujarnya.

Indonesia, kata AHY, mendorong pendekatan terpadu yang menghubungkan tanah, perumahan, trans-

portasi, air, dan energi dalam satu sistem infrastruktur berkelanjutan.

"Setiap investasi dirancang untuk menghasilkan berbagai manfaat, yaitu lapangan kerja yang layak, ketangguhan yang lebih kuat, martabat yang

AHY juga menyampaikan tiga langkah konkret dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan krisis iklim global. Dia menekankan, kota-kota yang berkelanjutan akan menjadi kunci masa depan rakyat di seluruh dunia.



lebih tinggi, serta kemakmuran yang berkelanjutan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mendorong kolaborasi antarnegara anggota BRICS untuk saling berbagi inovasi dan keunggulan masing-masing dalam mengelola urbanisasi.

Ia menyebut sejumlah contoh, mulai dari perumahan sosial di Brasil, teknologi kota tahan iklim dari Rusia, hingga konektivitas kepulauan yang dikembangkan Indonesia.

"BRICS memiliki potensi untuk menjadi motor perubahan global. Indonesia siap berkontribusi melalui data, proyek percontohan, dan kebijakan praktis," kata AHY.

Selain itu, AHY menyampaikan perumahan harus diposisikan bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai fondasi bagi pertumbuhan inklusif dan ketahanan kota di masa depan.

"Kita berkumpul sebagai wakil dari berbagai bangsa, namun dipersatukan oleh satu keyakinan: masa depan dunia akan ditentukan di kota-kota kita," ujarnya.

Adapun langkah konkret pertama sebagai arah kebijakan dan kerja sama global di bidang urbanisasi, adalah pemberdayaan kewilayahan.

AHY mendorong agar pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di tingkat lokal lainnya dapat semakin berperan aktif dalam pembangunan perumahan berbasis kebutuhan rakyat.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa ketangguhan dimulai dari unit terkecil, yaitu rumah dan keluarga.

"Perkuat kapasitas kelembagaan, kewenangan dan perangkat kebijakan daerah untuk merancang rencana adaptasi iklim lokal yang mengintegrasikan rumah aman dan terjangkau

dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi di wilayahnya,” jelasnya.

Kedua, tingkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dan ramah iklim. Menurut AHY, langkah ini bukan hanya mengurangi risiko dan menurunkan emisi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

“Jaga keseimbangan ekosistem yang terintegrasi dengan pembangunan kota yang akan semakin pesat, mulai dari restorasi hutan mangrove di pesisir utara Jawa hingga koridor smart transport di kota-kota yang terus tumbuh,” katanya.

Langkah terakhir adalah membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan transformatif. AHY menekankan sistem pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang banyak didengungkan institusi keuangan global harus didesain untuk menjawab kebutuhan dan mendorong dampak nyata di negara-negara berkembang.

“Rancang pengelolaan anggaran publik, keterlibatan modal swasta, serta dukungan multilateral development partners, termasuk melalui New Development Bank, untuk memperluas pembangunan perumahan tahan iklim, infrastruktur net-zero, serta pemanfaatan digital technology untuk pemetaan dan mitigasi risiko perkotaan,” ujar AHY.

Selain itu, ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam kerja sama BRICS.

“Indonesia siap berkontribusi melalui pertukaran data, proyek percontohan, dan kebijakan praktis. Bersama-sama, kita bisa membentuk masa depan perkotaan yang inklusif, tangguh terhadap iklim, dan berakar pada prioritas serta inovasi dari negara-negara Global South,” kata AHY.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS.

Prabowo menyoroti perkembangan positif hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia yang kian erat, khususnya di sektor ekonomi, perdagangan, serta bidang strategis lainnya.

“Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang.

Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita. Kerja sama di banyak bidang juga sangat baik. Dan perjanjian-perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade juga berjalan dengan sangat baik. Jadi terima kasih Presiden Putin. Banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini,” kata Prabowo, Minggu, 22 Juni 2025.

Saat pertemuan bilateral di Istana Konstantinovsky, St Petersburg, 19 Juni 2025, Presiden Vladimir Putin menegaskan hubungan Rusia dan Indonesia terus berkembang secara konsisten, dengan peningkatan volume

melalui pemanfaatan QRIS dan transaksi dengan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT), yang siap diimplementasikan langsung tanpa melalui pihak ketiga seperti Uni Emirat Arab.

Di sektor energi, Indonesia menyatakan minat untuk memperluas kolaborasi, termasuk pengembangan teknologi Small Modular Reactor (SMR) dan penyetaraan standar teknis melalui Mutual Recognition Agreement (MRA).

Kolaborasi juga diarahkan pada bidang farmasi dan riset. Rusia menawarkan kerja sama di sektor pertanian dan



perdagangan dan potensi kerja sama yang luas di sektor pertanian, eksplorasi luar angkasa, energi, serta kerja sama militer dan teknis.

“Hubungan Rusia dan Indonesia berkembang secara konsisten. Volume perdagangan naik. Kami ada banyak perspektif di berbagai bidang, termasuk pertanian, penjelajahan luar angkasa, dan energi. Kerja sama di bidang militer dan teknis. Kami ada banyak peluang untuk kerja sama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang,” ujar Putin.

Pertemuan kedua kepala negara ini menjadi momentum yang memperkuat kemitraan konkret. Salah satunya melalui penyelesaian substansial perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) yang ditargetkan dapat ditandatangani tahun ini.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia dan Rusia juga membahas kerja sama sistem pembayaran lintas negara

pangan, terutama penyediaan bahan baku pupuk, benih pertanian, serta produk daging.

Sebagai timbal balik, Indonesia mendorong peningkatan ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke pasar Rusia.

Dalam bidang pariwisata, Prabowo mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan langsung dari Moskow ke Denpasar yang saat ini tersedia tiga kali seminggu.

Penambahan ini diharapkan memperkuat konektivitas dan meningkatkan arus wisatawan asal Rusia ke Indonesia.

Selain itu, kerja sama juga bakal diperluas ke bidang pendidikan, dengan komitmen Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke universitas di Rusia.

Bidang olahraga, khususnya bulu tangkis, serta penguatan hubungan antarmasyarakat kedua negara (people-to-people contact) turut menjadi bagian pembahasan. ●

PEMILU NASIONAL DAN LOKAL DIGELAR TERPISAH MULAI 2029

Mahkamah Konstitusi memutuskan, mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Pemilu Nasional yakni pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden. Sedangkan Pemilu Lokal yakni pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota. Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai "Pemilu 5 Kotak" tidak lagi berlaku.

Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, serta memperhitungkan

Putusan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis, 26 Juni 2025.

Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa hingga saat ini pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan 26 Februari 2020.

Kemudian, secara faktual pula, pembentuk undang-undang sedang mem-



kan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan

persiapan upaya untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum.

"Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/

wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional,” tegas Wakil Ketua MK, Saldi Isra.

Menenggelamkan Masalah Pembangunan Daerah

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan waktu penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menyebabkan minimnya waktu bagi pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota legislatif.

Selain itu, dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden, masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional.

Padahal, menurut Mahkamah, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.

Tak hanya itu, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang berada dalam rentang waktu kurang dari satu tahun dengan pemilihan kepala daerah, juga berimplikasi pada partai politik, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilihan umum.

Akibatnya, kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik.

Selain itu, dengan jadwal yang berdekatan, partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus.

Bagi partai politik tertentu juga harus mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan presiden/wakil presiden. Dengan demikian, agenda yang berdekatan tersebut juga menyebabkan pelemahan pelemagaan partai politik yang pada titik tertentu menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis.

“Akibatnya, perekrutan untuk calon jabatan-jabatan politik dalam

pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis. Sejumlah bentangan empirik tersebut di atas menunjukkan partai politik terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi kepentingan elektoral,” terang Arief.

Arief menyampaikan, terjadinya impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan anggota



DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD dengan sejumlah tahapan awal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana Pemilu 2024, menyebabkan terjadinya tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan.

Selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu

nyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum.

Bahkan, kata Wakil Ketua MK, Saldi Isra, jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak

Perihal jarak waktu antara penyelenggaraan Pemilu nasional dengan Pemilu daerah, tidak mungkin ditentukan oleh Mahkamah secara spesifik. Namun, Mahkamah berpendapat jarak waktu tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu yang selalu berkelindan dengan hal-hal teknis semua tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Mahkamah, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan DPD, atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

Sementara itu, perihal pengaturan masa transisi/peralihan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan pada 27 November 2024, serta masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hasil pemilihan pada 14 Februari 2024, Mahkamah mempertimbangkan bahwa penentuan dan perumusan masa transisi ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Selanjutnya, penentuan dan perumusan dimaksud diatur oleh pembentuk undang-undang dengan melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, termasuk masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional.

Kabul untuk Sebagian

Untuk itu, dalam Amar Putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai.

"Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam



penyelenggaraan dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu.

"Masa jabatan penyelenggara pemilihan umum menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan 'tugas inti' penyelenggaraan pemilihan umum hanya sekitar dua tahun," jelas Arief.

Pemilih Jenuh dan Tidak Fokus

Dari sisi pemilih, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu pe-

calon dalam pemilihan anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang menggunakan model lima kotak.

"Fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini, disadari atau tidak, berdampak pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum," ujar Saldi.

waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional," bunyi pasal itu.

Selain itu, Mahkamah juga menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai.

"Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota".

Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Hal ini juga bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai.

"Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota Dewan Per-

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kami pelajari dulu lebih detail keputusan MK ini. Yang pasti, keputusan MK kan final dan kita letakkan dalam konteks revisi sebagai salah satu masukan," kata Bima Arya di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 26



wakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden," tandas Suhartoyo.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan pihaknya akan mempelajari dan berjanji untuk mengakomodasi putusan MK soal harus adanya jeda waktu Pemilu Nasional dan Pilkada.

Hal itu mengingat saat ini pihak Kementerian Dalam Negeri sedang dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 7

Juni 2025.

Dia menegaskan putusan MK ini akan dipertimbangkan masuk ke proses revisi UU Pemilu. Akan tetapi, dia mengatakan eksekusi dan implementasinya harus dipelajari dulu dengan sangat detail.

"Tapi sebelumnya kan sudah pernah ada ya masukan-masukan terkait pemilihan antara keadaan dan pemilu. Ya itu salah satu yang gencar disuarakan oleh teman-teman kampus dan pemerhati pemilu," tuturnya. ●

TANDA TANYA PARA TERSANGKA

Figur media terkemuka yang melekat dengan kelompok media Jawa Pos, Dahlan Iskan, menjadi tersangka. Juga bekas Direktur Jawa Pos Nany Wijaya. Namun keduanya mempertanyakan status tersangka yang ditetapkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Sebagaimana pemberitaan berbagai media, dalam dokumen, perkembangan hasil penyidikan Polda Jatim, Dahlan Iskan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP Jo Pasal 372 KUHP dan atau Jo Pasal 55 KUHP. Penetapan tersangka ini terkait Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/42//RES.1.9./2025/Ditreskrimum, tertanggal 10 Januari 2025.

Selanjutnya, penyidik kepolisian melaksanakan gelar perkara pada Rabu, 2

Juli 2025 sebelum menentukan Dahlan Iskan menjadi tersangka. "Saudara Dahlan Iskan ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka," tulis dokumen yang ditandatangani Kepala Sub Direktorat I Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Arief Vidy.

Selain Dahlan, Nany Wijaya yang pernah menjabat Direktur Jawa Pos juga turut ditetapkan sebagai tersangka. "Terhadap saksi saudari Nany Wijaya dan saudara Dahlan Iskan ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi ter-



sangka," demikian tertulis dalam surat perkembangan penyidikan Polda Jatim, dikutip Selasa, 8 Juli 2025.

Dalam dokumen itu selanjutnya kepolisian berencana akan memanggil Nanny dan Dahlan Iskan sebagai tersangka. "Untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka serta melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud."

Polda Jatim menetapkan tersangka mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dugaan penggelapan dan pemalsuan surat. Tak hanya Dahlan, mantan Direktur Jawa Pos, Nany Wijaya (NW), ditetapkan sebagai tersangka.

diduga melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelapan dalam jabatan juncto penggelapan dan atau pencucian uang.

Dahlan sendiri mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait status hukum sebagai tersangka. "Kok saya belum tahu ya, apa ini ada kaitannya dengan permohonan PKPU yang saya ajukan?" kata Dahlan melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Senin, 7 Juli 2025.

keta Tabloid Nyata. Karena jadi saksi itu, Dahlan kemudian membutuhkan dokumen-dokumen untuk keperluan pemeriksaan di kepolisian. Namun, ia tak menyangka dirinya kemudian dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Jawa Pos. Media yang dibesarkan dan sudah identik dengan dirinya.

"Yang juga tidak pernah saya sangka adalah: saya berurusan dengan polisi di usia saya yang 74 tahun. Dulu, saya kira, saya itu akan seumur hidup di Jawa Pos. Katakanlah sampai mati. Bahkan saya bayangkan mungkin makam saya pun kelak akan di hala-



Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Timur menetapkan tersangka mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dugaan penggelapan dan pemalsuan surat. Tak hanya Dahlan, mantan Direktur Jawa Pos, Nany Wijaya (NW), ditetapkan sebagai tersangka.

"Saudara Dahlan Iskan ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka," tulis dokumen yang ditandatangani Kepala Sub Direktorat I Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Arief Vidy.

Lebih rinci, Menteri BUMN periode 2011-2014 yang pernah menjadi Direktur Utama BUMN PT PLN (Persero) itu

la juga menyinggung dugaan pelaporan yang dilakukan oleh pihak internal manajemen Jawa Pos. "Itu atas pengaduan direksi Jawa Pos?" ujarnya dengan tanda tanya. Dahlan menambahkan pula, "Oh ya, hari ini saya dengar ada sertijab Dirreskrim Polda Jatim."

Secara panjang lebar, Dahlan Iskan juga menuliskan tanggapannya dalam kolom Disway yang terbit rutin setiap hari. Pada edisi Rabu, 9 Juli 2025, Dahlan menulis kolom berjudul "Jadi Tersangka".

Dahlan menjelaskan panjang lebar awal mula gugatan ke Jawa Pos yang berawal dirinya jadi saksi atas seng-

man gedung Jawa Pos".

"Itu karena, seperti banyak yang bilang, "Jawa Pos adalah Dahlan Iskan, dan Dahlan Iskan adalah Jawa Pos". Rasanya pernah ada media yang sampai menulis seperti itu.

Seluruh energi muda saya memang tumpah untuk Jawa Pos. Saya sempat bahagia ketika banyak yang mengakui bahwa sayalah yang membuat Jawa Pos dari perusahaan yang begitu kecil dan miskin menjadi raksasa media dengan kekayaan bertriliun-triliun rupiah".

Dahlan Iskan menceritakan pula awal mula meninggalkan Jawa Pos saat mendapat panggilan menjadi Dirut PLN. Dahlan Iskan sebenarnya

• INFO NASIONAL

enggannya menerima jabatan itu. Namun demi panggilan negara ia kemudian menerimanya.

"Sebagai dirut BUMN saya tidak boleh merangkap jabatan di swasta. Maka saya harus melepaskan jabatan dirut Jawa Pos. Tidak masalah. Toh di PLN saya tidak akan lama. Maksimum tiga tahun. Bisa kembali ke Jawa Pos lagi".

"Ternyata saya tidak pernah bisa kembali ke Jawa Pos. Pemegang saham mayoritas yang selama puluhan tahun hanya mengawasi dari jauh sudah menjadi sangat berkuasa di Jawa Pos. Begitulah perusahaan. Apalagi sudah punya uang banyak".

Sedangkan dalam pernyataan tertulis, Dahlan mengisahkan perkara ini bermula saat ia mendapatkan pang-

Kepada polisi, ia sudah berusaha menjelaskan perihal riwayat Tabloid Nyata itu. Namun masih dibutuhkan dokumen dan bukti untuk memperkuat keterangannya itu. "Saya pun harus menjelaskan ke polisi sepanjang ingatan saya. Ternyata harus ada bukti dalam bentuk dokumen. Maka saya perlukan banyak dokumen. Sungguh tidak saya sangka persoalan itu diadukan ke polisi," ucapnya.

Dahlan yang tak pernah menyimpan dokumen-dokumen itu kemudian berusaha memintanya ke Jawa Pos. Namun upaya itu tak direspons. Dia pun melakukan gugatan PKPU di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

"Saya itu tidak pernah menyimpan dokumen perusahaan di rumah saya. Semua saya tinggal di kantor saat itu.

sangka adalah: saya berurusan dengan polisi di usia saya yang 74 tahun. Dulu, saya kira, saya itu akan seumur hidup di Jawa Pos. Katakanlah sampai mati. Bahkan saya bayangkan mungkin makam saya pun kelak akan di halaman gedung Jawa Pos," ucapnya.

Kuasa hukum Dahlan Iskan, Johannes Dipa Widjaja mengatakan, ia dan kliennya belum menerima surat pemberitahuan apapun. Mereka justru baru mengetahui hal itu dari pemberitaan di media.

"Nah, saya ini sebagai kuasa hukum yang sah dari Pak Dahlan Iskan belum menerima surat pemberitahuan apapun terkait hal tersebut," kata Johannes, Selasa, 8 Juli 2025. Ia

Johanes memang mengakui Dahl-



gilan pemeriksaan polisi, terkait aduan direksi Jawa Pos, perusahaan yang dipimpinnya dulu. Dia dipanggil perihal kepemilikan PT Dharma Nyata Press atau Tabloid Nyata.

"Itu karena hari-hari ini saya harus memberikan keterangan di polisi sebagai saksi atas pengaduan direksi Jawa Pos --direksi yang sekarang-- tentang peristiwa 25 tahun yang lalu. Yakni soal siapa sebenarnya pemilik saham Tabloid Nyata," kata Dahlan dalam keterangan resmi, Rabu, 9 Juli 2025.

Saya sekarang perlu dokumen-dokumen itu. Sudah minta beberapa dokumen perusahaan secara baik-baik tapi tidak diberi, pengacara saya ajukan gugatan untuk mendapat dokumen-dokumen tersebut, karena sebagai salah satu pemegang saham saya punya hak untuk meminta," ucapnya.

Kini, Dahlan tak pernah menyangka dirinya harus berhadapan dengan hukum, apalagi yang mempoliskannya adalah mantan perusahaannya sendiri. "Yang juga tidak pernah saya

an sempat diperiksa dalam kasus ini. Namun dalam status sebagai saksi. Pemeriksaan terakhirnya itu bahkan ditangguhkan karena suatu hal.

"Laporan polisi ini Pak Dahlan memang diperiksa sebagai saksi. Dan pada waktu pemeriksaan terakhir kali kami diperiksa sebagai saksi itu sempat ditunda," ucap dia.

"Karena ada gugatan yang diajukan oleh terlapor atas nama Bu NW, ini kan mengajukan gugatan. Sehingga kami merasa bahwa oh ini harus nunggu

perkara perdata gugatan Bu NW ini clear dulu supaya jelas apakah betul Jawa Pos ini punya hak atas saham tersebut,” tambahnya.

Penyidik sendiri, kata Johannes, pada waktu itu mengabulkan permohonan penundaan pemeriksaan tersebut. Tapi, menurut Johannes, anehnya hari ini Dahlan malah ditetapkan tersangka.

Perkara ini, klaim dia, sebelumnya sudah pernah dilaksanakan gelar perkara khusus di Wasidik Mabes Polri. Di sana, Johannes pun menanyakan ke pihak pelapor siapa yang dia laporkan dalam perkara ini.

“Eh, yang kamu laporkan ini siapa sih? Gitu, loh. Nah, oleh pihak pelapor dikonfirmasi bahwa yang kami laporkan itu adalah saudara saudari NW saja. Nah, itu loh. Saudari NW saja.

beritahukan pada pihaknya sebagai terlapor.

“Sampai detik ini kami belum menerima tap TSK (tersangka). Biasanya kita akan dikirim Tap TSK yang menjelaskan kapan penetapan itu dilakukan dan sebagainya. Itu harus dikirimkan secara resmi,” kata Billy, Rabu, 9 Juli 2025.

Ia menambahkan, dalam kasus ini, kliennya dilaporkan oleh pihak Jawa Pos terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Saat ditanya apakah Dahlan termasuk dalam pelaporan tersebut, ia menyatakan jika sesuai dengan laporan yang diterimanya, laporan itu ditujukan kepada Nany Wijaya dan kawan-kawan.

“Dalam laporan itu, hanya tertulis yang dilaporkan Nany Wijaya dan

Jatim, tanggal 13 September 2024, atas nama pelapor Rudy Ahmad Syaifei Harahap,” kata Billy menyebut pelapor yang berasal dari lingkungan internal kelompok media Jawa Pos.

Billy mengungkapkan penyidik dari kepolisian dinilai abai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan dari Mabes Polri usai melakukan gelar perkara. Meski, hingga kini belum ada keterangan atau siaran resmi dari Polda Jatim perihal tersebut. “Karena mengabaikan rekomendasi hasil gelar perkara khusus di Biro Wassidik Mabes Polri sesuai dengan surat SP3D tertanggal 25 Maret 2025 dengan nomor surat B/6739/III/RES/7.5/2025/BARESKRIM,” terangnya.

Billy lantas meminta kasus tersebut untuk dihentikan. Sebab, masih ada



Nah, apakah Pak DI ikut dilaporkan? Yang bersangkutan si kuasa hukum pelapor dengan tegas. Kami tidak pernah melaporkan Pak Dahlan Iskan,” ujarnya.

Sedangkan Nany Wijaya melalui kuasa hukumnya, Billy Handiwiyanto, menyatakan hingga Rabu, 9 Juli 2025 belum menerima surat pemberitahuan penetapan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jatim. Padahal, lanjut Billy, jika kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik seharusnya mem-

kawan-kawan saja. Untuk pak Dahlan kami tidak tahu,” tegasnya.

Lebih dari itu, tim pengacara Nany Widjaja bakal melaporkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim ke ke Divpropam Mabes Polri. “Kami mengadakan dugaan tindakan pelanggaran kode etik para penyidik Unit II Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Polda Jatim yang menangani perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/546/IX/2024/SPKT/Polda

perkara perdata yang mesti dirampungkan kliennya dengan Dahlan Iskan. “Kami mohon agar dapat diberikan rekomendasi surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap laporan polisi Nomor: LP/B/546/IX/2024/SPKT/Polda Jawa Timur, tanggal 13 September 2024, atas nama pelapor Rudy Ahmad Syaifei Harahap tersebut,” tegasnya.

Proses hukum masih akan berlanjut. Banyak yang juga akan terkait dengan perkembangannya. ●

GIBRAN BERKANTOR DI PAPUA ANTARA GIMIK DAN INTRIK

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditugaskan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi pembangunan sekaligus melakukan evaluasi atas berbagai persoalan di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, saat Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024 pada Rabu 2 Juli 2025.

Yusril pun telah mengklarifikasi. Menurut Yusril, pernyataannya mengenai penugasan Wapres Gibran dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang. Bukan ditujukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal berkantor di sana.

"Tidak mungkin Wakil Presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media," kata Yusril.

Yusril menegaskan, Wapres mempunyai berbagai tugas konstitusional yang telah diatur Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sehingga tempat kedudukannya di Ibu Kota Negara, mengikuti tempat kedudukan Presiden.

Untuk itu, secara konstitusional, tempat kedudukan Presiden dan Wapres tidak mungkin terpisah.

Yusril mengungkapkan, Wapres Gibran memang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus Papua.

Badan Khusus itu telah dibentuk Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022. Namun, berbagai aturan terkait dengan

lanjut mengenai badan itu akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), di mana terdapat kemungkinan struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada ditata ulang dengan PP sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Dengan demikian, sambung Yusril, yang berkantor di Papua merupakan



pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

Yusril menjelaskan, Badan Khusus Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai Wapres dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua.

Disebutkan bahwa ketentuan lebih

kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai Wakil Presiden tersebut.

Meski begitu, Yusril menuturkan, sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wapres dan para menteri anggota badan itu sedang berada di Papua, mereka tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut.

"Jadi, bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua," tuturnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan, penugasan Gibran untuk memimpin percepatan pembangunan Papua, tidak berarti Wapres harus berkantor di Papua.

"Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga," kata Prasetyo.

Menurut dia, Tim Percepatan Pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara. Dalam hal ini, tim tersebut akan menggunakan Kantor KPKN Jayapura sebagai kantor operasionalnya.

Turunan dari tim percepatan itu adalah semacam badan atau satuan tugas untuk operasional harian di lapangan. Maka, pihak yang akan lebih sering berkantor di Papua adalah badan atau satgas tersebut.

Dia pun menilai, hal itu tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut karena pembangunan Papua merupakan kewajiban bagi pemerintah. Apalagi Wapres memiliki kapasitas untuk melaksanakan pembangunan. Sehingga, tidak ada salahnya jika Presiden, Wakil Presiden, para menteri terkait, hingga Anggota DPR berkunjung ke Papua.

"Kalau perlu ya memang harus sering-sering berkunjung ke situ," katanya.

Sementara itu, Wapres Gibran menyatakan dirinya siap untuk menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua.

"Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua," ujar Gibran.

Gibran mengatakan, penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin. Gibran menjelaskan, keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru.

Wapres menyampaikan bahwa jajarannya di Sekretariat Wakil Presiden yang berada di bawah koordinasinya sudah

kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua. Di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan melakukan pengecekan kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua, seperti Sorong dan Merauke.

Wapres juga menegaskan dirinya siap menjalankan tugas tersebut kapanpun dan dimanapun.

"Kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, kita siap. Mis-



alnya, keppres-nya (keputusan presiden) belum keluar pun saya juga siap kapan pun," ucap Gibran.

Mengenai teknis pelaksanaan tugas, Gibran menyebut dirinya fleksibel dalam hal lokasi kerja.

Wapres mengatakan dirinya dapat berkantor di mana saja, baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun di Papua.

"Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor," ucap Gibran.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog dengan berbagai pihak, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.

"Karena bagi saya, sekali lagi, sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apapun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting," ujarnya.

Menurut Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, penugasan Gibran untuk membantu percepatan pembangunan Papua dan akan berkantor di sana adalah hal yang bagus. Namun jika dimaknai secara politik, wacana

itu akan dibaca berbeda.

"Secara normatif itu bagus-bagus saja, artinya pemerintah pusat benar-benar serius ingin mengawal pembangunan Papua, dengan adanya representasi Presiden Prabowo Subianto melalui Wapres Gibran yang berkantor di Papua. Namun, secara politik kita bisa membacanya dengan sangat berbeda," kata Iwan, Rabu, 9 Juli 2025.

Sebagai pengamat politik, Iwan melihat hal ini dapat ditafsirkan bahwa Gibran akan dijauhkan dari pusaran politik nasional.

"Kita analogikan saja misalnya pejabat atau ASN atau TNI-Polri di sana diasosiasikan atau diberi tugas khusus bagi prajurit yang baru masuk," ujar Iwan.

Namun, jika Gibran benar berkantor di sana dan mampu membuktikan kapasitasnya dalam membangun ekonomi dan sosial masyarakatnya, maka bukan tidak mungkin namanya akan bersinar pada tahun politik mendatang. Tetapi jika sebaliknya, maka peluang tersebut akan semakin kecil. ●



MYOPIA

Gunawan Effendi

Myopia, rabun jauh dalam bahasa, bermakna kendala penglihatan jarak jauh. Toh myopia juga berada dalam konteks perdagangan global; maknanya rabun ekspor karena terlalu sibuk dengan pasar domestik atau dalam negeri.

Bagaimana dengan Indonesia? Sekadar gambaran saja, gross domestic produk (GDP) atau produk domestik bruto (PDB) Indonesia sudah melampaui 1,4 triliun atau 1.400 miliar dolar AS. Dalam mata uang lokal, nilainya mencapai Rp22.139 triliun. Namun, porsi ekspor barang dan jasa Indonesia belum mencapai 25 persen dari nilai PDB-nya.

Untuk perbandingan antarnegara yang menggunakan angka konservatif, mengutip GeoRank, PDB Indonesia baru mencapai 1 triliun dolar AS. Dengan angka konservatif sekalipun, toh Indonesia merupakan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut PDB Indonesia malah sudah menyentuh 1,5 triliun dolar AS toh tetap relatif kecil dibandingkan dengan negara G20, "Kalau dibandingkan banyak negara dunia, kita itu masuk dalam G20, tapi size kita tidak besar enough untuk masuk dalam size yang bisa mempengaruhi ekonomi dunia," ungkapnyanya dalam CNBC Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2025.

Negara G20 atau Group of Twenty adalah 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Negara-negara yang menjadi anggota G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, Uni Eropa, dan Uni Afrika.

Nah, dalam ukuran PDB sudah paling besar di ASEAN. Namun, secara global relatif masih kecil. Apa kaitannya? Ya myopia tadi. Indonesia terlalu sibuk dengan pasar domestik sehingga belum banyak produk dan jasanya melayani pasar global.

Kita memang menjadi eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Namun, itu pun setelah bertahun-tahun mengejar

ketinggalan dari tetangga Malaysia. Baru pada 2010 Indonesia berhasil melampaui Malaysia dalam ekspor minyak sawit ke pasar global.

Sekalian saja, meski size ekonomi Malaysia masih jauh di bawah Indonesia, tetangga yang hanya terpisah oleh jalur perdagangan global Selat Malaka, malah sederatan di Kalimantan, angka ekspornya sudah hampir mencapai 70 persen dari PDB yang menurut GeoRank baru mendekati angka 360 miliar dolar, belum sampai setengah dari Indonesia. Jadi, meski nilainya masih kecil, hampir tiga per empat produk dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri Malaysia menjadi pemasukan devisa, mata uang asing. Tentu saja bukan hanya ekspor minyak sawit, melainkan juga akan termasuk kunjungan wisatawan asing, misalnya.

Yang serupa dengan Malaysia adalah Thailand. PDB Thai-

land menurut GeoRank mencapai 505 miliar dolar AS. Namun, dari jumlah itu, 66,8 persen antaranya merupakan produk dan jasa yang tergolong ekspor. Termasuk kunjungan wisatawan asing ke Negeri Gajah Putih itu seharusnya. Juga produk agribisnisnya, termasuk ekspor beras ke Indonesia sebelum swasembada pangan tercapai. Penting pula untuk dicatat, angka

pengangguran di Thailand tak sampai satu persen dibandingkan dengan Indonesia yang tercatat oleh GeoRank baru mencapai sekitar 4,3 persen.

Bagaimana dengan Filipina? Menurut GeoRank, PDB Filipina baru mencapai 330 miliar dolar AS, sekitar sepertiga yang dicapai Indonesia dan masih di bawah Thailand dan Malaysia. Tapi, angka produk dan jasa yang tergolong ekspor masih lebih baik dari Indonesia, mendekati 32 persen dari PDB. Kita bisa memasukkan remitansi dari pekerja migran Filipina sebagai salah satu penyumbangannya.

O ya, hampir terlewat. Berapa persentase produk dan jasa ekspor terhadap PDB Indonesia? Menurut GeoRank baru sekitar 21 persen.. Jika berlipat dua menjadi 42 persen saja dari PDB, akan sangat lain ceritanya: Kunjungan wisatawan asing, pengiriman pekerja migran, produk industri yang diekspor, akan meningkat pesat. Sedangkan angka pengangguran seharusnya turun. Ringkasnya, bukan pengidap myopia ekonomi lagi. ●



TELANJUR PERANG

Perang dengan senjata nuklir disebut-sebut hanya akan berlangsung dalam hitungan hari. Namun saling berbalas serangan antara Israel dan Iran sudah berlangsung sejak 13 Juni 2025. Apa dampaknya terhadap perekonomian global dan Indonesia?

Pada Jumat dini hari, 13 Juni 2025 itu, Israel menggelar serangan mendadak yang menargetkan fasilitas militer dan nuklir utama Iran. Para pemimpin militer, ilmuwan nuklir, dan politisi Iran seperti Ali Shamkhani yang mengawasi pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat menjadi korban serangan itu.

Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 03:00 waktu setempat, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengu-

Defence Forces), serangan tersebut didorong oleh intelijen yang menunjukkan Iran telah mengumpulkan cukup uranium yang diperkaya yang memungkinkan tahap lanjut hingga tingkat senjata dalam jumlah memadai untuk 15 senjata nuklir dalam hitungan hari. Toh perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk tindak lanjut membuat senjata yang sebenarnya bervariasi dari 7 hingga 12 bulan.

Sehari kemudian, Sabtu, 14 Juni

memihak Israel mengirim pesawat pengebom B-2 untuk menyerang tiga lokasi nuklir Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Menurut tiga pejabat Iran yang berbicara kepada The New York Times, serangan itu terjadi pada pukul 2:30 pagi waktu Iran (sekitar pukul 05 pagi Waktu Indonesia Barat). Presiden AS Donald Trump mengemukakan, fasilitas yang menjadi sasaran hancur total. Toh pemerintah Iran mengatakan bahwa lokasi Fordow tidak rusak



mumkan keadaan darurat nasional, seraya memperingatkan akan adanya serangan rudal dan pesawat tak berawak yang akan segera terjadi. Sirine peringatan diaktifkan di seluruh Israel untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balik Iran, meskipun ternyata Iran belum meluncurkan rudal balistik hingga malam berikutnya.

Menhan Katz mengemukakan serangan Israel terhadap Iran sebagai serangan pendahuluan. Menurut Kementerian Pertahanan Israel (IDF, Israel

2025, IDF mengumumkan bahwa Iran telah menembakkan 200 rudal balistik sejak malam tanggal 13 Juni, dengan sekitar 25 persen antaranya mengenai area terbuka. Mereka menegaskan bahwa "sejumlah kecil" rudal menghindari pertahanan udara dan mengenai area permukiman di Tel Aviv, Ramat Gan, dan Rishon LeZion, yang menyebabkan jatuhnya korban.

Sejak itu saling serang pun kian berkobar. Bahkan pada Minggu, 22 Juni 2025, Amerika Serikat yang

parah. IRIB mengatakan bahwa hanya terowongan keluar dan masuk Fordow yang hancur tetapi bukan fasilitas nuklirnya.

Toh perang Israel-Iran belum berakhir. Salah satu titik panas di permukaan bumi yang rawan perang sudah menjadi medan pertempuran sejak pertengahan Juni 2025. Meski menyangkut instalasi nuklir yang rawan radiasi dan menelan korban jiwa, toh perang masih akan berlangsung. Dampaknya terhadap perekonomian

global yang juga menjadi perhatian berikutnya.

Konflik regional di kawasan timur tengah yang kaya minyak dan gas itu tentu saja segera mengerek harga jualnya mengingat kemungkinan terhambatnya pasok migas global. Di sisi lain, konflik itu juga menambah ketidakpastian bisnis global akibat kebijakan tarif Trump terhadap barang impor yang masuk ke AS. Namun, industri pertahanan mendapat peluang



baru untuk meningkatkan produksinya. Sebaliknya, industri pariwisata dan perjalanan dunia mengalami kelesuan oleh perang yang berlangsung di kawasan Timur Tengah itu. Emas menjadi salah satu pilihan untuk menyimpan aset jika bukan obligasi negara.

Bagaimana dampak perang itu bagi perekonomian Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mewanti-wanti. Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025, Bu Men-

keu mengemukakan eskalasi konflik kedua negara di Timur Tengah itu telah memicu lonjakan harga minyak lebih dari delapan persen, dari posisi di bawah 70 dolar AS per barel menjadi 78 dolar AS per barel.

Meski kini harga minyak telah terkoreksi ke level 75 dolar AS per barel, Menkeu Sri Mulyani menyebut ketegangan Iran-Israel memiliki dampak yang cukup signifikan. "Ini adalah suatu kejadian yang bisa langsung mempengaruhi kondisi perekonomian secara sangat signifikan, baik melalui harga komoditas maupun dari sisi nilai tukar, suku bunga, dan aliran modal," ungkapnya.

Bersamaan dengan eskalasi konflik Timur Tengah, sambungnya, kebij-

ngkat dari serapan sektor migas, namun belanja negara akan tertekan mengingat kebutuhan impor minyak. Realisasi harga minyak hingga sejauh ini masih di bawah asumsi makro APBN 2025, yakni pada posisi 62,75 dolar AS per barel pada akhir Mei dengan rata-rata tahun berjalan (year-to-date/ytD) 70,05 dolar AS per barel. Sedangkan pada asumsi makro APBN, nilainya dipatok sebesar 82 dolar AS per barel.

"Harga minyak ini selain dipengaruhi kondisi di dalam negeri, juga dipengaruhi oleh situasi Timur Tengah, yaitu perang Israel dan Iran. Ini adalah situasi APBN, yang asumsinya sangat bisa dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan kejadian perang di belahan bumi yang lain," ujarnya.



kan fiskal ekspansif Amerika Serikat (AS) berpotensi menyebabkan sentimen terhadap fiskal negara maju menjadi negatif, sehingga bisa meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury). Gejolak-gejolak itu menimbulkan dua risiko utama, yaitu ketidakpastian harga minyak dan pelemahan ekonomi global.

"Itu kombinasi yang harus kita waspadai, baik efek tekanan harga atau inflasi maupun kenaikan imbal hasil karena geopolitik dan kebijakan fiskal. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia, termasuk Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, dampak konflik Iran-Israel juga bisa membebani APBN. Meski pendapatan negara berpotensi menin-

Sedangkan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof Faris Al-Fadhat, MA, PhD mengemukakan, perang ini berpotensi menekan pasar Iran, bahkan bisa berujung pada penghentian total aktivitas ekspor-impor negara tersebut. "Konflik ini bukan hanya ancaman politik dan keamanan, tetapi juga berdampak ekonomi. Jika pasokan dari Iran terganggu, termasuk untuk produk yang biasa diekspor dari Indonesia, maka rantai pasok domestik akan ikut terdampak," ujar Prof. Faris yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor UMY, Sabtu 21 Juni 2025.

Meskipun nilai perdagangan Indonesia dengan Iran tergolong kecil, yakni di bawah 200 juta USD, dampaknya

• INFO KHUSUS

tetap signifikan karena produk ekspor tersebut sebagian besar diproduksi di dalam negeri. Gangguan ekspor berarti terganggunya kegiatan produksi nasional, yang pada gilirannya dapat mengguncang stabilitas ekonomi.

Faris juga mengingatkan bahwa Indonesia sangat bergantung pada negara lain untuk pasokan energi, khususnya dari Qatar dan Arab Saudi.

batu bara. Perlu waktu panjang dan investasi besar untuk benar-benar beralih ke energi hijau," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan skema insentif yang kuat bagi sektor swasta jika ingin mempercepat proses transisi. Kemudahan regulasi dan insentif pajak harus menjadi perhatian utama agar Indonesia punya jalur jelas menuju ekonomi hijau.

PhD pun mengakui perang Iran-Israel akan mengganggu supply dan demand minyak dunia. Alasannya, Iran merupakan salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia.

Perang ini, kata Rossanto, berpotensi meningkatkan harga minyak sehingga secara otomatis biaya produksi juga akan meningkat. Mengingat masih banyak negara yang mengandalkan



Volume perdagangan dengan Qatar mencapai 680 juta USD, dan hampir 800 juta USD dengan Arab Saudi. "Jika konflik memburuk dan menyeret kedua negara itu, Indonesia bisa terdampak lebih besar, terutama pada sektor energi yang sangat krusial," imbuhnya.

Menurut dia, kondisi ini juga menjadi pengingat pentingnya mendorong transisi energi ke energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, ia menilai, langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. "Saya pesimistis transisi energi bisa cepat terealisasi. Saat ini, lebih dari 60 persen energi Indonesia masih bergantung pada minyak dan

Faris menekankan bahwa situasi saat ini bisa dikategorikan sebagai The Great Disruption, karena terjadi dalam dua spektrum besar: Eskalasi geopolitik dan krisis tata kelola ekonomi global. "Perang dagang hari ini pada dasarnya adalah perang regulasi. Banyak negara mulai meninggalkan tatanan rule-based yang disepakati bersama dalam hukum internasional, dan lebih mementingkan kepentingan nasional masing-masing. Indonesia harus cermat membaca arah, siapa kawan dan siapa lawan," tandasnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya Prof Rossanto Dwi Handoyo SE M Si

minyak karena belum beralih ke sumber energi terbarukan, rentetan kenaikan harga minyak akan mengerek biaya produksi dan akhirnya harga jual barang.

"Di titik ini, harga yang naik akan meningkatkan inflasi internasional kalau berlangsung cukup lama. Kalau konflik ini bertahan lama seperti Rusia-Ukraina, maka akan cukup berat bagi dunia, dapat terjadi ketidakstabilan harga. Akhirnya, dunia akan mengalami stagflation, stagnation plus inflation, artinya pertumbuhan ekonomi dunia menurun dan inflasi dunia meningkat," jelas Rossanto.

Selain itu, Rossanto juga menyoroti

letak Iran dan Israel yang merupakan jalur pelayaran ekspor dunia. Konflik di wilayah tersebut, kata dia, memaksa alur pelayaran bisnis mencari jalur perdagangan lain yang kemungkinan menempuh jarak lebih jauh. Dengan jarak yang lebih jauh, kebutuhan logistik akan semakin mahal sehingga harga jual juga secara otomatis akan meningkat.

"Saya melihat di sisi lain bahwa ketegangan ini akan memberikan risiko terhadap ketidakpastian ekonomi global. Investor dunia akan berpikir panjang kalau melakukan investasi, pastinya negara-negara Arab dihindari. Terjadinya penurunan investasi global ini berdampak pada menyusutnya perdagangan global," papar Rossanto.

Alhasil, bagi Indonesia yang lebih banyak mengimpor daripada mengekspor minyak, perang dapat mengakibatkan surplus perdagangan semakin menyempit. Prof Rossanto menyebut bahwa jumlah ekspor Indonesia ke Timur Tengah memang kecil, tetapi permasalahan terletak pada posisinya sebagai jalur pelayaran.

"Sebetulnya ekspor kita ke Timur Tengah tidak begitu besar, tidak sampai lima persen dari jumlah ekspor kita. Tetapi, Timur Tengah itu jalur pelayaran ke Eropa, sehingga kalau ada masalah, otomatis biaya logistik ke Eropa semakin mahal. Kalau logistik mahal, otomatis ekspor kita menurun karena importir di Eropa akan mengalihkan ekspor ke negara lain yang lebih murah," ungkap dia.

Terkait dengan itu, Guru Besar FEB Unair ini menyarankan pemerintah mengambil kebijakan yang dapat mengamankan pasar dalam negeri dengan mengurangi impor. "Kalau ekspor kita mengalami penurunan, paling tidak impornya juga

runkan. Produk yang selama ini impor jika bisa digantikan dengan produk dalam negeri," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu untuk menggunakan instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi dampak Perang Iran-Israel. Perlu adanya harmonisasi antara kebijakan moneter dan fiskal agar pertumbuhan ekonomi tidak turun. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah dapat menerapkan kebijakan perdagangan yang restriktif. Hal ini mengingat ban-



yak negara melakukan tindakan restriktif karena kebijakan tarif Amerika Serikat.

Untuk kebijakan moneter, Prof Rossanto menyarankan cara yang ekspansif. Menurut dia, sudah saatnya Indonesia mengandalkan kekuatan dalam negeri karena ekonomi internasional penuh dengan ketidakpastian.

"Kebijakan moneter kita perlu sedikit ekspansif, istilah lainnya ngegas. Karena inflasi Indonesia sudah terkendali, mungkin Indonesia bisa mulai ngegas dengan menurunkan suku bunga. Akhirnya, investasi bisa meningkat, kredit modal kerja juga meningkat. Masyarakat akan lebih banyak pinjam uang di bank sehingga menggerakkan roda ekonomi," ujarnya.

Toh perang sudah telanjur berlangsung. Stabilitas sistem keuangan, cadangan devisa, juga tata kelola impor minyak menjadi hal yang tak dapat ditawar lagi. Menjalin hubungan baik dengan mitra dagang lama dan merintis pasar ekspor baru jika memungkinkan akan lebih melonggarkan tekanan.

Ringkasnya, pemerintah sudah mengetahui cara mitigasi menghadapi dampak perang Iran-Israel yang beriringan dengan kebijakan tarif Trump. Persoalannya, bagaimana penerapan kebijakan itu efektif dan efisien: Bukan memicu kompleksitas masalah yang sulit mengendalikannya. •





PEDULI MITIGASI

Kewaspadaan terhadap dampak negatif perang Iran dan Israel menjadi perhatian berbagai kalangan. Sedangkan sikap pemerintah memilih non-blok alias tak memihak pihak yang berperang.

Negara dan rakyatnya dapat berbeda sikap. Sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemerintahannya terhadap perang Iran dengan Israel sudah jelas memihak yang mana dengan ikut mengebom instalasi nuklir di Iran. Sedangkan hasil jajak pendapat lembaga YouGov dan media The Economist menunjukkan sebanyak 60 persen warga Amerika Serikat (AS) menolak campur tangan negara itu dalam konflik antara Israel dan Iran.

Lembaga Kantor Berita Nasional Antara melaporkan, hasil survei yang berlangsung pada 13-16 Juni 2025 dengan melibatkan lebih dari 1.500 responden dari seluruh AS itu menunjukkan, hanya 16 persen responden dalam jajak pendapat itu yang mendukung keterlibatan militer Amerika, sedangkan 24 persen lainnya mengaku tidak tahu atau belum menentukan sikap.

Mayoritas responden, sekitar 56 persen, justru mendukung keterlibatan AS dalam perundingan dengan Iran terkait program nuklir di negara itu. Hanya 18 persen responden lainnya yang menentang perundingan.

Sedangkan media AS USA TODAY melaporkan, serangan terhadap situs nuklir Iran pada pertengahan Juni 2025 dapat meningkatkan tekanan pada ekonomi Amerika yang semakin rawan karena perang dagang global yang berlangsung selama berminggu-minggu telah memakan korban. Misalnya Amerika ke dalam apa yang sebelumnya merupakan serangan antara Israel dan Iran kemungkinan besar akan berdampak pada harga minyak, kata para investor, yang dapat berdampak pada ekonomi dengan menyebabkan harga transportasi dan gas yang lebih tinggi, sama seperti inflasi keseluruhan di seluruh ekonomi tampaknya telah terkendali.

Analisis energi Rachel Ziemba mengatakan kepada USA TODAY pada 22 Juni 2025 bahwa harga minyak mungkin tidak akan diperdagangkan jauh lebih tinggi sampai dan kecuali ada guncangan pasokan yang berkelanjutan. Misalnya, Iran memutuskan untuk memblokir Selat Hormuz yang penting. Sedangkan Parlemen Iran pada 22 Juni 2025 sudah menyetujui tindakan yang mendukung hal itu, meskipun apakah itu terjadi tergantung pada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Ziemba menyebut itu risiko "probabilitas rendah, dampak tinggi" - dan risiko yang kemungkinan akan sulit dihitung oleh para pedagang komoditas. Artinya, harga energi mungkin tidak stabil hingga kondisi membaik - bahkan saat liburan musim panas dimulai dan gelombang panas dahsyat melanda wilayah tengah dan timur negara tersebut.

Toh Analisis di Oxford Economics memiliki pandangan yang lebih lunak. "Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah merupakan guncangan buruk lainnya bagi ekonomi yang sudah lemah," ungkap ulasan pada 18 Juni 2025. Para ekonom Oxford mengemukakan bahwa harga minyak sekitar \$130 per barel akan mendorong inflasi AS hingga 6 persen. Inflasi pascapandemi di Negeri Paman Sam itu mencapai puncaknya hingga 9,1 persen pada bulan Juni 2022.

Hal itu akan menempatkan Federal Reserve (The Fed, bank sentral di AS) dalam posisi yang sulit. The Fed menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, dan memangkasnya untuk mendukung pinjaman dan pertumbuhan ekonomi. Sejauh tahun ini, bank sentral telah mempertahankan suku bunga tetap karena menunggu untuk melihat informasi lebih lanjut tentang bagaimana tarif berlaku dalam perekonomian, tetapi hal itu dapat berubah.

Bos Federal Reserve Jerome Powell, berbicara setelah bank sentral mempertahankan suku bunga tetap untuk pertemuan keempat berturut-turut pada tanggal 18 Juni, mengatakan kepada wartawan bahwa The Fed sedang mengamati situasi di Timur Tengah, "seperti yang dilakukan semua orang."

"Yang cenderung terjadi adalah ketika terjadi kekacauan di Timur Tengah, Anda mungkin melihat lonjakan harga energi," kata Powell sebelum serangan AS. "Hal-hal tersebut umumnya tidak cenderung memiliki dampak yang bertahan lama pada inflasi, meskipun, tentu saja, pada tahun 1970-an, hal itu memang terjadi, karena Anda mengalami serangkaian guncangan yang sangat, sangat besar. Namun, kami belum melihat hal seperti itu sekarang." Menurut dia, perekonomian AS jauh lebih tidak bergantung pada minyak asing dibandingkan pada tahun 1970-an, Powell menambahkan.

Bagaimana dengan Indonesia? Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan, pemerintah Indonesia akan mengambil posisi non-blok dalam menyikapi eskalasi yang terjadi akibat perang Iran-Israel. Ia mengemukakan,

pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan mengedepankan upaya menghadirkan perdamaian daripada memicu perang berlarut-larut yang menyebabkan jatuhnya korban.

"Tentu saja karena Indonesia adalah negara yang memiliki prinsip non-blok, maka dalam hal ini, posisi Indonesia adalah posisi yang menginginkan bahwa perdamaian jauh lebih bagus, perdamaian jauh lebih baik ketimbang

Presiden melakukan berbagai upaya mendorong deeskalasi, mendorong menurunnya eskalasi konflik di kawasan itu," kata dia.

Juri menambahkan, Prabowo juga memerintahkan jajaran pemerintah untuk memperhatikan keselamatan warga negara Indonesia di Iran dan Israel. Menurut dia, Prabowo meminta pemerintah pusat maupun perwakilan di luar negeri untuk melakukan antisipasi atas eskalasi yang terjadi.



perang yang membawa korban kedua belah pihak," kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Menurut dia, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan perang Iran vs Israel secara cermat sambil mengupayakan penurunan tensi akibat perang tersebut. "Jadi untuk sambil mengikuti perkembangan ini,

"Agar mengikuti perkembangan yang terjadi di sana, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI," ujar Juri. Selain itu, sambungnya, Prabowo juga meminta evakuasi terhadap WNI yang ada di kedua negara itu, di mana proses evakuasi sedang berjalan saat ini.

Sudah jelas sikap Presiden Prabowo

• INFO KHUSUS

dan pemerintah Indonesia mengupayakan mitigasi dampak negatif perang Iran-Israel yang dibantu oleh pemerintah AS. Dukungan datang dari kalangan wakil rakyat di DPR. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah mitigasi terkait dampak perang Iran dan Israel terhadap perekonomian di tanah air.

Puan mengatakan pemerintah harus segera memitigasi perkembangan sit-

Untuk mengantisipasi dampak perang Iran dan Israel terhadap situasi nasional, Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah akan segera membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. "Apa yang akan kami lakukan terkait dengan hal tersebut, tentu saja ke depan ini dalam waktu dekat pemerintah bersama DPR akan segera membahas rancangan APBN 2026," ujarnya.



uasi global terkait dengan kurs rupiah, subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan dampak ekonomi lainnya. "Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global," kata Puan saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Puan juga tidak memungkiri bahwa ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam merespons serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dapat berpotensi mengkhawatirkan pasar energi global sehingga harga minyak dunia akan meroket. "Termasuk terkait rencana penutupan Selat Hormuz, Iran. Pasti akibatnya itu ke perekonomian. Jadi, pemerintah harus memitigasi terkait dengan perencanaan, kurs, kemudian subsidi BBM dan

lain sebagainya," tuturnya.

Ketua DPR juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menyikapi konflik global tersebut agar tidak membawa dampak kerugian bagi dalam negeri. "Kita politiknya bebas aktif, nanti biar pemerintah yang menyampaikan apa sikap bebas aktif dari pemerintah, tetapi jangan merugikan politik dan situasi geografis Indonesia," katanya.

Di sisi lain, Puan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Indonesia melakukan langkah evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang ada di wilayah konflik Iran dan Israel. "Pemulangan WNI sudah dilakukan, pemerintah sangat proaktif untuk segera memulangkan dan mengevakuasi secara berkelanjutan masyarakat yang ada di sana," ujarnya.

Dia berharap evakuasi WNI yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan aman dan lancar sampai tiba di tanah air. "Hari ini sudah mulai ada warga negara yang di sana dipulangkan, sudah ada di pesawat dan secara bertahap akan dipulangkan ke Indonesia," ucapnya.

Dari kalangan bisnis swasta, Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, pihaknya secara konsisten memantau perkembangan makro ekonomi global, termasuk potensi dampak dari konflik geopolitik yang sedang berlangsung.

"Kami percaya bahwa pemerintah dan otoritas keuangan terkait akan terus mengambil langkah-langkah yang tepat dan responsif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Secara bersamaan, BCA terus memantau pergerakan pasar, termasuk kemungkinan pergeseran preferensi investor ke aset safe haven. Di tengah kondisi yang dinamis, kami senantiasa berinovasi untuk menghadirkan ragam solusi dan produk yang relevan dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang," kata Hera di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Hera mengemukakan pula, arah kebijakan suku bunga global juga menjadi perhatian BCA. Menurut dia, Bank

Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), kemungkinan mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, potensi pemangkasan tetap terbuka apabila terjadi perlambatan ekonomi atau resesi di AS.

Dalam konteks Indonesia, kata Hera, BCA turut menyambut baik keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50 persen. Hera menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi global yang tidak pasti. "Kami mengapresiasi keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga di level 5,50 persen. Kami melihat keputusan ini merupakan langkah strategis BI dalam merespons ketidakpastian dinamika ekonomi global," katanya.

Ia mengatakan pertumbuhan kredit BCA tercatat positif di tengah tantangan global. Per Maret 2025, total kredit yang disalurkan mencapai Rp941 triliun atau tumbuh 12,6 persen secara tahunan (yoy), melampaui rata-rata pertumbuhan industri.

Hera menambahkan bahwa suku bunga kredit BCA relatif stabil bahkan saat siklus kenaikan suku bunga sejak Agustus 2022 hingga September 2024, terutama untuk segmen usaha kecil dan menengah (UKM) serta ritel. "BCA berfokus pada fundamental bisnis perseroan, serta tetap

mengambil langkah yang prudent dalam menghadapi dinamika makro ekonomi saat ini. Untuk mendukung perekonomian nasional, BCA juga akan terus mendorong penyaluran kredit ke berbagai sektor dan segmen, dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, prospek usaha, kebutuhan, dan skala usaha nasabah," ujarnya.

Perkembangan berikutnya, Presiden AS Donald Trump pada Senin malam waktu setempat, Selasa pagi, 24 Juni 2025 mengumumkan bahwa Israel dan Iran telah mencapai kesepakatan resmi untuk menerapkan gencatan senjata secara penuh dan menyeluruh, menandai apa yang disebutnya sebagai akhir dari "Perang 12 Hari".

Dalam sebuah unggahan di platform **Truth Social** pada

Senin, Trump mengucapkan selamat kepada kedua negara dan mengungkapkan bahwa gencatan senjata akan dimulai dalam waktu kurang lebih enam jam, menyusul selesainya operasi militer yang sedang berlangsung dari masing-masing pihak.

Gencatan senjata pada awalnya akan berlangsung selama 12 jam, di mana pihak yang berlawanan akan mempertahankan sikap "damai dan saling menghormati". Menurut Trump, Iran akan menjadi pihak pertama yang memulai gencatan senjata, kemudian Israel akan menyusul 12 jam setelahnya, dan akhirnya pada waktu 24 jam akan diumumkan secara resmi bahwa perang telah berakhir.

Namun, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengemukakan belum ada kesepakatan gencatan senjata atau penghentian operasi militer antara Iran dan Israel. Namun, ia menegaskan bahwa jika Israel menghentikan serbuan terhadap Iran paling lambat pukul 04.00 waktu Teheran (08.30 WIB), maka Iran tidak akan melanjutkan serangan balasannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Araghchi melalui akun media sosial X miliknya pada pukul 00.46 GMT (07:46 WIB). "Sampai saat ini, TIDAK ADA 'kesepakatan' mengenai gencatan senjata atau penghentian operasi militer. Namun, jika rezim Israel menghentikan agresi ilegalnya terhadap rakyat Iran paling lambat pukul 04.00 waktu Teheran (08:30 WIB), kami tidak berniat melanjutkan serangan balasan setelah itu," ungkap Araghchi.

Apapun perkembangannya, dampak perang Iran-Israel memerlukan antisipasi cepat. Dampak positif agaknya minim sekali, sedangkan dampak negatifnya memerlukan mitigasi. ●



BEBAS AKTIF SAJA BELUM CUKUP

Dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan sikap non-blok, Indonesia termasuk negara yang layak menjadi tempat aman dari dampak perang Iran-Israel, bahkan jika eskalasi konflik meningkat terus hingga terjadi Perang Dunia III. Namun, itu saja belum cukup.

Non-blok dan bebas aktif memang belum cukup. Di masa relatif damai sebelum eskalasi konflik Iran-Israel pun, Indonesia masih kalah bersaing dengan sejumlah negara tetangga dalam memikat raja kelana, wisatawan mancanegara, untuk berkunjung. Ini juga memerlukan mitigasi tersendiri. Keamanan dan kenyamanan para raja kelana selama di Indonesia sudah tentu akan menjadi pertimbangan sebelum datang. Terlebih, beberapa peristiwa belakangan ini justru menunjukkan tingkat keamanan dan kenyamanan Indonesia sebagai destinasi para raja kelana malah cenderung berpotensi menjadi kampanye negatif.

Katakanlah misalnya penembakan

dua turis Australia di villa eksklusif, kawasan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, pulau destinasi utama raja kelana. Memang pelakunya tertangkap dan diduga terkait dengan kelompok geng atau preman di negeri asalnya. Namun, yang menjadi soal kesan para raja kelana terhadap faktor keamanan di Bali.

Tambahan pula peristiwa naas yang menimpa Juliana Marins, 27, yang terjatuh dan akhirnya meninggal dunia di Danau Segara Anak dalam pendakian menuju Puncak Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu, 21 juni 2025. Catatan ringkas saja: Rinjani, Lombok, termasuk NTB juga destinasi penting untuk memikat raja kelana.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana pun menyampaikan duka

mendalam atas insiden tersebut pada Selasa, 24 Juni 2026. "Keselamatan wisatawan adalah prioritas utama. Kami terus memperkuat SOP dan pengawasan di destinasi ekstrem," ujar Widiyanti dalam pernyataan resmi

Rangkaian peristiwa di Bali dan Lombok tadi bagaikan kampanye negatif seiring berubarannya publikasi tentang Indonesia sebagai salah satu negara teraman dalam konteks perang Iran-Israel yang eskalasinya dapat memicu perang dengan senjata nuklir. Sejumlah media nasional maupun asing sudah mengutip daftar negara-negara yang dapat berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman karena posisi geopolitik, netralitas militer, dan kondisi yang stabil, yang menawarkan



perlindungan dalam skenario Perang Dunia III. Indonesia adalah salah satunya. Beberapa destinasi lain yang dianggap paling aman antara lain Antartika dekat Kutub Selatan, Islandia dekat Kutub Utara, Selandia baru, Swis, Greenland, Tuvalu, Argentina, Bhutan, Chile, Fiji, dan Afrika Selatan.

Sedangkan laporan "Travel Safety Index" dari Lembaga Hellosafe menempatkan Indonesia dalam 10 negara paling tidak aman bagi liburan raja kelana pada 2025: Filipina (82.32), Kolombia (79.21), Meksiko (78.42), India (77.86), Rusia (75.65), Yaman (74.6), Indonesia (72.94), Somalia (70.8), Mozambik (69.69), dan Pakistan (68.03). Sedangkan 10 negara yang paling aman untuk raja kelana adalah Islandia (18.23), Singapura (19.99), Denmark (20.05), Austria (20.31), Swiss (20.51), Republik Ceko (21.19), Slovenia (21.44), Finlandia (21.81), Irlandia (22.49), Hongaria (22.87). Dari indeks keamanan yang disusun Hellosafe ini terlihat, semakin tinggi poin yang diperoleh, semakin tinggi risiko keamanan yang harus dihadapi para raja

kelana.

Sebenarnya per 2024, angka kunjungan ke kawasan Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia, menunjukkan pemulihan dihitung sejak berakhirnya pandemi. Destinasi utama tidak hanya mengalami lonjakan kedatangan in-



Keselamatan wisatawan adalah prioritas utama. Kami terus memperkuat SOP dan pengawasan di destinasi ekstrem.

ternasional, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun yang mengesankan. Thailand tetap menjadi destinasi teratas, menerima 35,5 juta pengunjung internasional, memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional. Malaysia menyusul dengan 25,0 juta, mengamankan posisi kedua,

sementara Vietnam melanjutkan lintasan pertumbuhannya, memikat 17,6 juta wisatawan internasional.

Singapura mencatat 16,6 juta pengunjung, mencerminkan daya tariknya yang kuat sebagai pusat bisnis dan rekreasi. Indonesia memikat 13,9 juta, sementara Kamboja dan Filipina melaporkan masing-masing 6,7 juta dan 5,9 juta kedatangan. Pada 2024, Asia Tenggara menyambut total 121,3 juta kedatangan internasional, menyoroti pemulihan pariwisata yang kuat di kawasan ini.

Catatan pentingnya, Vietnam memimpin kawasan Asia Tenggara dalam pertumbuhan tahun ke tahun (YoY), mencapai peningkatan kedatangan yang luar biasa sebesar 39,5 persen pada 2024 dibandingkan dengan angka kunjungan per 2023. Pertumbuhan yang mengesankan ini memungkinkan Vietnam untuk melampaui Singapura dan mengamankan posisi ketiga dalam total kedatangan. Meskipun Vietnam memiliki jumlah kedatangan total yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain,



● INFO KHUSUS

tingkat pertumbuhannya melampaui semua pasar lainnya, yang menyoroti momentumnya yang semakin cepat dalam pariwisata regional.

Setelah Vietnam, Thailand mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 28,1 persen dan Malaysia mengalami peningkatan sebesar 24,2 persen. Kamboja mencatat pertumbuhan sebesar 22,9 persen, sementara kedatangan wisatawan Singapura meningkat sebesar 21,9 persen, dan Indone-

ya wisatawan melampaui tingkat sebelum pandemi. Vietnam menyusul dengan angka 97,64 persen, menunjukkan ketahanan dan daya tariknya pascapandemi.

Pemulihan Malaysia berada di angka 95,85 persen, semakin memperkuat posisinya sebagai pasar dengan kinerja terbaik. Thailand, meskipun memimpin dalam jumlah kedatangan absolut, pulih 89,05 persen dari angka tahun 2019, menunjuk-

gian besar karena kebijakan visanya yang longgar. Kebanyakan wisatawan mancanegara Malaysia berasal dari Singapura, dengan lebih dari 4,9 juta pengunjung pada kuartal pertama. Diikuti oleh 1,12 juta pengunjung dari Tiongkok dan 1,08 juta dari Indonesia.

Thailand berada di peringkat kedua dengan 9,55 juta kedatangan. Vietnam menyusul di posisi ketiga dengan 6 juta, sementara Singapura berada di



sia mengalami pertumbuhan sebesar 19,6 persen. Di sisi lain, Filipina mengalami peningkatan yang lebih moderat sebesar 9,2 persen.

Seiring dengan pulihnya kedatangan wisatawan internasional, ukuran penting yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat pemulihan, yang diukur sebagai persentase kedatangan tahun 2024 dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi tahun 2019. Kamboja memimpin kawasan tersebut, melampaui pemulihan penuh dengan tingkat pemulihan sebesar 101,35 persen, yang menunjukkan masuk-

kan ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Singapura (86,86 persen) dan Indonesia (86,15 persen) menunjukkan pemulihan yang kuat, sementara Filipina tertinggal di angka 72,02 persen, mencerminkan tantangan dalam mencapai jumlah pengunjung sebelum pandemi.

Persaingan berlanjut di Kuartal I (Januari-Maret) 2025. Menurut laporan media Vietnam, VnExpress International, Malaysia menjadi destinasi wisata teratas di Asia Tenggara pada kuartal pertama tahun ini, menarik 10,1 juta pengunjung asing, seba-

peringkat keempat dengan 4,31 juta, berdasarkan data resmi. Pada Kuartal I 2025, Indonesia masih tertinggal dari Singapura. Mengutip data Badan Pusat Statistik berdasarkan catatan lembaga Imigrasi, kunjungan raja kelana Januari 2025 mencapai 1,15 juta, Februari 2025 turun menjadi 1,02 juta, turun lagi menjadi 984 ribu pada Maret 2025, dan naik menjadi 1,16 juta per April 2024.

Bagaimana dengan perkembangan global seiring perang Iran-Israel? Jelas Non-blok dan bebas aktif saja masih belum memadai. ● Editor: GE

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



**Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut**

- ▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**
- ▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**
- ▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**
- ▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**

**INFO PASANG IKLAN
NUR AISAH
0815-1157-6312**

- IKLAN BACK COVER
RP 75.000.000
- IKLAN DISPLAY/HAL
RP 50.000.000
- IKLAN ADVERTORIAL/HAL
RP 65.000.000
- CENTER SPREAD
RP 80.000.000





info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

EDISI #57 JULI 2025



AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

SUDAH PAS WAKILI INDONESIA